

Laporan

KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2025



LANGKA RA.
Kota Cantik



Lakip
Tahunan



Ali Yudhi H., SE., Apt., MM

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya dapat terselesaikan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pelayanan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan ikhtisar yang menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci, lengkap dan sistematis capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur. Dalam laporan kinerja BBPOM Di Palangka Raya Tahun 2025 tertuang indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisis yang memadai tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja serta realisasi anggaran serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi baik internal maupun eksternal untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu wujud penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian kinerja, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran disertai analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja, untuk peningkatan kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan selanjutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Palangka Raya, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya



Ali Yudhi H., S.F., Apt., M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029, dokumen Renstra menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi dengan memperhatikan tantangan, serta peluang yang timbul dari dinamika lingkungan strategis, telah ditetapkan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029 sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang pada dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029 dengan melaksanakan 22 program kegiatan untuk mencapai 8 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **103.51** dengan Predikat NKO **Istimewa**. Pencapaian 28 indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **110,17%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.
2. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO **berhasil tercapai** dengan capaian **104,15%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **103,56%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** dengan kriteria **Baik**.
5. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **109,25%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
6. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **berhasil tercapai** dengan capaian **101,08%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

7. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **108,70%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
8. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **108,70%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
9. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100,82%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
10. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **104,65%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
11. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **107,13%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
12. Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **102,82%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
13. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **102,16%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
14. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **berhasil tercapai** dengan capaian **105,66%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
15. Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
16. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
17. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **106,53%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
18. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
19. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
20. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
21. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan **berhasil tercapai** dengan capaian **109,08%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
22. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **104,17%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
23. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **111,11%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.
24. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **105,53%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

25. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM **berhasil tercapai** dengan capaian **100,41%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
26. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM **berhasil tercapai** dengan capaian **96,35%** dengan kriteria **Baik**.
27. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
28. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM **berhasil tercapai** dengan capaian **97.67%** dengan kriteria **Baik**.

Dari dua puluh delapan Indikator Kinerja Utama tersebut mendukung pencapaian 8 Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, **berhasil tercapai** dengan capaian **104,59%** yang diukur dengan 15 indikator kinerja. Kelimabelas indikator kinerja tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan distribusi capaian 12 indikator dengan kriteria Sangat Baik, 2 indikator dengan kriteria Baik dan 1 indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan dengan capaian 110,17%.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja dengan kriteria Baik.
3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **101,63%** yang diukur dengan 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator tercapai dengan kriteria Sangat Baik, dan 3 indikator tercapai dengan kriteria Baik.
4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu **berhasil tercapai** dengan capaian **109,08%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik.
5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **104,17%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik.
6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif **berhasil tercapai** dengan capaian **111.11%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
7. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Layanan Publik UPT yang prima **berhasil tercapai** dengan capaian **105.53%** yang diukur dengan 1 indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik.
8. Sasaran Kegiatan Kedelapan, Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal **berhasil tercapai** dengan capaian **98.61%** yang diukur dengan 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator tercapai dengan kriteria Sangat Baik, dan 3 indikator tercapai dengan kriteria Baik.

Dalam pencapaian tujuannya, Balai Besar POM di Palangka Raya didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang tertuang pada dokumen DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024. Pada tanggal 22 Januari 2025, pagu anggaran tersebut menjadi Rp 14.035.291.000,-. Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 8.093.017.000,- berupa blokir anggaran sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada tanggal 10 April 2025, pagu anggaran menjadi Rp 17.229.500.000,- sebagai tindak lanjut atas terbitnya persetujuan usulan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025.

Pada tanggal 08 Juli 2025, pagu anggaran menjadi Rp 16.688.483.000,- sebagai tindak lanjut Penambahan pagu Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN Rp 5.588.000,- dan pengurangan belanja Pegawai senilai Rp 546.605.000,-.

Pada tanggal 11 November 2025, pagu anggaran menjadi Rp 16.816.295.000,- sebagai tindak lanjut pembukaan blokir anggaran pelayanan publik dalam rangka pemberian sertifikasi.

Terhadap pagu anggaran yang dikelola tersebut dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan, terealisasi sebesar Rp 16.713.718.439,- atau 77.42% dari pagu awal atau 99.39% dari pagu efektif. Dengan realisasi anggaran sebesar 99.39% untuk melaksanakan 22 kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian 28 Indikator Kinerja, memberikan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar **0,04** dengan kriteria **100% efisien**.

Nilai efisiensi 28 indikator kinerja berada pada rentang nilai -0,03 sampai 0,13 memberikan nilai efisiensi 8 sasaran kegiatan **0,37** dengan kriteria **100% efisien** dengan rentang nilai -0,01 sampai 0,11. Terhadap 22 kegiatan yang dilaksanakan memberikan nilai **0,11** dengan kriteria **100% efisien** dengan rentang nilai 0.00 sampai 1,76. Dari 22 kegiatan tersebut, hanya 1 kegiatan yang tidak efisien.

Dalam mencapai tujuan organisasi tahun 2025, Balai Besar POM di Palangka Raya menghadapi tantangan signifikan berupa berkurangnya alokasi anggaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan program Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan dukungan manajemen. Disisi lain, kondisi SDM yang terpenuhi 72.04% dari Analisis Beban Kerja (ABK), dengan distribusi kompetensi pada level sedang. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi kapasitas pengawasan, kecepatan layanan, kualitas analisis laboratorium, serta efektivitas penindakan. Selain kendala anggaran dan SDM, tantangan lain yang dihadapi antara lain:

1. Luas wilayah pengawasan dan sebaran geografis kabupaten/kota yang memerlukan biaya operasional tinggi.
2. Dinamika peredaran produk melalui *e-commerce* dan media sosial yang meningkatkan kompleksitas pengawasan siber.
3. Peningkatan ekspektasi publik terhadap layanan cepat, transparan, dan berbasis digital.
4. Risiko kelelahan pegawai (*burnout*) akibat beban kerja tinggi.

Terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi, melahirkan inovasi SMART LAURA (**Smart Public Service-Layanan Publik Jarak Jauh**), yaitu model pelayanan publik berbasis *Tele-Public Service* yang memanfaatkan teknologi sederhana, murah, dan mudah diperoleh berupa: Sistem *Doorbell* interaktif, dan *Closed-Circuit Television* (CCTV) dua arah. Teknologi ini ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kantor DPMPTSP sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan langsung dari petugas tanpa kehadiran fisik penuh di setiap lokasi. Outcome dari inovasi ini antara lain: Efisiensi anggaran melalui penggunaan teknologi *low-cost high-impact*, optimalisasi SDM tanpa penambahan pegawai, perluasan jangkauan layanan di seluruh MPP dan DPMPTSP, jaminan layanan setiap hari kerja, dan peningkatan Indeks Pelayanan Publik (tercapai 105,53% - kategori Sangat Baik).

Selain SMART LAURA, dilakukan langkah strategis lain, yaitu refocusing pengawasan berbasis risiko, berupa pengaturan ulang titik lokus pengawasan, kolaborasi lintas fungsi dan lintas sektor, digitalisasi dan paperless office, dan penguatan kompetensi internal.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mengantisipasi risiko kegagalan, dilakukan langkah preventif berupa manajemen risiko terintegrasi, *early warning system* kinerja, strategi multi tasking SDM, optimalisasi anggaran berbasis output dan penguatan budaya kinerja. Dalam

pelaksanaannya upaya ini efektif dan efisien berhasil mengatasi kendala terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia dan berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar **103.51** dengan Predikat NKO Istimewa.

Palangka Raya 20 Februari 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di
Palangka Raya



Ali Yudhi Hartanto

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor Januari 2025



BBPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN PENGAWALAN KEAMANAN PANGAN BAGI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KOTA PALANGKA RAYA



Sabtu, 11 Januari 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Siap Saji dan Food Handling kepada 47 (empat puluh tujuh) orang anggota SPPG di Jl. Bukit Kenanga, Kota Palangka Raya. Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto hadir untuk memberikan pengarahan dan membuka kegiatan secara resmi. Ali Yudhi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para anggota dengan prinsip-prinsip keamanan pangan dan bagaimana menangani pangan siap saji dengan benar



DUKUNG PENUH UMKM PANGAN OLAHAN NAIK KELAS, BBPOM DI PALANGKA RAYA SIAP BERKOLABORASI DENGAN RUMAH BUMN PALANGKA RAYA



Rumah BUMN merupakan wadah untuk memberdayakan UMKM dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diinisiasi oleh BUMN dan ditujukan sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Berawal dari kesamaan Visi dalam membantu UMKM terutama UMKM Pangan Olahan di Palangka Raya untuk naik kelas, Rumah BUMN Palangka Raya melakukan kunjungan ke kantor BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2025. Agenda kunjungan Rumah BUMN tersebut antara lain persiapan Kerjasama (MoU) dengan BBPOM di Palangka Raya dalam hal pengembangan UMKM di wilayah Palangka Raya.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Februari 2025



**POS
IND**

**BBPOM DI PALANGKA RAYA DAN POS INDONESIA LOGISTIK
JALIN KERJASAMA PENGAWASAN PRODUK FARMASI DAN
PANGAN OLAHAN DI KALIMANTAN TENGAH**



Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi bersama Executive General Manager Pos Indonesia Logistik KCU Palangka Raya 73000 Mudjibur Rachman menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal pengiriman dokumen atau paket produk Balai Besar POM di Palangka Raya pada Selasa, 18 Februari 2025 di kantor Pos Indonesia Logistik KCU Palangka Raya 73000. Penandatanganan ini menandai komitmen kedua instansi untuk besinergi dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah



**BPP
MHKP**

**KUNJUNGAN KOORDINASI BALAI BESAR POM
PALANGKA RAYA KE BPPMHKP KALTENG**



Rumah BUMN merupakan wadah untuk memberdayakan UMKM dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diinisiasi oleh BUMN dan ditujukan sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Berawal dari kesamaan Visi dalam membantu UMKM terutama UMKM Pangan Olahan di Palangka Raya untuk naik kelas, Rumah BUMN Palangka Raya melakukan kunjungan ke kantor BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2025. Agenda kunjungan Rumah BUMN tersebut antara lain persiapan Kerjasama (MoU) dengan BBPOM di Palangka Raya dalam hal pengembangan UMKM di wilayah Palangka Raya.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Maret 2025



BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA JALIN KOLABORASI UNTUK JAMIN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN DI KALTENG



Palangka Raya - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya turut serta dalam kegiatan "Coffee Morning" yang diselenggarakan oleh Badan Mutu KKP pada 27 Februari 2024. Dalam acara tersebut, BBPOM di Palangka Raya ingin bekerja sama melalui berbagai program kolaborasi untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk perikanan di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang juga dihadiri oleh pelaku usaha perikanan ini, dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).



TINGKATKAN SINERGITAS, KEPALA BBPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN AUDIENSI DENGAN P.J. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



Guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palangka Raya, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, melakukan audiensi dengan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak. Pertemuan ini berlangsung pada Senin, 3 Maret 2024, di kantor Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Dalam audiensi tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto, serta Ketua Tim Inspeksi, Mei Indarti, dan Ketua Tim Program Prioritas Nasional, Astry Talenta Betharia, dari BBPOM di Palangka Raya.



GALANG SINERGITAS DAN KOLABORASI BERSAMA BKKBN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya- Perkuat dukungan lintas sektor terkait adalah salah satu upaya strategis BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan visi dan misi BPOM dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di daerah. Pada Kamis tanggal 27 Februari 2025, Kepala BBPOM di Palangka Raya, Bapak Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, M.Sc melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Sunarto, S.K.M, M.Adm, KP terkait dengan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

April - Mei 2025



BBPOM DI PALANGKA RAYA GELAR ADVOKASI PROGRAM TERPADU PRIORITAS NASIONAL SADAR PANGAN AMAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN LINTAS SEKTOR DI KOTA PALANGKA RAYA



Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya telah menyelenggarakan kegiatan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Program Terpadu Prioritas Nasional Sadar Pangan di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 April 2025, bertempat di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya. Kegiatan Advokasi ini merupakan tahap awal dari rangkaian pelaksanaan Program Terpadu Prioritas Nasional Sadar Pangan Aman, yang mencakup Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar pangan aman.



BBPOM PALANGKA RAYA GELAR BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DENGAN PENDEKATAN INKLUSIF BAGI KELOMPOK RENTAN



Jumat, 23 Mei 2025 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Kader Keamanan Pangan Kelompok Rentan & Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan bertempat di Aula Tjilik Riwut Balai Besar POM di Palangka Raya. Kegiatan ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan yang inklusif dan prima serta peningkatan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman dan sehat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Sekolah Khusus di Kota Palangka Raya, Himpunan Mahasiswa Disabilitas Provinsi Kalteng, Rumah BUMN, Komunitas Teman Tuli, dan UMKM PMEFS. Peserta diberikan pengetahuan dasar mengenai cara memilih, mengolah, dan menyimpan pangan dengan aman, mengenali bahan berbahaya pada pangan, dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Juni 2025



**TINJAU LAYANAN PUBLIK, ANGGOTA DPD RI KUNJUNGI
GERAI BBPOM PALANGKA RAYA DI MAL PELAYANAN
PUBLIK HUMA BETANG KOTA PALANGKA RAYA**



Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau fasilitas pelayanan publik, Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Agustin Teras Narang, SH, MH, berkesempatan hadir mengunjungi Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya pada Rabu, 11 Juni 2025. Kunjungan ini salah satunya bertujuan untuk menggali berbagai informasi terkait tantangan, hambatan, dan kebutuhan riil yang dihadapi penyelenggara layanan di lapangan. Kunjungan ini menjadi bagian dari program reses masa kegiatan 23 Mei sd 19 Juni 2025, dengan fokus pada pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada kunjungan ini turut didampingi Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Palangka Raya, Vallery Budianto, S.T., M.P.W.K. dan Kepala MPP Huma Betang, Pancar Fit, S.Kom.



**BANGUN GENERASI EMAS, BBPOM PALANGKA RAYA
BERKOLABORASI DENGAN DPKP KOTA PALANGKA RAYA
LAKUKAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DI SMPN 7
PALANGKA RAYA**



Anak Usia Sekolah merupakan penentu kualitas masa depan bangsa. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Generasi Emas melalui konsumsi pangan yang aman, BBPOM Palangka Raya bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangka Raya melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak usia sekolah dalam cerdas memilih dan mengkonsumsi pangan aman, bermutu dan bergizi seimbang di SMPN 7 Palangka Raya pada Kamis, 12 Juni 2025. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Palangka Raya, Langkis.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Juni 2025



BBPOM DI PALANGKA RAYA SOSIALISASIKAN PENGENDALIAN AMR (ANTI MICROBIAL RESISTANCE) KEPADA PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)



Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan sosialisasi pengendalian AMR (Anti Microbial Resistance) kepada pimpinan dan penanggung jawab PBF yang ada di Kota Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 bertempat di Aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Ketua PD IAI Kalimantan Tengah Guntur Satria Pratomo. Pada kegiatan ini, Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto menyampaikan bahwa jika AMR tidak dikendalikan secara nyata maka akan menjadi "silent killer" untuk penderita penyakit infeksi. Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya adalah mendorong Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan surat edaran larangan penjualan antibiotik tanpa resep dokter.



GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK, BBPOM PALANGKA RAYA HIMPUN SARAN MASUKAN LINTAS SEKTOR PENERIMA LAYANAN UNTUK PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara hybrid di Aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM Palangka Raya dan melalui Zoom Meeting untuk menghimpun masukan dari berbagai lapisan masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025. Acara ini menghadirkan perwakilan Penyelenggara Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, Pengguna Layanan, Ahli/Pakar dan akademisi, serta Media Massa. Forum Konsultasi Publik ini dibuka secara langsung oleh Kepala BBPOM Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

JULI - AGUSTUS 2025



BBPOM PALANGKA RAYA TINGKATKAN LAYANAN TANPA BATAS DENGAN LAUNCHING SMART LAURA DI KABUPATEN BARITO SELATAN



Palangka Raya – Senin, 14 Juli 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya kini hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan melalui Launching SMART LAURA di Kabupaten Barito Selatan. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Ali Yudhi melakukan kunjungan dan audiensi kepada Kepala Dinas DPMPSTP Barito Selatan Ripatliha, SE., MM. melalui kunjungan ini Ali Yudhi memperkenalkan inovasi pelayanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu SMART Laura. Hadirnya SMART Laura ini sebagai komitmen BBPOM di Palangka Raya untuk selalu memberikan layanan tanpa jarak dan waktu.



KOLABORASI BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BERSAMA DISDAGPERIN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AWASI KEAMANAN PANGAN DAN EDUKASI MASYARAKAT



Palangka Raya – Dalam upaya memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Agustus 2025 yang bertempat di Huma Betang Car Free Night Kota Palangka Raya.



ANAK CERDAS DENGAN KONSUMSI PANGAN AMAN, BBPOM PALANGKA RAYA DAN DPKP KOTA PALANGKA RAYA LAKUKAN SOSIALISASI PANGAN B2SA DI SDN 3 TANJUNG PINANG



Palangka Raya – BBPOM Palangka Raya bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangka Raya melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak usia sekolah dalam cerdas memilih dan mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Generasi Emas melalui konsumsi pangan yang aman. Bertempat di SDN 3 Tanjung Pinang pada Selasa, 5 Agustus 2025. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SDN 3 Tanjung Pinang, Lilie Resin.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

AGUSTUS 2025



BERSAMA PKK, BBPOM PALANGKA RAYA DORONG KADER JADI PELOPOR PANGAN AMAN DAN UMKM BERDAYA SAING



Palangka Raya - Sebagai hasil sinergi antara Balai Besar POM di Palangka Raya, Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya, dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang berfokus pada dua sasaran utama, yaitu menjamin keamanan pangan masyarakat serta mendukung pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) telah sepakat dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Puluhan kader PKK Kota Palangka Raya resmi mengikuti rangkaian kegiatan (Bimtek) pada 7 Agustus 2025, bertempat di Aula Tjilik Riwut, Balai Besar POM di Palangka Raya.



KOLABORASI STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, SERTA TP PKK KOTA PALANGKA RAYA DORONG KEAMANAN PANGAN DAN B2SA DI SEKOLAH



Palangka Raya - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta TP PKK Kota Palangka Raya menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan dan B2SA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di SDN 1 Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah tersebut. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya beragam dan bergizi, tetapi juga aman dan bebas dari bahan berbahaya.



BBPOM DI PALANGKA RAYA & PKK KOTA PALANGKA RAYA : SUKSES KADER PKK PALANGKA RAYA KANTONGI LEGALITAS PRODUK MELALUI BIMTEK PKP



Palangka Raya - Rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) bagi Kader PKK Kota Palangka Raya resmi ditutup pada Selasa (26/08/2025) di Aula Rumah Jabatan Walikota. Acara yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya yang bekerjasama dengan BBPOM di Palangka Raya ini berhasil mencetak output nyata berupa 6 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 3 Izin Edar PIRT (SPPIRT), serta pembuatan label untuk 37 peserta.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

AGUSTUS - SEPTEMBER 2025



**PEMBAHASAN RANCANGAN SURAT EDARAN
PENGENDALIAN ANTIBIOTIK DENGAN
ORGANISASI PROFESI IAI, IDI, PAFI, IBI, & PPNI**



Palangka Raya – Sebagai langkah nyata pengendalian resistensi antimikroba, Balai Besar POM di Palangka Raya mendorong terbitnya surat edaran gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Peredaran Antibiotik. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah rapat pembahasan draft Surat Edaran tersebut. Untuk itu, pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2025 bertempat di aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM di Palangka Raya, dilakukan rapat pembahasan bersama organisasi profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto. Pada kesempatan ini, Ali Yudhi Hartanto menyampaikan bahwa jika AMR tidak dikendalikan secara nyata maka akan menjadi "silent killer" untuk penderita penyakit infeksi.



**BBPOM PALANGKA RAYA DAN POLTEKKES PALANGKA RAYA RESMIKAN
KERJASAMA STRATEGIS MELALUI PENANDATANGANAN MOU**



Palangka Raya, 27 Agustus 2025 – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Palangkaraya secara resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di kampus Poltekkes Palangkaraya. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, SF., Apt., M.M., dan Direktur Poltekkes Palangkaraya, H. Mars Khendra Kufriyadi, S.T.P., M.P.H.



**SINERGI BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BERSAMA DINAS KESEHATAN
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH KERJA
BBPOM DI PALANGKA RAYA SERTA PELAKU USAHA OBAT BAHAN ALAM JAMU**



Palangka Raya – Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkuatan Pengawasan Obat Bahan Alam mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) telah dilaksanakan pada Senin (01/09/2025) secara daring melalui zoom meeting. Acara yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya ini dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam Jamu wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

SEPTEMBER 2025



GANDENG DERMATOLOGIST DAN SKIN EXPERT DALAM WEBINAR KIE KOSMETIK, BBPOM DI PALANGKA RAYA TINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KOSMETIK



BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu UPT Badan POM yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk didalamnya Kosmetika, menyelenggarakan kegiatan Webinar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan (KIE) Kosmetik kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 03 September 2025 secara daring (online) melalui Zoom Meeting dan Streaming Youtube. Dengan mengangkat tema "Cerdas memilih Kosmetik: Kenali Kebutuhan Kulitmu, Pilih Kosmetik Aman", BBPOM di Palangka Raya menghadirkan 2 (dua) narasumber yakni, dari Dermatologist dan Skin Expert Dr. dr. Fitria Agustina, Sp.DVE, FINSDV, FAADV dan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan POM RI, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.



SOFT LAUNCHING E-LEARNING BETANG AKZI, BBPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN PELATIHAN KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI BAGI SPPG PANARUNG



Palangka Raya - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta TP PKK Kota Palangka Raya menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan dan B2SA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di SDN 1 Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah tersebut. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya beragam dan bergizi, tetapi juga aman dan bebas dari bahan berbahaya.



BBPOM DI PALANGKA RAYA MENERIMA VISITASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya - Bertempat di Aula BBPOM di Palangka Raya pada Selasa, 23 September 2025 BBPOM Palangka Raya menerima Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

OKTOBER 2025



BBPOM DI PALANGKA RAYA MENGIKUTI UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



Palangka Raya – Kamis, 16 Oktober 2025, BBPOM di Palangka Raya mengikuti Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Bertempat di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BBPOM di Palangka Raya, Bapak Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., MM hadir untuk memaparkan keterbukaan informasi di BBPOM di Palangka Raya. Paparan Badan Publik dinilai secara langsung oleh para Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



BBPOM PALANGKA RAYA TEKANKAN PERAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MBG DI KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya – Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam bidang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta sebagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (PSHAM) dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka diselenggarakan Rapat Pemantauan dan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah, pada Kamis 23 Oktober 2025.



SOSIALISASI SAKA POM PADA KEGIATAN KEMAH BESAR PRAMUKA SE-KOTAWARINGIN TIMUR



Pada tahun 2025 ini, kegiatan sosialisasi dan rekrutmen anggota SAKA POM ditujukan pada Kwartir Cabang Kotawaringin Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 di Bumi Perkemahan Wahyudi K Anwar, Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, bertepatan dengan kegiatan Kemah Besar Pramuka se-Kotawaringin Timur.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

NOVEMBER 2025



TUMBUHKAN KONSUMEN CILIK YANG CERDAS, SISWA SDI IMAM NAWAWI BELAJAR KEAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI BALAI BESAR POM PALANGKA RAYA



Palangka Raya – Suasana ceria tampak di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya saat sebanyak 28 siswa-siswi dan 2 guru pendamping dari SDI Imam Nawawi melakukan kunjungan edukatif untuk belajar tentang pentingnya keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan pada 12 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak sejak usia dini mengenai cara memilih makanan yang aman, mengenali produk yang berisiko terhadap kesehatan, serta memahami peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari pangan dan obat yang tidak memenuhi ketentuan.



BBPOM PALANGKA RAYA GELAR SOSIALISASI EDARAN GUBERNUR KALTENG: PERKETAT PENGENDALIAN ANTIBIOTIK DEMI CEGAH RESISTENSI!



Palangka Raya – Rabu 12 November 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Peredaran dan Penggunaan Antibiotik untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik. Acara yang berlangsung di Aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM di Palangka Raya ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam memerangi ancaman Resistensi Antimikroba/Antimicrobial Resistance (AMR).



UPAYA BERSAMA AMANKAN PANGAN UNTUK KONSUMEN BBPOM DI PALANGKA RAYA BERKOLABORASI DENGAN DISPERINDAG KALTENG PERIKSA PANGAN OLAHAN DI PASAR KAHAYAN



Palangka Raya – Dalam rangka memastikan bahwa pangan olahan yang dijual di Pasar Tradisional aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya pada Selasa, 25 November 2025.

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

DESEMBER 2025



DUKUNG PENURUNAN STUNTING, DWP BBPOM PALANGKA RAYA GELAR KIE CEGAH STUNTING DI KELURAHAN KAMELOH BARU



Palangka Raya – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan tema Ayo Cegah Stunting. Selasa, 02 Desember 2025 bertempat di Masjid Al Hijrah Kel. Kameloh Baru, kegiatan KIE ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2025. Peserta kegiatan ini yaitu 40 orang Ibu dan Anak, Ketua PKK Kameloh Baru, Kader Posyandu, dan Perwakilan Puskesmas terkait. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan jadwal Posyandu yang rutin dilaksanakan tiap bulannya.



BBPOM PALANGKA RAYA JANGKAU PELOSOK KALTENG LEWAT INOVASI MAHAGA SEI KALTENG, DORONG IEBA ALBUMIN IKAN GABUS PENUHI STANDAR CPOBAB



Katingan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin mutu sedaan farmasi dan makanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Melalui inovasi pengawasan jalur air bertajuk "Mahaga Sei Kalteng" (Menjaga Sungai Kalimantan Tengah), tim BBPOM menyisir sarana produksi dan distribusi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kegiatan pengawasan yang berfokus pada jalur sungai ini dilaksanakan pada tanggal 09 hingga 10 Desember 2025 di wilayah Sungai Katingan, Kabupaten Katingan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meminimalkan risiko peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak bermutu yang berpotensi masuk melalui jalur sungai.



PERKUAT SINERGI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, BBPOM DI PALANGKA RAYA DAN POLDA KALIMANTAN TENGAH RESMI TANDATANGANI KERJA SAMA STRATEGIS



Palangka Raya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya resmi memperkuat kerja sama strategis dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kegiatan penandatanganan kerja sama dilaksanakan serangkaian dengan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Ops Lilin Telabang 2025. Prosesi khidmat ini berlangsung di Aula Graha Bhayangkara Mapolda Kalteng, Kamis pagi, 18 Desember 2025.

Highlight Kinerja

3. Penghargaan - penghargaan

PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN RAIH PERINGKAT III KAB/KOTA PANGAN AMAN TAHUN 2024



Kepala BBPOM Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto SF, Apt., MM menyerahkan trophy dan sertifikat penghargaan Kota/Kabupaten Pangan Aman Tahun 2024 kepada Pemerintah Kab. Barito Selatan yang diterima secara langsung oleh Bupati Kab. Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri, ST., MM. Kab. Barito Selatan meraih peringkat Terbaik III Regional Tengah Timur dalam Penilaian Kab/Kota Pangan Aman Tahun 2024. Selamat atas prestasi gemilangnya untuk Pemerintah Kab. Barito Selatan



Highlight Kinerja

3. Penghargaan - penghargaan

RUNNER UP GREEN LABORATORY PADA GREEN LABORATORY FORUM AND AWARDS BADAN POM 2025 TINGKAT NASIONAL!

BBPOM di Palangka Raya Kembali Mengukir Prestasi Tingkat Nasional!

Selamat kepada seluruh tim atas pencapaian gemilang sebagai Runner UP Green Laboratory pada Green Laboratory Forum and Awards Badan POM 2025 Tingkat Nasional!

Kemenangan ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga semangat baru untuk terus menciptakan solusi ramah lingkungan. Mari jadikan setiap lab sebagai pelopor keberlanjutan! Selamat untuk semua!



3. Penghargaan - penghargaan

FUNGSI PENINDAKAN BBPOM DI PALANGKA RAYA MERAIH PRESTASI ANALIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN TERBAIK DAN PENGALANGAN STAKEHOLDER TERBAIK KATEGORI UPT BALAI BESAR POM



**BBPOM PALANGKA RAYA RAIH PERINGKAT 2 INFORMATIF BADAN PUBLIK
VERTIKAL ANUGERAH KIP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**



**KUALIFIKASI BADAN PUBLIK INSTANSI VERTIKAL
KATEGORI INFORMATIF**

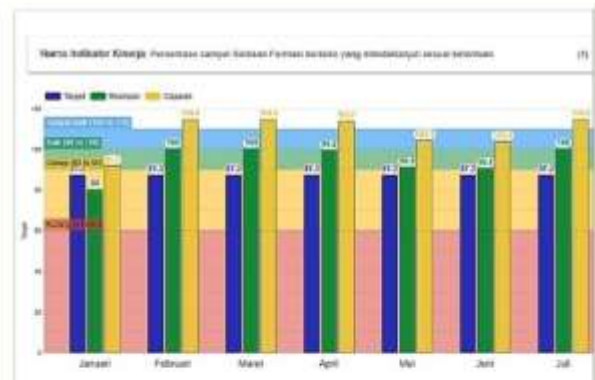
2. BALAI BESAR POM PALANGKA RAYA	95,14
3. BPK-RI PERWAKILAN PROV. KALTENG	92,14
4. PENGADILAN TINGGI AGAMA P. RAYA	91,74
5. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA P. RAYA	91,03
6. KPU PROV. KALTENG	90,29
7. BAWASLU PROV. KALTENG	90,35
8. OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALTENG	90,03

2. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Dashboard Kinerja BBPOM Palangka Raya, sebuah platform visual interaktif yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengawasan obat dan makanan. Dashboard ini akan menyajikan gambaran komprehensif capaian kinerja dari berbagai fungsi BBPOM Palangka Raya, dengan fokus awal pada fungsi Pemeriksaan.



- Menampilkan visualisasi data hasil pengawasan yang mudah dipahami
- Pengguna dapat melihat secara langsung jumlah sarana serta jumlah produk yang telah diawasi. Data diperbarui secara berkala, memastikan informasi yang disajikan selalu relevan dan terkini
- Transparan dan Mudah aksesibilitas publik (terintegrasi dalam subsite resmi Balai Besar POM di Palangka Raya)
- Sebagai jembatan informasi antara BBPOM di Palangka Raya dan publik, mewujudkan prinsip Akuntabilitas sesuai dengan nilai **BerAKHLAK**



- Pelayanan Sertifikasi
- Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pemeriksaan Sarana Rutin
- Sampling dan Pengujian Rutin
- Operasi Penindakan
- Pengujian Pihak Ketiga
- Serta Ketatausahaan

BAB

1

Lakip
Tahunan
2025



Pendahuluan

- Latar Belakang
- Gambaran Umum Organisasi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran krusial dalam sistem kesehatan nasional dengan tanggung jawab utama memastikan seluruh produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, berkhasiat, dan bermutu. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan tersebut secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan mandatnya, BBPOM di Palangka Raya dihadapkan pada dinamika tantangan yang kian kompleks. Secara geografis, luas wilayah Kalimantan Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah serta aksesibilitas yang menantang menjadi hambatan utama dalam pemerataan pengawasan dan penyebaran informasi secara komprehensif. Selain itu, pesatnya transformasi digital dan sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah membuka celah bagi peredaran produk ilegal yang sulit dilacak. Hal ini menuntut organisasi untuk meningkatkan kapabilitas intelijen dan patroli siber guna memitigasi risiko kesehatan masyarakat di ruang digital. Keberadaan BBPOM di Palangka Raya menjadi sangat krusial sebagai instrumen negara untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan konsumen, serta menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dan UMKM lokal melalui pendampingan sertifikasi demi meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disusunlah Laporan Kinerja ini. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan ini menyajikan penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Palangka Raya. Melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi dari setiap indikator kinerja, laporan ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) serta memberikan rekomendasi perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

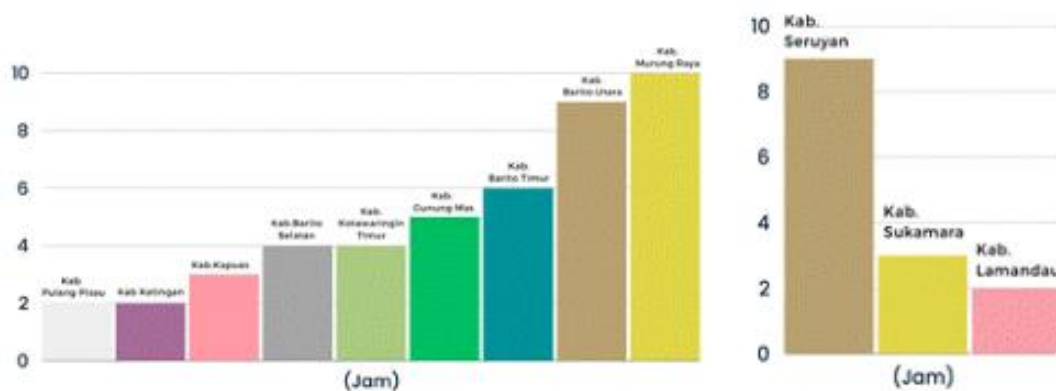
1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut jumlah UPT BPOM

terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- BBPOM di Palangka raya dengan cakupan pengawasan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cakupan pengawasan 4 kabupaten/kota, yaitu



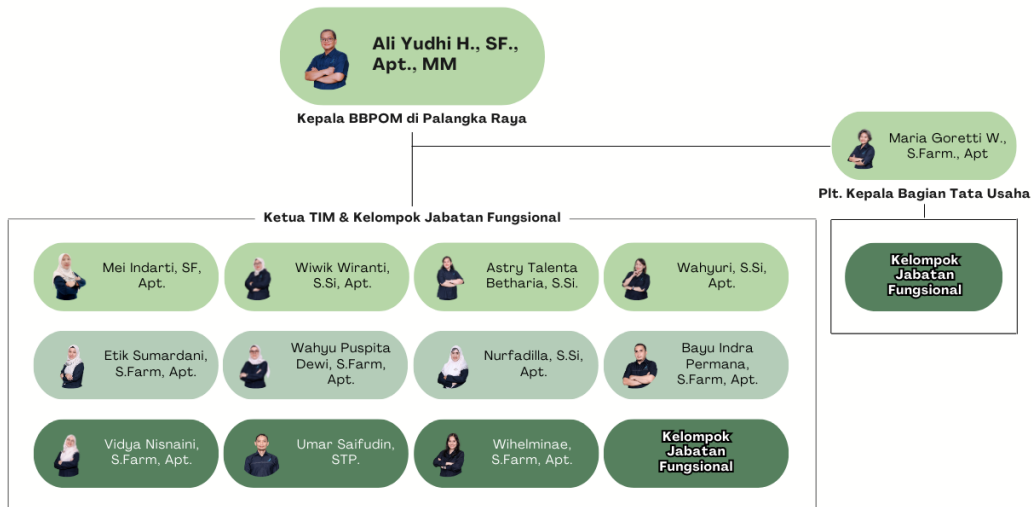
Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 11 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Palangka Raya yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

I. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah SDM belum memadai

SDM Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan September 2025 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang ASN yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang PNS dan 15 (lima belas) orang PPPK untuk memenuhi beban kerja 93 orang yang baru terpenuhi sebesar 72.04% dengan proporsi 50.75% perempuan dan 49.25% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

ABK BBPOM di Palangka Raya berdasarkan SIREN (September, 2025)					
No	Jabatan	Eksisting	ABK	GAP	Pemenuhan ABK
1	Struktural	2	2	0	100
2	Fungsional Ketatausahaan	9	31	-9	29.03
3	Fungsional PFM	43	60	-17	72.00
4	Fungsional Umum	13	0	-	-
5	Tubel (selesai Februari 2026)	1	0	-	-
		68	93	-25	73.00

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Palangka Raya memerlukan SDM sebanyak 93 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 25 orang. Perhitungan pemenuhan ABK 73.00% didapat dari pemenuhan ABK Struktural 100%, Fungsional Ketatausahaan 29.03% dan Fungsional PFM 72,00%. Selama 3 tahun ke depan, jumlah pegawai fungsi ketatausahaan akan berkurang sebanyak 5 orang. Pada tahun 2025, dari 67 orang pegawai, didukung 15 orang PPNPN (22.39%). Dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh fungsi ketatausahaan banyak dirangkap oleh personil yang ada pada fungsi-fungsi diluar jabatan fungsionalnya. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan mental pegawai akibat beban kinerja. Pada fungsi teknis pengawasan obat dan makanan, pemenuhan ABK rata-rata berkisar 48.78% sampai dengan 53.85%, terendah pada fungsi pengujian dan tertinggi pada fungsi Infokom.

Selain jumlah pegawai, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Palangka Raya adalah S1 dan Profesi (apoteker). Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang scientific based perlu lebih banyak didukung SDM dengan Pendidikan S2 yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Pemenuhan pendidikan S2 dapat dilakukan melalui tubel lepas jabatan atau ijin belajar sambil bekerja dengan pilihan perguruan tinggi yang sangat terbatas, hanya terdapat pilihan Universitas Terbuka. Secara umum capaian kompetensi mansoskul pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya 43.64% optimal, 36.36% kurang optimal dan 20.00% masih kurang optimal, capaian kompetensi teknis fungsi PFM 26.32% optimal, 21.05% cukup optimal dan 52.63% kurang optimal. Dengan jumlah dan kompetensi SDM yang terbatas diperlukan upaya besar untuk mengisi baik dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks. Dengan peningkatan SDM, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi diharapkan Balai Besar POM di Palangka Raya akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

II. Sumber Daya Anggaran

a. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dimana telah memasuki tahun kelima sejak pengalokasian perdannya di tahun 2020. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

DAK NF BPOM tahun 2024 diberikan kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pengawalannya dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun anggaran DAK ini dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.

b. DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor: SP.DIPA-063.01.2.432872/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 22.128.308.000,- sampai dengan akhir tahun 2025 terjadi beberapakali revisi anggaran sehingga total pagu anggaran yang dikelola menjadi Rp 21,587,291,000,- dan terdapat blokir anggaran senilai Rp 4,770,996,000,- dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu
1	51	4.984.129.000	0
2	52	10,699,694,000	3,513,340,000
3	53	5,903,468,000	1,385,468,000
TOTAL		21,587,291,000	4,898,808,000

Anggaran Responsif Gender (ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak

alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni Efficiency, Effectiveness dan Economy. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni Equity. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi anggapan yang kurang tepat, jika: ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan; adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan dan ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

III. Mesin/Perlengkapan

a. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk menjamin mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat melalui pengujian secara kimia maupun mikrobiologi. Respon cepat dalam menindaklanjuti ditemukannya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat seperti dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang terkait lainnya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam melakukan proses pengujian sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal).

Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas pengujian baik dari sisi infrastruktur terkait pemenuhan standar peralatan laboratorium, standar kompetensi SDM penguji serta pengembangan metode analisa melalui pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan adanya upaya tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palangka Raya telah didukung dengan instrumen laboratorium teknologi kompleks seperti, GCMS dan *real time* PCR serta secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi personil dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis pengujian baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu perencanaan kegiatan verifikasi metode analisa yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu metode analisis yang sudah divalidasi sebelumnya dapat digunakan dengan andal di laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya telah rutin di jadwalkan setiap tahunnya untuk memenuhi standar Ruang Lingkup pengujian.

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin pesatnya industri obat dan makanan, membawa perubahan yang cepat dan signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Tantangan pengujian yang semakin kompleks berkaitan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan digitalisasi perdagangan memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis terkait kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan

ketersediaan sarana dan prasarana dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengujian.

Keterbatasan dalam anggaran pengadaan alat laboratorium serta kebutuhan reagensia dan media yang diperlukan dalam proses pengujian menimbulkan gagasan konsep regionalisasi laboratorium. Regionalisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Laboratorium pengujian Badan POM. Melalui konsep regionalisasi BBPOM di Palangka Raya telah dilengkapi dengan instrumen mutakhir untuk mendukung pengujian parameter uji spesifik seperti LCMSMS dan GCMS, namun seiring dengan berubahnya konsep regionalisasi dengan penggolongan laboratorium menjadi beberapa tingkat atau tier berdampak pada pemindahan alat LCMSMS ke laboratorium balai unggulan yaitu BBPOM di Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

IV. Metode

a. Konsep Regionalisasi Laboratorium

Fungsi pengujian dalam pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu pilar utama BPOM dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan maka sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem Regionalisasi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 dengan konsep baru regionalisasi laboratorium.

Proses perubahan konsep regionalisasi dilakukan pada pertengahan pada tahun 2023 antara lain dengan pemindahan peralatan canggih yang selama ini tersebar ke Laboratorium Regional antara lain LCMSMS, DUSA, dan Isolator; peningkatan kompetensi dan jumlah analis sesuai beban kerjanya. Dengan perubahan menjadi Konsep baru Regionalisasi Laboratorium diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru, BBPOM Semarang, BBPOM Samarinda, BBPOM Manado, BBPOM Makasar, BBPOM Surabaya dan terakhir adalah BBPOM di Jayapura. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya penyempurnaan konsep regionalisasi ini maka penajaman perencanaan pengujian dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai.

V. Lingkungan

Green Laboratory atau Laboratorium Hijau merupakan sebuah konsep revolusioner dalam pengelolaan fasilitas laboratorium yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dengan praktik laboratorium modern. Konsep ini tidak sekadar tentang pengurangan dampak lingkungan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dalam implementasinya, Laboratorium Hijau mengedepankan tiga pilar utama, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya, (2) minimalisasi dampak lingkungan, dan (3) penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Laboratorium mengkonsumsi energi besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan, dengan jejak karbon lima kali lebih besar dibanding ruang kantor biasa. BPOM dalam upaya penerapan laboratorium hijau telah mengeluarkan pedoman berupa Buku Saku Pedoman Laboratorium Hijau yang disusun oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) pada tahun 2024. Pedoman ini mengatur upaya dalam melakukan pendekatan holistik, mencakup efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Selain mengurangi dampak lingkungan, konsep ini juga menghemat biaya operasional, meningkatkan kesehatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pondasi utama dalam konsep Laboratorium Hijau dimulai dari manajemen energi yang cerdas, di mana setiap aspek penggunaan energi direncanakan dan dikelola secara optimal. Sistem pencahayaan ruangan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami melalui desain arsitektur yang tepat, dan dikombinasikan dengan penggunaan lampu LED hemat energi yang dilengkapi sensor gerak. Zonasi pencahayaan diterapkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap area kerja, dengan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan okupansi yang memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan.

Pengelolaan suhu ruangan menjadi aspek kritis lainnya dalam efisiensi energi. Laboratorium Hijau mengimplementasikan sistem HVAC dengan teknologi inverter yang dapat menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Pengaturan suhu dilakukan secara optimal untuk berbagai area laboratorium, didukung oleh sistem insulasi yang efektif dan pemantauan suhu otomatis. Peralatan laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan sertifikasi hemat energi, dan penggunaannya dijadwalkan untuk menghindari beban puncak. Program pemeliharaan preventif dilaksanakan secara rutin untuk menjaga efisiensi operasional peralatan.

Konservasi air menjadi fokus penting berikutnya dalam konsep Laboratorium Hijau. Implementasinya mencakup instalasi sistem daur ulang air, teknologi pengolahan air limbah yang efektif, dan sistem pemanenan air hujan. Praktik hemat air diterapkan dalam setiap aktivitas laboratorium, mulai dari prosedur pembersihan peralatan yang efisien hingga penggunaan air destilasi secara bijak. Program deteksi dan perbaikan kebocoran dilakukan secara rutin, didukung dengan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air.



Pengelolaan material dalam Laboratorium Hijau dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sistem tracking digital untuk bahan kimia memungkinkan optimalisasi pemesanan dan penyimpanan, menghindari pemborosan akibat kadaluarsa atau kerusakan. Pemilihan bahan kimia ramah lingkungan menjadi prioritas, dengan prosedur penanganan material yang efisien untuk meminimalkan risiko pencemaran. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara konsisten, didukung dengan sistem pemisahan dan pengolahan limbah yang terpadu.

Minimalisasi dampak lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah pentingnya. Pengendalian polusi dilakukan melalui sistem ventilasi dengan filter efisiensi tinggi dan pemantauan kualitas udara secara berkala. Penggunaan bahan kimia dengan *Volatile Organic Compound* (VOC) rendah dan sistem penangkapan gas buang yang efektif memastikan kualitas udara tetap terjaga.

Pengurangan dampak lingkungan menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional laboratorium. Ini meliputi penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah yang tepat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penerapan sistem manajemen limbah yang efektif. Laboratorium juga menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan material dan menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses pengujian.

Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan mandiri dengan pemisahan saluran berdasarkan karakteristik limbah. Program monitoring kualitas effluent dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Perlindungan ekosistem menjadi aspek integral dalam Laboratorium Hijau. Program penanaman vegetasi di area laboratorium tidak hanya berkontribusi pada estetika, tetapi juga mendukung biodiversitas lokal. Pemilihan tanaman adaptif dan penciptaan habitat mikro menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Optimalisasi penggunaan lahan dan pencegahan erosi dilakukan melalui manajemen air limpasan yang efektif dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian khusus melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dan monitoring jejak karbon dilakukan secara sistematis, didukung dengan program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Optimalisasi transportasi dan logistik turut berkontribusi pada pengurangan emisi. Adaptasi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui desain bangunan yang tangguh, sistem drainase berkelanjutan, dan program tanggap darurat yang komprehensif.

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas. Kualitas udara dalam ruangan dijaga melalui sistem ventilasi yang adequate dengan pemantauan parameter *Indoor Air Quality* (IAQ) secara



rutin. Aspek ergonomi diperhatikan melalui desain stasiun kerja yang nyaman dan pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sistem keselamatan kerja diterapkan secara komprehensif, meliputi deteksi bahaya, peralatan pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat.

Produktivitas dan kenyamanan kerja ditingkatkan melalui desain ruang yang mendukung alur kerja efisien. Optimalisasi pencahayaan alami dan zonasi berdasarkan fungsi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kenyamanan termal dijaga melalui sistem pengkondisian udara yang optimal dan pemantauan kondisi ruangan secara berkala. Aksesibilitas menjadi perhatian penting, dengan sirkulasi yang efisien dan fasilitas yang ramah difabel. Keberlanjutan operasional didukung oleh sistem manajemen yang kuat, meliputi kebijakan laboratorium hijau, prosedur operasional standar, dan program audit internal.

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan. Inovasi dan perbaikan terus didorong melalui program riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru yang relevan. Integrasi dengan sistem yang lebih luas menjadi aspek penting dalam konsep Laboratorium Hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Dampak sosial diperhatikan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Aspek ekonomi dikelola melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menciptakan nilai tambah bagi institusi. Implementasi konsep Laboratorium Hijau dilakukan secara terencana dan terukur. Tahap perencanaan meliputi penetapan target dan indikator, penyusunan roadmap, dan alokasi sumber daya yang tepat. Pelaksanaan program diawali dengan pilot project, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator kuantitatif seperti konsumsi energi dan air, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan kualitas lingkungan kerja.

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif. Laboratorium mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengurangan limbah, serta edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bagi seluruh personel. Program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya mengutamakan pembudayaan perilaku konservasi energi melalui penerapan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan *Green Life Promotion*. Penerapan ini diwujudkan melalui inovasi antara lain:

1. Inovasi CEKLIS yaitu inovasi yang dilatarbelakangi peningkatan tagihan pembayaran listrik sehingga dilakukan pemeliharaan jaringan listrik dan

pengelolaan penggunaan listrik dengan pengecekan alat listrik maupun penerangan dan pendingin ruangan yang tidak digunakan.

2. Inovasi SINERGI (Senandung Hemat Energi dan e-Presensi) yaitu inovasi penghematan energi listrik dan air dengan menggunakan media audio berupa lagu, pantun dan narasi yang diperdengarkan sesaat sebelum jam kerja berakhir untuk mengingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan alat listrik dan air.
3. Inovasi Bank Sampah yaitu inovasi pengumpulan sampah plastik berupa botol minum, plastik kemasan atau plastik bekas pada wadah yang telah disediakan.
4. Inovasi BE SMMILE UP yaitu inovasi digitalisasi laboratorium yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya kertas, tinta dan alat tulis kantor (ATK) melalui pembuatan dokumen secara online yang berdampak pada penghematan anggaran pembelian ATK.

Penerapan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*), diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut:

1. Reduce yaitu penghematan energi listrik dan air melalui
 - Penggunaan lampu hemat energi pada area laboratorium
 - Penggunaan alat elektronik hemat energi dengan penandaan stiker hemat energi seperti pada alat pendingin ruangan /air conditioner (AC) dan kulkas
2. Reuse yaitu pemanfaatan kembali material antara lain
 - Pemanfaatan air yang berasal dari pendingin ruangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan kebersihan maupun perawatan tanaman
 - Pemanfaatan botol bekas reagen sebagai wadah penampungan limbah
 - Regenerasi kolom untuk memperbaiki kondisi kolom yang digunakan untuk pengujian menggunakan HPLC
3. Recycle
 - Pembuatan bak sampah yang berasal dari bekas map yang tidak terpakai diolah menjadi bak sampah
 - Pembuatan kantong silica gel dari jas laboratorium yang tidak terpakai

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Perilaku hemat energi telah menjadi budaya yang melekat dalam diri seluruh pegawai BBPOM di Palangka



Raya dan dapat terus diterapkan tidak hanya di lingkungan kerja namun juga di lingkungan sehari-hari.

BAB

2

Lakip
Tahunan
2025



Perencanaan Kinerja

- Uraian Singkat Renstra
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Metode Pengukuran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengembangkan fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik,

dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, BBPOM di Palangka Raya menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Renstra 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari periode Renstra tahun 2020-2024, yang telah menjadi landasan bagi BBPOM di Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih dari itu, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen untuk

menyelaraskan perencanaan strategis ini dengan delapan misi utama (Asta Cita) yang dicanangkan oleh Presiden pada sektor kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. RKT tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26 %
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.02
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.18
		Nilai AKIP UPT BPOM	85.77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.30
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.4

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025- 2029 serta alokasi anggaran sesuai DIPA BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 22.128.308.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta

Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 10.102.234.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Sesuai Nota Dinas NOMOR : PR.07.2.08.25.451 dari Sekretaris Utama Badan POM perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tanggal 14 Agustus 2025, sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Pada tanggal 29 Agustus 2025 revisi PK BBPOM Palangka Raya telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 9.561.217.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75 Persentase

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 desa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.1 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Dalam revisi ini terdapat penambahan 3 Indikator baru yaitu:

- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Perubahan target untuk 8 Indikator kinerja yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 87,25 menjadi 89,75.
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 85 menjadi 90.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Revisi target semula Akumulatif menjadi Flat di 84 sesuai perubahan manual indikator kinerjanya.
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 87 menjadi 92.
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Revisi target semula 73,88 menjadi 96.88.
- f) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 80 menjadi 85.
 - g) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
Revisi target semula 88 menjadi 92.4.
 - h) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
Revisi target tahunan semula 82,8 menjadi 14,1 akibat perubahan manual indikator kinerjanya.

Serta pengurangan 1 sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang indikatornya digabung ke sasaran kegiatan Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan Evaluasi Internal untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Berikut RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025.

Pada tanggal 22 Mei 2025 dengan nomor surat B-PR.07.01.16A.05.25.368 perihal Usulan Revisi RAPK BBPOM di Palangka Raya mengusulkan revisi target RAPK untuk dua Indikator Kinerja yaitu, Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Dan telah disetujui ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dengan surat no B-PR.07.21.06.25.179 tanggal 04 Juni 2025 sehingga per 12 Juni 2025 RAPK BBPOM di Palangka Raya menjadi sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145.537.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,8	9.001.834.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,9	83.990.550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.867.427.650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134.981.300
Total															22.128.308.000

Akibat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) maka Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Palangka Raya pun mengalami revisi menjadi sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	718,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	216,978,900

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,837,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	216,978,900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	84	84	84	84	84	6,117,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	92	92	92	92	92	7,285,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7,285,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	137,499,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	179,829,000

[illegible]

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	5,960,126,550
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	562,111,700
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,530,350
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	604,448,400
Total															21,587,291,000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai manual indikator kinerja, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
 - 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
 - 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% \leq x < 100\%$.	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $x < 70\%$.	

Untuk mengukur capaian periodik dari Kinerja Organisasi dilakukan dengan menjumlahkan Indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi dan dibagi dengan Indikator kinerja yang terdapat target pada periode tersebut. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Lalu untuk akhir tahun menggunakan cara perhitungan NKO tahunan yang merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))							
	Predikat NKO (6)							

Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut:

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran kinerja pada Balai Besar POM di Palangka Raya dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

BBPOM di Palangka Raya mengatur penanggung jawab pengumpulan data dalam rangka mendukung pengukuran dan pelaporan data yang akuntabel dalam Surat Keputusan Pembentukan TIM Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Susunan Tim SAKIP terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua I (perencanaan dan pengukuran), Ketua II (evaluasi internal), Ketua III (Laporan Kinerja), Ketua IV (Laporan Tahunan), Sekretaris, Anggota I (perencana target dan penyusun analisis capaian kinerja), Anggota II (mereview analisis capaian kinerja), Anggota III (operator RHPK), dan Anggota IV (sekretariat tim laporan).
2. Tugas Pengarah (Kepala Balai): memberikan arahan pelaksanaan SAKIP dan memimpin rapat SAKIP.
3. Tugas Penanggung Jawab: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
4. Tugas Ketua I (perencanaan dan pengukuran): mengkoordinir penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja sesuai pedoman, memastikan perencanaan kinerja menantang, dapat dicapai, dan realistis, mensosialisasikan manual IKU, memastikan data kinerja tertelusur dan andal, serta memastikan anggota tim mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP.
5. Tugas Ketua II (evaluasi internal): mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal program dan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjut sesuai pedoman, dan memastikan laporan evaluasi internal disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
6. Tugas Ketua III (Laporan Kinerja): mengkoordinir penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman dan memastikan pengiriman laporan kinerja interim dan tahunan tepat waktu.
7. Tugas Ketua IV (Laporan Tahunan): mengkoordinir penyusunan laporan tahunan sesuai pedoman dan memastikan pengirimannya tepat waktu.
8. Tugas Sekretaris: bertanggung jawab atas data kinerja, membuat format database, verifikasi dan mengolah data kinerja, menginput data kinerja dan analisis kendala pada aplikasi monev BPOM, serta menyediakan data kinerja untuk penyusunan laporan.
9. Tugas Anggota I (perencana target dan penyusun analisa capaian kinerja): verifikasi data output dan kinerja sebelum input RHPK, review capaian output dan indikator kinerja, menyusun rencana target indikator kinerja tahunan dan turunannya, melakukan evaluasi dan menyusun analisis (pelaksanaan kegiatan dan anggaran, capaian output dan indikator kinerja, identifikasi kendala, rekomendasi rencana aksi tindak lanjut) untuk berbagai laporan, serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut.
10. Tugas Anggota II (mereview analisis capaian kinerja): mereview dan menganalisis Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, dan input data Simetris, serta mereview analisis Anggota I dalam Laporan Kinerja per Bab.

11. Tugas Anggota III (operator RHPK): mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari pelaksana kegiatan, melakukan input data pada RHPK, serta mengumpulkan dan mengkompilasi analisis untuk Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
12. Tugas Anggota IV (sekretariat tim laporan): mengumpulkan dan mengkompilasi analisis capaian kinerja yang telah diverifikasi dan direviu, memastikan kesesuaian data kinerja dan kriteria, menyunting, mengolah, dan menyusun laporan kinerja interim dan tahunan, membuat desain tampilan laporan yang mudah dimengerti dan menarik, mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite BBPOM Palangka Raya tepat waktu, dan mengirimkan laporan kinerja ke esr.menpan.go.id, subsite BBPOM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan tepat waktu.
13. Data kinerja output dan indikator digunakan untuk mengisi data monev stakeholder dan membuat laporan: RHPK BPOM, Monev Capaian Output SAKTI Kemenkeu, RAPK, E-performance SIMETRIS BPOM, BAPPENAS, evaluasi internal bulanan dan triwulanan, laporan kinerja interim dan UPT BPOM (triwulan), dan laporan kinerja tahunan.
14. Pengisian data kinerja, pembuatan evaluasi capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jenis laporan.
15. Tim SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya.

BAB

3

Lakip
Tahunan

2025



Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Pemanfaatan Informasi Kinerja
- Realisasi anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya di tahun 2025 memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan indikator yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra), Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis, Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta menganalisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (Predikat AKIP A)	Nilai Akhir Capaian PK
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h	i
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	110,00	0,00	110,00
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	104,15	0,00	104,15
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	103,56	0,00	103,56
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	0,00	100,00
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,86	109,25	109,25	0,00	109,25
		6 Persentase keputusan/rekomendasi	84	84,91	101,08	101,08	0,00	101,08

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (Predikat AKIP A)	Nilai Akhir Capaian PK
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h	i
		hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	108,70	0,00	108,70
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,96	108,70	108,70	0,00	108,70
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	100,82	0,00	100,82
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,95	104,65	104,65	0,00	104,65
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	98,99	107,13	107,13	0,00	107,13
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,6	102,82	102,82	0,00	102,82
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,16	102,16	102,16	0,00	102,16
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76,6	105,66	105,66	0,00	105,66
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan	16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	100	100	100,00	100,00	0,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (Predikat AKIP A)	Nilai Akhir Capaian PK
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h	i
	Sarana produksi pangan fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	92,88	106,53	106,53	0,00	106,53
		18 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100,00	100,00	0,00	100,00
		19 Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00	100,00	0,00	100,00
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,1	15,38	109,08	109,08	0,00	109,08
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17	104,17	0,00	104,17
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	110,00	0,00	110,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,96	105,53	105,53	0,00	105,53
8	Terwujudnya tatakelola	25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	88,19	100,41	100,41	0,00	100,41

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (Predikat AKIP A)	Nilai Akhir Capaian PK
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	80,81	96,35	96,35	0,00	96,35
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	100,00	0,00	100,00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67	97,67	0,00	97,67
Total Capaian PK									2.898,40
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)									103,51
Predikat NKO									Istimewa

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO dengan nilai **103,51%** dari hasil rata-rata 28 Indikator kinerja yang telah dinormalisasi capaiannya dengan predikat **Istimewa**. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan

*Meningkatnya Efektivitas Pengawasan
Produk Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di Wilayah Kerja UPT*

Sasaran Kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	104,15	Sangat Baik
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	103,56	Sangat Baik
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100,00	Baik
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,86	109,25	109,25	Sangat Baik
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84,91	101,08	101,08	Sangat Baik
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	108,70	Sangat Baik
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,96	108,70	108,70	Sangat Baik
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	100,82	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,95	104,65	104,65	Sangat Baik
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	98,99	107,13	107,13	Sangat Baik
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,57	102,82	102,82	Sangat Baik
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,16	102,16	102,16	Sangat Baik
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76,6	105,66	105,66	Sangat Baik
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	100,00	Baik
Capain Sasaran Kegiatan			104,59	104,58	Sangat Baik

1

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dalam menentukan capaian terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Berikut adalah perhitungan sehingga diperoleh persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$\text{Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{A + B + C + D}{4}$$

Unsur-unsur perhitungan :

- A = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- D = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Komponen perhitungan “Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” untuk masing-masing komoditi berbeda, yaitu sebagai berikut:

- A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$
 - a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
 - b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
 - c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
 - d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 - e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $\{(a+b+c+d+e)/5\}$
 - a. Pemenuhan target pengawasan
 - b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - c. Kesesuaian parameter uji
 - d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $\{(a+b+c+d+e)/5\}$
 - a. Pemenuhan target pengawasan
 - b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - c. Kesesuaian parameter uji
 - d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $\{(a+b+c+d+e)/5\}$
 - a. Pemenuhan target pengawasan
 - b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling sampai dengan Triwulan IV telah sesuai dengan target 100%, dengan jumlah total sampel sediaan farmasi sebanyak 988 sampel dengan rincian sebagai berikut :

Sampel Obat	= 270
Sampel Produk Tembakau	= 4
Sampel Obat Bahan Alam	= 228
Sampel Suplemen Kesehatan	= 62
Sampel Kosmetik	= 424

Selain dari sampel yang di sampling, terdapat persentase jumlah sampel yang diuji dalam perhitungan realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada kegiatan pengujian, sampel yang diuji adalah sampel yang berasal dari BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk seluruh komoditi sediaan farmasi. Dan khusus untuk komoditi OBAT juga menerima sampel regional dari seluruh BBPOM/BPOM/Loka POM anggota regional Samarinda yang terdiri dari BBPOM di Samarinda, BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, BPOM di Tarakan, BPOM di Balikpapan, BPOM di Tabalong, BPOM di Sanggau, Loka POM di Kabupaten Sambas, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu . Dengan jumlah total sampel sediaan farmasi yang diuji sebanyak 1.180 sampel dengan rincian sebagai berikut :

Sampe Obat	= 273
Sampel Obat Bahan Alam	= 291
Sampel Suplemen Kesehatan	= 77
Sampel Kosmetik	= 539

Dari jumlah total sampel sebanyak 1.180 sampel tersebut, diperoleh capaian rata-rata jumlah sampel yang diuji sesuai ketentuan (pedoman sampling) sebesar

96,96%. Angka tersebut diperoleh berdasarkan jumlah sampel yang sesuai dalam hal ketepatan waktu pengujian dan pelaporan, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan, dan kesesuaian parameter uji dibandingkan terhadap seluruh sampel yang diuji.

Realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga dipengaruhi oleh :

- Persentase kesesuaian pelaporan monitoring penarikan untuk komoditi obat sebesar 100%
- Persentase jumlah tanggapan terhadap surat yang tindak lanjut untuk komodi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik masing-masing sebesar 94,12%, 100% dan 98,15%.

Perhitungan persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berbeda-beda untuk masing-masing komoditi menyesuaikan terhadap manual indikator, kemudian dihitung rata-ratanya sehingga diperoleh capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,88%. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89,75% diperoleh realisasi sebesar 110,17% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	100	114,61
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87,25	90,38	103,59
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	89,75	98,09	109,29
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	89,75	98,88	110,17

Capaian realisasi pada Triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 0,88% dari realisasi pada Triwulan III. Realisasi indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 4,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan II realisasi di Triwulan IV lebih tinggi sebesar 6,58%. Demikian juga halnya saat dibandingkan dengan realisasi Triwulan III, realisasi Triwulan IV lebih tinggi.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada Tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (baseline) yang sangat penting untuk pengawasan Sediaan Farmasi berisiko di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	98,88	105,19	 Tercapai/ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra) menunjukkan capaian sebesar 105,19%, dengan kriteria tercapai/melampaui. Hal ini kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga dapat memberikan kajian dan masukan dalam penetapan target serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul. Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	90	98,89	109,88
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	85,75	88,37	103,06

Dalam hal perbandingan kinerja antar unit kerja yang sejenis, Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan balai dengan realisasi kedua tertinggi dibawah Balai Besar POM di Jayapura dan di atas Balai Besar POM di Gorontalo. Namun untuk capaian, Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan yang tertinggi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target meskipun realisasinya relatif sama dibandingkan dengan Balai Besar POM di Jayapura.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kerusakan alat laboratorium	Melakukan perawatan rutin terhadap alat laboratorium	Melakukan kalibrasi dan verifikasi alat yang sesuai dengan jadwal	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S03.01.01	Kerusakan alat/instrumen di Laboratorium
	Terbatasnya jenis dan jumlah sediaan kosmetik di sarana terutama kategori kontrak produksi dan kuasa merek	Melakukan komunikasi dengan unit pengampu untuk retargeting renlak sampling kosmetik	Melaksanakan sampling sesuai revisi renlak yang disetujui unit pengampu	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S01-03.01	Pelaksanaan sampling tidak sesuai dengan perencanaan
	Target sampling tidak tercapai						

Keberhasilan dalam realisasi kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

- Adanya peningkatan target dari 87,25% menjadi 89,75% di triwulan III. Peningkatan target ini didasarkan pada hasil evaluasi capaian realisasi pada triwulan I dan II, dimana jika tidak dilakukan peningkatan target maka capaian tidak akan bisa disimpulkan.
- Melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait penetapan jumlah sampel minimal yang bisa di sampling sesuai dengan kategori sampling pada pedoman sampling.

- Melakukan pengaturan tugas di tim sampling sehingga tidak terjadi overload pekerjaan dalam pelaksanaan sampling.
- Melakukan komunikasi dengan unit pengampu terkait permasalahan sampling untuk mendapatkan solusinya.
- Segera melakukan komunikasi ke tim Pusdatin jika terdapat kendala SIPT.
- Melakukan peningkatan kompetensi petugas sampling melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja untuk memahami petunjuk teknis yang ada pada Pedoman Sampling terbaru supaya tidak salah kategori.
- Telah disusun perencanaan target jumlah dan kategori sampling setiap bulannya.
- Tidak ada keterlambatan dalam pengiriman sampel sehingga sampel yang sudah disampling bisa segera dilakukan pengujian.
- Telah dilakukan verifikasi metode terhadap metode analisa pengujian yang baru.
- Terhadap risiko utama di fungsi pengujian yaitu kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil uji, telah dilakukan pengendalian yang efektif melalui penerapan verifikasi berjenjang;

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Menyusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian di awal tahun dan dievaluasi setiap bulannya.
- Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan yang telah disusun.
- Melaksanakan pengujian dan melaporkannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman sampling.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	718.855.000	717.998.488	99,88

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar Rp. 171.998.488,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 718.855.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,88%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	988	100,31	718.855.000	717.998.488	99,88

Rincian output yang mendukung pencapaian target IKU, realisasi sebanyak 988 sampel dari target 985 sampel dengan capaian sebesar 100,31% adalah sebagai berikut :

Sampel Obat	= 270
Sampel Produk Tembakau	= 4
Sampel Obat Bahan Alam	= 228
Sampel Suplemen Kesehatan	= 62
Sampel Kosmetik	= 424

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Sampling Obat	20.764.000	20.763.673	100,00
2	Pengadaan Sampel Obat	204.363.000	204.353.866	100,00
3	Rapat Koordinasi Pusat Dan Balai Dalam Manajemen Sampling Obat Dan Makanan	13.545.000	13.542.026	99,98
4	Pelatihan Sampling Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	2.121.000	1.500.000	70,72
5	Pengadaan Reagensia Kimia Pengujian Sampel Obat Obat Tradisional Kosmetika Dan Suplemen Kesehatan (Sediaan Farmasi)	315.885.000	315.695.509	99,94
6	Pengadaan Media Mikrobiologi Pengujian Sampel Obat Obat Tradisional Kosmetika Dan Suplemen Kesehatan	159.750.000	159.716.414	99,98
7	Pengiriman Sampel Obat Ke Laboratorium Regional	2.427.000	2.427.000	100,00

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Penyusunan rencana dan evaluasi sampling obat. Penetapan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian melibatkan seluruh pihak yang terkait. Rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dibuat dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online oleh seluruh pihak terkait yang diberikan akses, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
- Pengadaan sampel obat, pelaksanaan sampling dilakukan pada saat melakukan inspeksi ke sarana. Capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
- Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam manajemen sampling obat dan makanan. Capaian realisasi anggaran sebesar 99,98%.
- Pelatihan sampling obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 70,72%.
- Pengadaan reagensia kimia pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Capaian realisasi anggaran sebesar 99,94%.
- Pengadaan media mikrobiologi pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Capaian realisasi anggaran sebesar 99,98%.
- Pengiriman sampel obat ke laboratorium regional, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

Selain program/kegiatan tersebut diatas, terdapat juga beberapa program/kegiatan yang juga memberikan pengaruh dalam pencapaian pernyataan kinerja. Sebagai berikut :

- Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan. RHPK tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.

2

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Dalam pengawasan keamanan obat beredar, salah satu program yang dilaksanakan BPOM adalah farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak key player penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan

masyarakat sebagai pengguna akhir. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam program farmakovigilans, BPOM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 26% yang diukur pada akhir tahun 2025.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT BPOM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing catchment area UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Indikator ini diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM} = (A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A** :Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B** :Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	104,15	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir Tahun 2025 dengan target sebesar 26 % dan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025 adalah sebesar 27,08%. capaian terhadap target Tahun 2025 diperoleh sebesar 104,15% dengan kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	n/a	n/a	n/a
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	n/a	n/a	n/a
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	n/a	n/a	n/a
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	26	27,08	104,15

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian terhadap realisasi kinerja triwulan sebelumnya belum dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	27,08	90,27	 Akan Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja hingga Tahun 2025, indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO menunjukkan progres yang positif dan berada di jalur yang tepat (*on track*) menuju target akhir periode perencanaan. Dari target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 30, pada Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai realisasi sebesar 27,08. Secara kuantitatif, capaian kinerja terhadap target jangka menengah telah menyentuh angka 90,27% dengan kategori capaian **Akan Tercapai**.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	26	11,11	42,73
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	26	26,67	102,58

Berdasarkan hasil evaluasi pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, dilakukan perbandingan performa antara tiga Balai Besar POM dengan target tahunan yang sama sebesar 26. Balai Besar POM di Palangka Raya menunjukkan performa tertinggi dengan realisasi sebesar 27,08, yang menghasilkan capaian sebesar 104,15% terhadap target tahunan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan efektivitas sistem pelaporan di wilayah pengawasannya. Balai Besar POM di Gorontalo berada di posisi kedua dengan realisasi 26,67 atau capaian sebesar 102,58%. Capaian ini juga masuk dalam kategori melampaui target tahunan. Di sisi lain Balai Besar POM di Jayapura mencatatkan realisasi yang cukup rendah dibandingkan unit sejenis lainnya, yaitu sebesar 11,11 dengan persentase capaian hanya 42,73%. Capaian indikator ini penting diperhatikan karena menjadi modal penting bagi unit kerja BPOM untuk mencapai target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 30.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa

monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM di daerah. Salah satu dukungan kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM adalah berupa Bimbingan Teknis/KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Pada Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 48 sarana (target 45 sarana) dari 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans, dan pada tahun 2025 terdapat 13 (tiga belas) fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan KTD/ESO melalui pelaporan online : <https://e-meso.pom.go.id/ADR>.

Keberhasilan capaian melampaui target untuk indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang selaras dengan strategi BPOM:

1. Optimalisasi Peran UPT BPOM di daerah: Dekonsentrasi tugas kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai *focal point* farmakovigilans terbukti efektif. Dengan keterlibatan BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu UPT BPOM, jangkauan edukasi menjadi lebih luas dan berpotensi menyentuh fasyankes di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh Pusat Farmakovigilans Nasional.
2. Efektivitas Kegiatan Bimtek dan KIE: Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara konsisten meningkatkan kompetensi tenaga medis. Tenaga kesehatan kini lebih memahami bahwa pelaporan KTD/ESO bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari keselamatan pasien (*patient safety*).
3. Peningkatan Kesadaran (*Awareness*) Tenaga Kesehatan: Adanya strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif tenaga kesehatan memicu deteksi dini yang lebih baik di lapangan, sehingga jumlah laporan yang masuk

meningkat melebihi estimasi awal tahun. Strategi pengawalan pelaporan, monitoring dan evaluasi sepanjang tahun juga merupakan kunci dalam meningkatkan jumlah pelaporan, antara lain dengan membuat surat himbauan untuk pelaporan KTD/ESO, apresiasi atas pelaporan oleh fasyankes yang sudah melaporkan secara rutin, melakukan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes dan melakukan pendampingan/desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Berikut adalah rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan:

1. Penguatan Jejaring Farmakovigilans Daerah melalui peran aktif *focal point* daerah yang telah dibentuk dan menjadikan fasyankes yang aktif melaporkan sebagai “*role model*” dalam menunjukan kinerja pelaporan KTD/ESO yang optimal.
2. Sistem Reward dan Apresiasi, dengan memberikan apresiasi atau sertifikat penghargaan bagi fasyankes yang paling aktif dan konsisten dalam melaporkan KTD/ESO secara berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi internal fasyankes.
3. Monitoring Kualitas Laporan, ke depan fokus tidak hanya pada kuantitas (jumlah fasyankes yang melapor), tetapi juga kualitas laporan (kelengkapan data laporan) agar dapat dilakukan analisis kausalitas yang lebih akurat oleh Pusat Farmakovigilans Nasional.

Indikator	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rendahnya pelaporan KTD/ESO pasca menerima KIE Farmakovigilans	Penguatan Jejaring Farmakovigilans Daerah melalui peran aktif <i>focal point</i> daerah yang telah dibentuk dan menjadikan fasyankes yang aktif melaporkan sebagai " <i>role model</i> " dalam menunjukan kinerja pelaporan KTD/ESO yang optimal.	Melibatkan fasyankes/focal point yang aktif melaporkan sebagai narasumber dalam kegiatan refreshment KIE farmakovigilans sebagai "local champion" yang membantu mengedukasi rekan sejawat di wilayahnya	TW 4 Tahun 2026	Y	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO
		Sistem Reward dan Apresiasi, dengan memberikan apresiasi atau sertifikat penghargaan bagi fasyankes yang paling aktif dan konsisten dalam melaporkan KTD/ESO secara berkualitas.	Pemberian apresiasi berupa pemberian sertifikat dan surat apresiasi kepada fasyankes yang aktif melaporkan, dan memberikan gimmick yang menarik bagi tenaga kesehatan yang aktif melaporkan.	TW 4 Tahun 2026	Y	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO

Indikator	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Monitoring Kualitas Laporan	Melaksanakan desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes yang telah mendapatkan KIE farmakovigilans	TW 4 Tahun 2026	Y	S01-02.01	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	4.300.000	4.294.280	99,87

Berdasarkan tabel di atas, Capaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yang melampaui target didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif. Dari total Alokasi Anggaran Rp.4.300.000 telah terealisasi sebesar Rp.4.294.280, dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99,87%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	48	106,67	4.300.000	4.294.280	99,87

Dari total Alokasi Anggaran Rp.4.300.000, telah terealisasi sebesar Rp.4.294.280, dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99,87%. Realisasi anggaran yang tinggi ini menunjukkan diperoleh dari Rincian Output Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	KIE Farmakovigilans Kepada Petugas Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis Di Sarana Pelayanan Kesehatan	4.300.000	4.294.280	99,87

Berdasarkan data anggaran dan output tersebut di atas, beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah:

- Optimalisasi Penyerapan Anggaran dimana tingkat penyerapan yang mencapai 99,87% menunjukkan perencanaan keuangan yang sangat akurat dan eksekusi kegiatan yang tepat waktu tanpa adanya sisa anggaran yang signifikan (*idle budget*).
- Efisiensi Pelaksanaan KIE, dengan anggaran yang sama BBPOM di Palangka Raya berhasil memberikan KIE kepada 48 sarana pelayanan kesehatan, melampaui target awal yaitu 45 sarana. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi biaya per satuan (*cost per unit*) dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sinergi Output dan Outcome menunjukkan keberhasilan melampaui target KIE (106,67%) secara langsung mendorong peningkatan jumlah pelaporan KTD/ESO (104,15%). Hal ini membuktikan bahwa kegiatan KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan merupakan instrumen yang paling efektif untuk memicu keaktifan pelaporan.
- Fokus pada Sub-Komponen Utama dimana alokasi anggaran yang terkonsentrasi penuh pada "KIE Farmakovigilans kepada Petugas/Tenaga Medis" memastikan bahwa sumber daya tidak terpecah dan fokus pada akar masalah, yaitu kompetensi pelapor.

Selain Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi tagging anggarannya, capaian indikator ini juga didukung oleh kolaborasi kegiatan dan anggaran yang sinergis dari anggaran RO lain. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mencapai indikator kinerja yang optimal di tengah efisiensi dan blokir anggaran Tahun 2025. Dukungan anggaran dari RO lain yang mendukung capaian indikator ini diperoleh dari pembiayaan kegiatan pada refreshment pelaporan e-MESO dan Desk Pelaporan KTD/ESO kepada Fasyankes di Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan pelaporan KTD/ESO sesuai target yang ditetapkan.

Indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah salah satu indikator yang mengukur sejauh mana pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya berdasarkan kajian analisis risiko. Ruang lingkup pangan olahan dalam indikator ini ialah pangan olahan yang terdaftar dengan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM MD dan BPOM ML maupun pangan lainnya terkait kasus, pendampingan UMKM, emerging issues, termasuk pangan fortifikasi baik yang disampling di sarana produksi maupun di sarana peredaran. Dengan kata lain, ruang lingkup pangan olahan disini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pengertian pangan olahan itu sendiri adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai metode, seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, fermentasi, penambahan bahan pengawet atau perasa, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan daya simpan, mengubah rasa dan tekstur, atau menciptakan produk baru yang lebih praktis dan beragam. Adapun pengertian sampel pangan olahan berisiko adalah sampel pangan yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Selanjutnya, pengertian “ditindaklanjuti sesuai ketentuan” adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Dengan demikian, pengertian “diperiksa dan diuji” sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi antara pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Capaian atau realisasi dari indikator kinerja “ Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A	=	Kesesuaian target sampel Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling}} \times 100\%$
B	=	Kesesuaian parameter uji Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$
C	=	Ketepatan pengambilan keputusan Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$
D	=	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$
E	=	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian, Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$
F	=	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya, Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	103,56	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 (93,2%) dibandingkan dengan target Tahun 2025 (90%) menjadikan capaian sebesar 103,56% atau termasuk pada kriteria capaian **Sangat Baik**. Realisasi kinerja Tahun 2025 diperoleh dari unsur persentase kesesuaian target sampel (82,64%), kesesuaian parameter uji (100%), ketepatan pengambilan kesimpulan (100%), ketepatan waktu pengambilan sampel (91,38%), ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (80,45%) serta ketepatan tindak lanjut sesuai pedoman (97,44%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (>80%) sampel telah di sampling, diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan dan Kemasan

Pangan maupun Rencana Pelaksanaan (Renlak) Tahun 2025. Ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT sebagian besar (80,64%) telah dilakukan tepat waktu (*real time*). Tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) juga telah dilakukan dengan mengirimkan laporan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melalui SIPT maupun dengan bersurat kepada UPT setempat dimana produsen tersebut berasal agar dapat ditindaklanjuti kembali dengan melakukan pemeriksaan sarana terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,69	116,11
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	85	98,24	115,58
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	90,00	93,94	104,38
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	90	93,2	103,56

Realisasi pada Triwulan IV (93,2%) terjadi sedikit penurunan daripada realisasi pada Triwulan III (93,94%) namun masih pada kategori capaian yang sama yaitu **Sangat Baik** (100-110%). Pada Triwulan III tepatnya pada bulan Agustus 2025 telah ditetapkan Revisi PK-RAPK BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 dimana dalam revisi RAPK tersebut terdapat perubahan target pada indikator ini yaitu dari 85% menjadi 90%. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai capaian agar dapat lebih realistis mengingat tren capaian pada Triwulan I maupun Triwulan II masuk pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%).

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada Tahun 2025

ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (baseline) yang sangat penting untuk pengawasan Pangan Olahan berisiko di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	93,2	99,15	 Akan Tercapai

Dengan target sebesar 94% pada target jangka menengah dan realisasi kinerja pada Triwulan IV sebesar 93.2% menjadikan capaian sebesar 99.15% atau masuk pada kriteria capaian **Akan Tercapai**. Dengan demikian pada Tahun berikutnya dapat dievaluasi kembali pelaksanaan pengawasan sarana dan pelaporannya agar capaian pada Tahun 2026 dapat ditingkatkan kembali sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan Tahun 2026.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	Capaian
	90	93,2	103,56
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	91	99,79	109,66
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	87	95,4	109,66

Tabel diatas menyajikan data realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Jayapura sebesar 99,79% dan realisasi terendah diperoleh Balai Besar POM di Palangka Raya sebesar 93,2%. Hal ini menjadi pemicu perbaikan kembali pada kinerja tahun berikutnya agar lebih baik lagi, meskipun dalam kategorisasi capaian masih masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Pangan Olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sampel PIRT tersampling sebagai sampel MD/ML yaitu No 25.098.301.13.01.0027	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.	TW II	Y	S03.03.02	Label kemasan yang tidak dapat terbaca dengan jelas dan lengkap
	Terdapat 1 sampel nomor 25.098.301.13.01.0136 tidak sesuai berat sampel yang telah disampling sesuai pedoman	Dilakukan sampling terhadap pangan tertentu pada bulan-bulan berikutnya jika terdapat adanya kasus di masyarakat terkait isu keamanan pangan olahan untuk dapat memenuhi target yang telah dibuat hingga akhir tahun.	Dilakukan penggantian sampling Pangan Tertentu dengan jenis pangan lainnya sehingga target output tetap tercapai	TW IV	Y	S01-03.01	Tidak tersedianya jumlah sampel yang mencukupi

Keberhasilan dalam realisasi kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait penetapan jumlah sampel minimal yang bisa di sampling sesuai dengan kategori sampling pada pedoman sampling.

- Melakukan pengaturan tugas di tim sampling sehingga tidak terjadi kesalahan jenis sampel dan overload pekerjaan dalam pelaksanaan sampling.
- Melakukan komunikasi dengan unit pengampu terkait permasalahan sampling untuk mendapatkan solusinya.
- Melakukan peningkatan kompetensi petugas sampling melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja untuk memahami petunjuk teknis yang ada pada Pedoman Sampling terbaru supaya tidak salah kategori.
- Telah disusun perencanaan target jumlah dan kategori sampling setiap bulannya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Menyusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian di awal tahun dan dievaluasi setiap bulannya.
- Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan yang telah disusun.
- Melaksanakan pengujian dan melaporkannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman sampling.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	219.030.750	211.501.690	96,56

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar Rp. 2211.501.690,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 219.030.750,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 96,56%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	100,00	497.082.000	480.446.621	96,65

Realisasi rincian output yang mendukung pencapaian target IKU sebanyak 441 sampel sesuai dengan target Tahun 2025 sehingga capaian output sebesar 100%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Pengadaan Reagensia Kimia Pengujian Sampel Makanan	38.124.450	38.052.414	99,81
2	Pengadaan Media Mikrobiologi Pengujian Sampel Makanan	53.581.500	53.073.873	99,05
3	Pengadaan Media Mikrobiologi Pengujian Dna Porcein	1.334.500	1.334.220	99,98
4	Pengujian Sampel Regional Pangan	93.813.500	88.632.733	94,48
5	Pengiriman Sampel Makanan Ke Laboratorium Regional	1.444.000	1.443.750	99,98
6	Pengadaan Sampel Makanan	28.986.300	28.964.700	99,93
7	Rapat Koordinasi Pusat Dan Balai Dalam Manajemen Sampling Obat Dan Makanan	1.746.500	0	0,00

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi sampling pangan. Penetapan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian melibatkan seluruh pihak yang terkait. Rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dibuat dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara online oleh seluruh pihak terkait yang diberikan akses, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
2. Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan. RHPK tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
4. Pengadaan reagensia kimia pengujian pangan dengan realisasi anggaran sebesar 99,81%.
5. Pengadaan media mikrobiologi pengujian pangan dengan realisasi anggaran sebesar 99,98%.
6. Pengiriman sampel obat ke laboratorium regional pangan, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,48%.

4

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar adalah salah satu indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya yang bertujuan untuk memotret bagaimana penanganan KLB-KP di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya apakah telah sesuai dengan pedoman sehingga dapat diperoleh informasi terkait agen penyebab keracunan untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan indikator yaitu persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar, dapat dijelaskan bahwa “sampel KLB-KP” yaitu sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan hasil investigasi ataupun analisis epidemiologi. Sampel KLB-KP yang diperiksa tidak terbatas pada Pangan Olahan Dalam Kemasan namun juga termasuk Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan tak menutup kemungkinan termasuk Pangan Segar, baik Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) maupun Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sampel KLB-KP dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Pengertian “sesuai standar” adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Tambahan khusus untuk sampel pangan jenis Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) yang menjadi tugas utama Badan POM perlu juga diperhatikan kesesuaian terhadap standar atau regulasi terkait seperti misalnya parameter uji lainnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Kesesuaian terhadap standar lainnya ialah dalam hal pengambilan sampling yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; serta dalam melakukan investigasi penyebab keracunan yaitu sesuai dengan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Secara ringkas, pengukuran indikator ini dilakukan melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total Sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

- Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100,00	Baik

Sampai dengan akhir Triwulan IV telah dilakukan pengujian terhadap dua jenis sampel KLB-KP dengan 12 parameter uji. Sampel pertama berupa puding cake yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, yaitu berupa puding susu yang merupakan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan diproduksi oleh salah satu pelaku usaha UMK Jasa Boga di Kasongan, Kabupaten Katingan. Sampel tersebut diuji secara mikrobiologi dengan 4 (empat) parameter yaitu *Bacillus cereus*, *Salmonella*, *E. coli* dan *Staphylococcus aureus*. Pengujian hanya dilakukan secara mikrobiologi dikarenakan berdasarkan kajian epidemiologi tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan pada penyebab keracunan disebabkan agen kimia. Sampel kedua berupa kue sus yang dikirim dari PKM Bukit Hindu Palangka Raya berupa kue sus dan telah dilakukan pengujian terhadap 8 (delapan) parameter yaitu borak, formalin, sianida arsen, *Salmonella*, *E. coli*, *Bacillus cereus* dan *Staphylococcus aureus*.

Hasil pengujian, pada sampel pertama diperoleh satu parameter yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu parameter uji *Salmonella*. Hasil tersebut telah sesuai dengan referensi etiologi meliputi gejala yang dialami oleh korban, masa inkubasi, maupun kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan serta kesesuaian dengan permintaan parameter uji oleh dinas kesehatan berdasarkan kajian epidemiologi yang telah dilakukan. Adapun hasil uji pada sampel kedua yaitu Tidak Memenuhi Syarat terhadap 2 (dua) parameter uji yaitu angka B. cereus dan angka S. aureus. Pelaporan atas kedua kasus tersebut mulai definisi kasus, kajian epidemiologi, hingga laporan hasil uji telah dilaporkan ke Badan POM melalui aplikasi SPIMKER KLB-KP. Dengan demikian capaian terhadap target Triwulan IV sebesar 100.00% dengan kriteria capaian **Baik**.

Persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar adalah salah satu indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya yang bertujuan untuk memotret bagaimana penanganan KLB-KP di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya apakah telah sesuai dengan pedoman sehingga dapat diperoleh informasi terkait agen penyebab keracunan untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan indikator yaitu persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar, dapat dijelaskan bahwa “sampel KLB-KP” yaitu sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan dua orang atau lebih menderita sakit

dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan hasil investigasi ataupun analisis epidemiologi. Sampel KLB-KP yang diperiksa tidak terbatas pada Pangan Olahan Dalam Kemasan namun juga termasuk Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan tak menutup kemungkinan termasuk Pangan Segar, baik Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) maupun Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sampel KLB-KP dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Pengertian “sesuai standar” adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Tambahan khusus untuk sampel pangan jenis Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) yang menjadi tugas utama Badan POM perlu juga diperhatikan kesesuaian terhadap standar atau regulasi terkait seperti misalnya parameter uji lainnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Kesesuaian terhadap standar lainnya ialah dalam hal pengambilan sampling yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; serta dalam melakukan investigasi penyebab keracunan yaitu sesuai dengan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Secara ringkas, pengukuran indikator ini dilakukan melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total Sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$
- e. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- f. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan: Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100	100,00
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100,00	100,00	100,00
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	100	100	100,00

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar 100.00% dan realisasi kinerja sebesar 100.00% sehingga diperoleh persentase capaian 100.00%. Pada Triwulan I tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan hingga akhir Triwulan I belum selesai dilakukan pembahasan Definisi Operasional (DO) oleh unit pengampu maupun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Pada Triwulan II terdapat satu sampel kasus KLB keracunan pangan yang masuk dengan hasil uji positif *Salmonella* maka capaian dan realisasi pada TW II 100%. Pada TW III tidak terdapat sampel kasus KLB sehingga tidak ada realisasi pada periode tersebut. Dengan perhitungan capaian yang bersifat akumulatif, maka capaian pada Triwulan II tetap dihitung pada Triwulan III. Pada TW IV terdapat satu sampel kasus KLB dengan hasil uji *Bacillus cereus* dan angka *Staphylococcus aureus* sehingga capaian dan realisasi kinerja sampai dengan TW IV juga tetap 100%.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	 Tercapai/ Melampaui

Dengan target sebesar 100% pada target jangka menengah dan realisasi kinerja pada TW IV sebesar 100% menjadikan capaian sebesar 100% atau masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Dengan demikian pada Tahun berikutnya perlu dipertahankan kembali kinerjanya dalam melakukan tindak lanjut terhadap adanya kasus keracunan pangan dalam menentukan agen penyebab melalui koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Selain itu, dalam pelaporan melalui aplikasi SPIMKER juga perlu diperhatikan kelengkapan informasi dan dokumen serta ketepatan waktunya sehingga kinerja yang baik tersebut tetap dapat dipertahankan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	100	100	100,00
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
			#DIV/0!
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	100	100	100,00

Tabel diatas menyajikan data realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Realisasi Balai Besar POM di Palangka Raya dan Balai Besar POM di Gorontalo sama yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kasus keracunan yang terjadi dapat diketahui dan dilaporkan dengan baik agen penyebabnya melalui pengujian laboratorium maupun analisis epidemiologi. Adapun realisasi di Balai Besar POM di Jayapura tidak ada (nihil) menunjukkan bahwa di daerah tersebut tidak terdapat adanya kasus Kejadian Luar Biasa akibat Keracunan Pangan (KLB-KP).

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Penentuan parameter uji disebabkan informasi masa inkubasi yang tidak lengkap	Perkuat komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan jika terjadi lagi kasus KLB-KP.	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap adanya laporan KLB yang terjadi pada sampai dengan semester 1 dan dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan analisis epidemiologi serta pengujian oleh Lab Mikrobiologi BBPOM di Palangka Raya sehingga agen	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S01- 04.01	Kompetensi petugas dalam menentukan etiologi dan parameter uji tidak tepat

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penyebab terjadinya keracunan dapat diketahui.				

Tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Palangka Raya melalui TGC Balai serta secara eksternal dengan TGC Daerah atau Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
- Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan, meliputi ketersediaan reagensia dan peralatan serta sumber daya manusia petugas penguji agar pengujian dapat selesai tepat waktu dan hasil uji dapat mendukung kajian epidemiologi yang telah dilakukan.
- Pelaporan hasil pemantauan KLB-KP melalui aplikasi SPIMKER secara cepat dan tepat agar dapat segera dilakukan *monitoring* oleh Badan POM.
- Adanya jadwal *on call* pada hari Sabtu/Minggu/Libur sebagai petugas penerima laporan kejadian keracunan yang telah dibuat sebagai hasil rekomendasi evaluasi internal juga perlu dilaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keterlambatan dalam penanganan laporan kasus.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	32.678.100	32.616.355	99,81

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar Rp. 32.616.355,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 32.678.100,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99,81%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	100,00	497.082.000	480.446.621	96,65

Realisasi rincian output yang mendukung pencapaian target IKU sebanyak 441 sampel sesuai dengan target Tahun 2025 sehingga capaian output sebesar 100%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	32.678.100	32.616.355	99,81

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
2. Pengadaan reagensia kimia pengujian pangan dengan realisasi anggaran sebesar 99,81%.

5

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampling Pangan Industri rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dikemas dalam kemasan pangan, yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kategori sampling PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 85% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian dari 35 sampel yang diambil dan dilaporkan sampai dengan akhir Triwulan I. Pengambilan sampel dilakukan pada triwulan I tahun berjalan dengan tujuan agar tidak terjadi sampling berulang (double sampling/double counting) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan menu post market dalam program Bantuan Operasional Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) TA 2025.

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini dipengaruhi oleh jumlah produk PIRT yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan ketersediaan reagen serta kesiapan alat untuk melakukan pengujian sampel PIRT. Selain itu kinerja pada indikator ini juga didukung oleh ketepatan perencanaan, kejelian petugas dalam mengambil kesimpulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian dan evaluasi penandaan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

$$\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

dimana :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di Triwulan 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.86	109,25	109.25	Sangat Baik

Realisasi kinerja mencapai **92.86%**, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar **85%**. Dengan capaian sebesar **109.25%**, menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dari perencanaan awal. Berdasarkan hasil normalisasi capaian (109.25), indikator ini masuk ke dalam kategori **Sangat Baik**.

Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang berisiko telah berjalan secara **efektif dan responsif**. Tingkat tindak lanjut yang tinggi ini berkontribusi langsung pada peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat dari potensi pangan berbahaya.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92

	85	92.29	108.58
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	85	92.86	109.25
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	85	92.86	109.25

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, capaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti mencapai 92.86% dari target 85% dengan capaian 109.25%, sehingga dikategorikan Sangat Baik. Meskipun sempat terjadi kendala efisiensi anggaran pada Triwulan I yang menyebabkan sampling dan pengujian hanya dapat dilaksanakan terhadap 12 sampel, namun dengan adanya pengembalian anggaran pada bulan April, instansi segera melakukan percepatan penyelesaian target sebanyak 23 sampel pada Triwulan II sesuai dengan definisi operasional yang mengharuskan sampel PIRT selesai di Triwulan I. Langkah strategis ini terbukti efektif menjaga stabilitas performa, di mana realisasi tetap konsisten di atas target sepanjang tahun, yakni sebesar 93.43% pada Triwulan I, 92.29% pada Triwulan II, serta stabil di angka 92.86% pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Mengenai perbandingan capaian dengan periode sebelumnya, realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk memantau tren perkembangan dan konsistensi pengawasan sarana PIRT di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	92.86	97.75	 Akan Tercapai

Capaian tahun ini juga menunjukkan progres positif terhadap target jangka menengah (Renstra) sebesar 95%, dengan tingkat ketercapaian mencapai 97.75% sehingga dikategorikan **Akan Tercapai**.

Hal ini kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan sampling dan pengujian oleh UPT. Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	85	92.86	109.25
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	91	100	109.89
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	80	92.4	115.50

Dalam hal perbandingan kinerja antar unit kerja, Balai Besar POM di Palangka Raya mencatatkan capaian terhadap target sebesar 109.25% dengan realisasi 92.86%. Jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya, efektivitas capaian Palangka Raya berada di antara Balai Besar POM di Jayapura yang mencapai 109.89% (realisasi 100%) dan Balai Besar POM di Gorontalo yang memimpin dengan capaian tertinggi sebesar 115.50% (realisasi 92.4%). Meskipun terdapat perbedaan pada penetapan target awal di masing-masing unit di mana Palangka Raya menetapkan target sebesar 85%, Jayapura sebesar 91%, dan Gorontalo sebesar 80%, ketiga unit kerja tersebut secara konsisten menunjukkan performa yang sangat efektif karena seluruhnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari *tools* penilaian mandiri untuk menghitung realisasi kinerja indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 92.89% dan capaian sebesar 109.25% dengan kriteria sangat baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain disebabkan oleh :

- Kejelasan Prosedur Tindak Lanjut dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai bentuk pengendalian terhadap ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan.
- Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti ketidaktepatan pengambilan sampel sesuai perencanaan, jumlah sampel yang tidak mencukupi, keterlambatan pelaporan dan kesalahan pengambilan kesimpulan.
- Petugas sampling dan pengujian memiliki kompetensi yang memadai dalam pengambilan keputusan hasil uji, penentuan tindak lanjut, dan pelaporan sesuai ketentuan.
- Koordinasi yang efektif antara tim sampling dan pengujian guna memastikan waktu penyelesaian pengawasan dapat dipenuhi dengan cepat.

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh :

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kapasitas dan Beban Kerja Laboratorium yang tinggi akibat penumpukan sampel dan jumlah SDM terbatas serta kendala peralatan laboratorium menyebabkan tekanan kerja tinggi dan potensi keterlambatan pelaporan hasil uji	Pemetaan kompetensi, <i>job desk</i> dan beban kerja tenaga penguji	Pengusulan ABK sesuai dengan hasil pemetaan dan kajian beban kerja penguji	2026	T	-	Keterlambatan LHU dari laboratorium pada TW II

Untuk mempertahankan kinerja tinggi sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Mengkaji ulang target tahunan untuk tahun berikutnya. Mengingat capaian konsisten di atas 92%, target sebaiknya dinaikkan menjadi 90%-92% untuk menciptakan tantangan kinerja yang lebih tinggi.
- Melakukan pelatihan lanjutan, khususnya pada aspek hukum/regulasi terbaru terkait tindak lanjut hasil pengawasan PIRT, untuk memperkuat dasar pengambilan tindak lanjut yang tepat untuk dilakukan.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.86	109.25	219.030.750	211.501.690	96.56

Anggaran yang mendukung IKU persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan anggaran Sampel makanan yang diperiksa oleh BBPOM dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,56%. Anggaran ini terdiri dari pembelian reagen kimia, reagen mikrobiologi, pengujian sampel regional, pengiriman sampel regional dan pembelian sampel.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	100,00	497.082.000	480.446.621	96.65

Indikator ini didukung dengan anggaran rutin Balai Besar POM di Palangka Raya dan memiliki rincian output sebesar 441 sampel beserta hasil ujinya, dimana terpecah menjadi sampel PIRT, sampel targeted dan sampel rutin, dimana Rincian output sampel PIRT sebesar 35 sampel dengan capaian 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96.65%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN REAGENSIA KIMIA PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	38.124.450	38.052.414	99.81
2	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN	53.581.500	53.073.873	99.05
3	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN DNA PORCEIN	1.334.500	1.334.220	99.98
4	PENGUJIAN SAMPEL REGIONAL PANGAN	93.813.500	88.632.733	94.48
5	PENGIRIMAN SAMPEL MAKANAN KE LABORATORIUM REGIONAL	1.444.000	1.443.750	99.98
6	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	28.986.300	28.964.700	99.93
7	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	1.746.500	0	0.00

Berdasarkan data capaian kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menetapkan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 92.86%. Capaian kinerja yang melebihi target (109.25%) dimana capaian output sesuai dengan target 35 sampel (100%) dan realisasi anggaran 96.65%.

Dari sisi anggaran banyak sub komponen yang mendukung indikator sampel makanan yang diperiksa UPT secara keseluruhan termasuk didalamnya sampel PIRT. Semua sub komponen yang ditanggung pada IKU ini mendukung pencapaian IKU dimana kegiatan yang paling mendukung adalah kegiatan pengadaan reagen dan pengadaan sampel. Sementara untuk subkomponen Rapat koordinasi pusat dan balai dalam manajemen sampling dan makanan dimana realisasinya 0% artinya tidak ada penyerapan anggaran, dikarenakan rapat dilakukan secara online, dan besaran anggaran tidak memadai untuk dapat mengikuti rapat secara luring, hal ini perlu diperhatikan untuk tagging anggaran tahun berikutnya untuk dapat mengikuti rapat secara luring.



Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator kinerja ini sama dengan indikator kinerja pada periode renstra sebelumnya dengan definisi yang sama, tidak ada perubahan Definisi Operasional. Pada Triwulan III terdapat perubahan manual indikator pada bagian target yang semula kumulatif menjadi *flat*.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* $= \frac{A + B}{2}$

Keterangan :

$$A : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

$$B : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan Pemeriksaan Sarana Pelayanan Farmasi (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	84.91	101.08	Sangat Baik

Berdasarkan manual indikator, penetapan target indikator ini awalnya bersifat *gradual* meningkat 2 angka tiap bulannya dari 60% di bulan Januari 2025 sampai dengan 84% di bulan Desember 2025 dan mulai bulan Agustus 2025 berubah menjadi target *flat* sebesar 84%. Selama tahun 2025, dari bulan Januari sampai

dengan Desember terdapat 169 surat tindak lanjut ke pelaku usaha, 118 surat telah diberikan *feedback* serta 1 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP yang dikirimkan kepada lintas sektor/Dinas Kesehatan Kabupaten dan telah diberikan *feedback*. Terdapat 5 surat tindak lanjut yang diterbitkan pada tahun 2025 yang belum mendapatkan *feedback* sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101.08% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Penetapan target awalnya *gradual* dari 60% di bulan Januari 2025 dan 84% di bulan Desember 2025 meningkat 2 angka tiap bulannya. Pada Triwulan II, berdasarkan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor B-PR.04.02.16A.07.25.655 tanggal 17 Juli 2025 disampaikan permohonan revisi realisasi kinerja indikator ini periode Januari - Mei 2025 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan karena adanya kesalahan input data. Data yang dilaporkan tidak sesuai karena termasuk rekomendasi tahun 2024 yang sudah ditindaklanjuti. Data yang dikoreksi adalah data realisasi Triwulan I dari 72.41% menjadi 18.37%.

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64	72.41	113.14
	Target TW I	Realisasi TW I (koreksi)	Capaian TW I
	64	18.37	21.87
	Target TW I	Realisasi TW II	Capaian TW I
	72	72.22	100.31
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	84	79,29	94,39
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	84	84,91	101,08

Triwulan I dan II masih menggunakan target *gradual*, sedangkan triwulan III dan IV menggunakan target *flat*. Jika realisasi dibandingkan dengan target dan koreksi data di bulan Mei 2025, maka capaian dan kriteria capaiannya sebagai berikut:

- Triwulan I : Realisasi sebesar 18.37% jika dibandingkan terhadap target 64% maka memberikan angka capaian sebesar 21.87% dengan kriteria **kurang**
- Triwulan II : Realisasi sebesar 72.22% jika dibandingkan terhadap target 72% maka memberikan angka capaian sebesar 100.31% dengan kriteria **baik**
- Triwulan III : Realisasi sebesar 79.29% jika dibandingkan terhadap target 84% maka memberikan angka capaian sebesar 94.39% dengan kriteria **cukup**
- Triwulan IV : Realisasi sebesar 84.91% jika dibandingkan terhadap target 84% maka memberikan angka capaian sebesar 101.08% dengan kriteria **sangat baik**

Setiap triwulan, realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha dan atau lintas sektor yang memberikan *feedback* terhadap rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun demikian capaian turun pada triwulan III karena adanya perubahan target dari *gradual* menjadi *flat* pada manual indikator dan meningkat kembali pada triwulan IV dengan kriteria **sangat baik**.

Indikator kinerja ini telah ada dari periode renstra sebelumnya dengan definisi operasional yang sama sehingga realisasi kinerja tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dan sama-sama melampaui dari target yang ditetapkan. Berikut perbandingan realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 :

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80	83.80	104.75
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian Tahun 2025
	84	84.91	101.08

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	84.91	96.49	 Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 88%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 84.91% akan memberikan angka capaian sebesar 96.49% dengan kategori **Akan Tercapai**. Upaya-upaya untuk mencapai target secara konsisten telah dilakukan baik internal maupun eksternal antara lain monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara ketat, melakukan sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan, desk CAPA secara berkala serta pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis terkait.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	84	84.91	101.08
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91.24	101.38
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	93.01	93.18	100.18

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2025 jika dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo, realisasi tertinggi adalah Balai Besar POM di Gorontalo sebesar 93.18% dan Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh realisasi terendah sebesar 84.91%. Namun demikian seluruh UPT, termasuk Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh

capaian di atas 100% dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan kategori seluruhnya **sangat baik**. Sedangkan untuk capaian indikator ini, paling tinggi adalah Balai Besar POM di Jayapura dan paling rendah Balai Besar POM di Gorontalo.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan manual indikator, penetapan target indikator ini awalnya bersifat *gradual* meningkat 2 angka tiap bulannya dari 60% di bulan Januari 2025 sampai dengan 84% di bulan Desember 2025 dan mulai bulan Agustus 2025 berubah menjadi target *flat* sebesar 84%. Selama tahun 2025, dari bulan Januari sampai dengan Desember terdapat 169 surat tindak lanjut ke pelaku usaha, 118 surat telah diberikan *feedback* serta 1 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP yang dikirimkan kepada lintas sektor/Dinas Kesehatan Kabupaten dan telah diberikan *feedback*. Terdapat 5 surat tindak lanjut yang diterbitkan pada tahun 2025 yang belum mendapatkan *feedback* sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat inspeksi, agar memberikan *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan pola tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Aktif berkoordinasi dengan IAI untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan CAPA dari hasil pemeriksaan BBPOM di Palangka Raya
3. Petugas aktif melakukan konfirmasi sekaligus memberikan konsultasi secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha terkait progress CAPA yang harus dikirimkan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap timeline *feedback* CAPA dari surat tindak lanjut yang telah diterbitkan.
5. Menerapkan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis masing-masing kedeputan/komoditi.
6. Melakukan sosialisasi Pola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Produksi Sediaan farmasi dan Pangan Olahan kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana.
7. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka sinergisme pengawasan obat dan makanan dan memaksimalkan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) masing-masing kabupaten/kota.
8. Monitoring dan evaluasi penyampaian surat tindak lanjut kepada stakeholder untuk mencegah tidak tersampainya surat tersebut.

Dari keberhasilan pencapaian indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh

stakeholder” tersebut, hal-hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

- A. Memberikan tindak lanjut yang tegas untuk sarana yang tidak memberikan *feedback* atas keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku pada masing-masing jenis sarana distribusi/produksi.
- B. Melakukan monitoring dan evaluasi atas *feedback* yang diberikan dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu aspek dalam perhitungan analisis risiko target sarana yang akan diperiksa.
- C. Melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian surat tindak lanjut kepada *stakeholder* untuk mencegah tidak tersampainya surat tersebut.
- D. Melakukan *desk* CAPA secara berkala.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	Tidak ada <i>feedback</i> atas rekomendasi/surat tindak lanjut yang disampaikan	Meningkatkan monitoring evaluasi	Petugas wajib <i>upload</i> bukti penyampaian surat tindak lanjut di platform SI PAMELA	TW I 2026	Y	S01-06.01	Pelaku usaha terlambat menerima surat tindak lanjut

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	84.91	101.08	3.246.000	3.246.000	100.00

Berdasarkan data Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 84% dan terealisasi sebesar 84.91%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 101.08%. Dengan rincian output berupa Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	100,00	20.688.000	20.679.666	99.96

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung oleh anggaran dengan kode 3165.QIC.001 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.96%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	3.246.000	3.246.000	100.00

Capaian kinerja yang melampaui target sebesar 101.08% dengan realisasi anggaran sebesar 99.96% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan kegiatan serta perhitungan kebutuhan anggaran.

Dalam pencapaian indikator ini, terdapat tagging anggaran yang belum sesuai. Indikator ini hanya mendapatkan tagging anggaran dari RO “Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT”. Seharusnya dalam pencapaian indikator ini, tersedia juga tagging anggaran dari RO “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT”

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, koordinasi yang baik dengan lintas sektor juga menunjang keberhasilan dari indikator ini. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha untuk secara aktif melakukan tindakan perbaikan melalui penyusunan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi *feedback* dari *stakeholder* yang ketat

- Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha/penanggung jawab
- Melaksanakan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis pedoman Tindak Lanjut
- Monitoring dan evaluasi penyampaian surat tindak lanjut kepada *stake holder* untuk mencegah tidak tersampainya surat tersebut
- Desk CAPA

Penggunaan anggaran “Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Sarana Produksi yang telah dilaksanakan” untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan di sarana produksi.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini juga dilakukan tanpa anggaran. Pada tanggal 5 November 2025 telah dilaksanakan desk CAPA secara daring khususnya kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian.

7

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Ruang lingkup dari sarana produksi sediaan farmasi sendiri terdiri dari :

- a) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (seperti: Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- b) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, dan Industri Suplemen Kesehatan
- c) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu Industri Kosmetik Golongan A dan Industri Kosmetik Golongan B.

Indikator ini merupakan indikator baru namun serupa dengan indikator tahun lalu yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dimana perbedaan mendasar ada pada ruang lingkup sarana produksi yang diperiksa dan juga cara pengukuran yang ditetapkan dalam manual IKU.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana produksi (Sarprod) Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

dimana : **% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)**

d) Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

e) Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

f) Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

g) Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

h) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

i) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

j) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai Renlak) X 100%

2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 87% yang diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *ouput* sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	108.70	Sangat Baik

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan awalnya sebesar 87% sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *output* sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Pada bulan Agustus 2025 telah terjadi penyesuaian target indikator dari semula 87% menjadi 92%, yang mulai berlaku pada Triwulan III. Kenaikan target ini merupakan respons langsung terhadap kinerja luar biasa di Triwulan II, dimana realisasi mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 114.94% kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Capaian tersebut bukan merupakan keberhasilan mutlak, melainkan sebagai indikasi bahwa penetapan target awal 87% kurang matang pada proses pengkajian definisi operasionalnya. Oleh karena itu, melalui mekanisme evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan pada bulan Agustus, target ditingkatkan menjadi 92% untuk menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi, serta untuk menjaga momentum peningkatan yang telah dicapai.

Sampai dengan akhir Triwulan IV telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sebanyak 2 sarana U MOT dan 1 sarana produksi kosmetik. Dari target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu 92%

teralisasi 100% pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108.70% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87	100	114.94
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	92	100	108.70
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	92	100	108.70

Realisasi indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 sama jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan II dan Triwulan III. Pada Triwulan I belum ada realisasi sehingga tidak ada capaian. Namun kriteria capaian Triwulan II tidak dapat disimpulkan dan kriteria capaian Triwulan II Sangat Baik karena adanya retargeting pada bulan Agustus dari 87% menjadi 92%.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi berisiko di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	100	103.09	 Tercapai /Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan IV tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra) menunjukkan capaian sebesar 103.09%, dengan kriteria tercapai/melampaui. Hal ini kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga dapat memberikan kajian dan masukan dalam penetapan target serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul. Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	92	100	108.70
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	91	100	109.89
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	90	100	111.11

Dalam hal perbandingan kinerja antar unit kerja yang sejenis, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh realisasi yang sama dengan Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Namun untuk capaian, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh capaian terendah dibandingkan Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target dimana Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki target tertinggi meskipun realisasinya relatif sama dibandingkan dengan Balai Besar

POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo meskipun realisasinya relatif sama.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 memperoleh kriteria capaian **Sangat Baik**.

Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran mandiri IDEAS serta *coaching* dan *mentoring* oleh ketua tim kerja.
- Telah melakukan pengendalian terhadap risiko ketidaksesuaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan terhadap peraturan yang berlaku.
- Telah dilakukan pengaturan tugas di tim inspeksi sehingga tidak terjadi *overload* pekerjaan dalam pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi
- Telah dilaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terbatasnya kompetensi petugas untuk melakukan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan terkait pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi yang ada di IDEAS	Membuat matrik pelatihan peningkatan kompetensi petugas	TW I 2026	T	-	Pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi
	Pelaksanaan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan perencanaan	Melakukan peningkatan penyusunan renlak pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan melakukan monev setiap bulan	Menyusun renlak pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan melaksanakan monev yang ketat setiap bulannya	TW IV 2026	T	-	Pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang Sangat Baik sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Menjadikan realisasi tahun 2025 sebagai baseline dan berfokus pada perencanaan yang baik diawal periode tahun berikutnya.

- b. Pelatihan yang berkelanjutan kepada petugas untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian teknis mereka, memastikan bahwa kenaikan target dapat didukung oleh kualitas dan kecepatan kerja yang lebih baik
- c. Melaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	8.721.000	8.716.833	99.95

Anggaran yang digunakan untuk melakukan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah Rp. 8.716.833 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.721.000 sehingga capaian realisasi anggaran adalah 99.95%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	100.00	20.688.000	20.679.666	99.96

Anggaran Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdapat pada rincian output Sarana Produksi Obat dan makanan yang diperiksa oleh UPT. Target tahun 2025 adalah 26 sarana produksi yang terdiri dari 3 sarana produksi sediaan Farmasi dan 23 sarana produksi makanan. Target 3 sarana produksi sediaan farmasi pada tahun 2025 dengan rincian *output* sebagai berikut:

- Sarana UMOT 2
- Sarana Kosmetik 1

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	1.623.000	1.623.000	100.00
2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR. MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	7.098.000	7.093.833	99.94

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi.
- Pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan renlak.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain program/kegiatan tersebut diatas, terdapat juga beberapa program/kegiatan yang juga memberikan pengaruh dalam pencapaian pernyataan kinerja. Sebagai berikut :

- Pengisian RHPK secara benar dan tepat waktu. RHPK tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.

8

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) dilakukan berdasarkan kajian analisis risiko sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar PIRT serta pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Ketentuan “diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” ialah dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut.
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara perhitungan indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTPT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
- Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - a. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 - b. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 - c. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK).

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86.96	108.70	108.70	Sangat Baik

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Dari target tersebut, sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sebesar 86.96% sehingga diperoleh capaian kinerja 108.70% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian ini diperoleh dari pembagian tiga parameter kinerja yaitu ketepatan waktu pelaporan (91.3%), kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan pangan (73.91%) dan kesesuaian grading penilaian berdasarkan pedoman yang berlaku (95.65%).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	87.04	108.80
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	80	86.96	108.70
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	80	86.96	108.70

Pada Triwulan I berdasarkan pedoman penilaian kinerja dari unit pengampu Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Badan POM RI indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja, sehingga pada Triwulan I realisasi dianggap 0%. Pada Triwulan II dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana,

sedangkan pada Triwulan III bertambah 5 sarana sehingga total sarana yang telah diperiksa menjadi 23 sarana. Realisasi capaian kinerja pada Triwulan III-IV terdapat sedikit penurunan dibandingkan realisasi kinerja Triwulan II yaitu sebesar 0.08%. Penurunan ini dinilai tidak signifikan karena capaian kinerja pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV pada kategori **Sangat Baik**.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk memantau tren perkembangan dan konsistensi pengawasan sarana produksi pangan, termasuk PIRT di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	86.96	96.62	 Akan Tercapai

Dengan target sebesar pada target jangka menengah sebesar 90% dan realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 86.96% menjadikan capaian sebesar 96.62% atau masuk pada kriteria capaian **Akan Tercapai**. Dengan demikian pada Tahun berikutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali kinerjanya dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan berbasis risiko serta tindak lanjutnya, termasuk dalam hal koordinasi dengan stakeholder terkait seperti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal pembinaan pelaku usaha IRTTP sehingga kinerja yang baik tersebut dapat ditingkatkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	80	86.96	108.70
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	90	98.33	109.26
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	91	93.94	103.23

Tabel diatas menyajikan data realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Jayapura sebesar 98.33% dan realisasi terendah diperoleh Balai Besar POM di Palangka Raya sebesar 86.96%. Hal ini menjadi pemicu perbaikan kembali pada kinerja tahun berikutnya agar lebih baik lagi, meskipun dalam kategorisasi capaian masih masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Telah dilakukannya kegiatan sosialisasi pedoman tindak lanjut yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap potensi risiko ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yaitu setiap bulan sehingga memungkinkan dilakukan intervensi dan koreksi dengan segera sebelum terjadinya potensi risiko kegagalan kinerja seperti keterlambatan pelaporan oleh petugas.
3. Adanya alokasi anggaran dan sumber daya lain yang tepat sesuai dengan jumlah target sarana dan kompetensi petugas sehingga dapat dilakukan pemeriksaan sarana dengan sesuai pedoman dan rencana pelaksanaan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 3 sarana peredaran yang memiliki rating B tidak diberikan surat tindak lanjut sesuai pedoman	Dilakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan	Dilakukan sosialisasi kembali terkait Tindak Lanjut Pengawasan Pangan terhadap petugas	TW II 2026	Y	S01-08.03	Kompetensi petugas belum memadai (Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman)

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86.96	108.70	8.721.000	8.716.833	99.95

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar Rp. 8.716.833,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.721.000,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99.95%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	100.00	20.688.000	20.679.666	99.96

Realisasi rincian output yang mendukung pencapaian target IKU Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebanyak 26 sarana produksi, terdiri 8 sarana produksi MD, 15 sarana IRTP dan 3 sarana sediaan farmasi (obat tradisional dan kosmetik) sesuai dengan target Tahun 2025 sehingga capaian output sebesar 100%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	1.623.000	1.623.000	100.00
2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SARANA	7.098.000	7.093.833	99.94

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Program monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi yang telah dilaksanakan yaitu terhadap sarana IRTP di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan tindak lanjut pembinaan bersama Dinas Kesehatan.
2. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
3. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan sarana produksi pangan pangan, khususnya IRTP bersama Dinas Kesehatan.

Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{A + B + C}{3}$$

Keterangan :

A : Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

B : Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

C : Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Faktor yang mempengaruhi penilaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Sarana Distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian :

- Pemenuhan target pemeriksaan
- Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor*

Sarana distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan :

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
- Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	100,82	Sangat Baik

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Kabupaten), Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat dan fasilitas lain).

Berdasarkan hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor T-PW.03.04.16A.05.25.370 tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Revisi Target IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, mulai triwulan III target semula 73.88% menjadi 96.88%. Hal ini terjadi karena komponen target sarana distribusi kosmetik belum dimasukkan pada kompilasi perhitungan target seluruh komoditi pada indikator ini. Yang artinya target sebesar 73.88% merupakan rata-rata dari target sarana distribusi obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Setelah adanya revisi, komponen target sarana distribusi kosmetik

sudah dimasukkan dan dikompilasi dengan target sarana distribusi lainnya dan menghasilkan target sebesar 96.88%.

Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat*. Sampai dengan akhir tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan sarana sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 138 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 30 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 73 sarana
- Sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 13 sarana

Realisasi output di atas memberikan realisasi indikator kinerja sebagai berikut :

- Sarana distribusi obat 99.62%
- Sarana distribusi obat bahan alam 94.17%
- Sarana distribusi Suplemen Kesehatan 100%
- Sarana distribusi Kosmetik 96.88%

Rata-rata dari realisasi 4 jenis sarana tersebut adalah merupakan nilai realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 97.67%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 96.88%, maka akan memberikan

angka capaian 100.82% dengan kriteria **Sangat baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	0	0,00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	73,88	99,25	134,34
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	96,88	96,59	99,70
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	96,88	97,67	100,82

Berdasarkan hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor T-PW.03.04.16A.05.25.370 tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Revisi Target IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, mulai triwulan III target semula 73.88% menjadi 96.88%. Hal ini terjadi karena belum terisinya kolom kesepakatan target sarana distribusi kosmetik pada kompilasi perhitungan target sarana distribusi seluruh komoditi sediaan farmasi pada indikator ini di awal tahun.

Pada Triwulan I belum dilakukan perhitungan karena definisi operasional masih belum ditetapkan. Capaian pada Triwulan II tidak dapat disimpulkan, sedangkan realisasi sekaligus capaian Triwulan III mengalami penurunan dan kembali meningkat pada Triwulan IV dengan capaian sebesar 100.82% dengan kriteria **Sangat baik**.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,13	97,67	98,53	 Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 99.13%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 97.67% akan memberikan angka capaian sebesar 98.53% dengan kategori **Akan Tercapai**. Upaya-upaya untuk mencapai target secara konsisten telah dilakukan antara lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan secara ketat, melakukan *refreshment* pedoman tindak lanjut bagi petugas, optimalisasi kegiatan sertifikasi yaitu kegiatan sertifikasi sekaligus melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian serta manajemen waktu pelaksanaan kegiatan pada fungsi pemeriksaan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Target	Target
	96,88	97.67	100.82
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Target	Target
	94	97.66	103.89
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Target	Target
	94	100	106.38

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target yang ditetapkan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah paling tinggi di antara UPT lainnya. Realisasi indikator “persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” tahun 2025 jika dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo, realisasi tertinggi adalah Balai Besar POM di Gorontalo sebesar 100%, sedangkan Balai Besar POM di Palangka Raya dan Balai Besar POM di Jayapura memperoleh realisasi hampir sama sebesar 97.67% dan 97.66%. Hal yang sama untuk angka capaian, Balai Besar POM di Gorontalo memperoleh capaian paling tinggi yaitu sebesar 100.82% sedangkan Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh capaian yang paling rendah. Namun demikian seluruh UPT, termasuk Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh capaian di atas 100% dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan kategori seluruhnya **Sangat Baik**.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Kesalahan dalam menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan movev	Supervisi dan movev kesesuaian tindak lanjut	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S01-09.01	Tindak Lanjut hasil pemeriksaan belum sesuai pedoman

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
sesuai ketentuan							

Selama tahun 2025 sampai dengan akhir Triwulan IV, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi meliputi sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, obat bahan alam dan suplemen kesehatan dengan total sebanyak 254 sarana. Seluruh tahapan dari kegiatan pemeriksaan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberian tindak lanjut dan pelaporan mengikuti petunjuk teknis pemeriksaan dari masing-masing direktorat/kedeputian.

Analisis penyebab pencapaian **Keberhasilan** indikator kinerja:

- Pemenuhan target pemeriksaan
- Pemenuhan *timeline* pelaporan
- Kesesuaian tindak lanjut

Untuk aspek pemenuhan target pemeriksaan, seluruh komoditi telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan aspek pemenuhan timeline pelaporan dan kesesuaian tindak lanjut belum mencapai angka maksimal 100%.

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk perbaikan ke depan :

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja :

- Monev realisasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi
- Supervisi dan monev ketepatan timeline pelaporan;
- Supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut;
- Sosialisasi/*refreshing* juknis/pedoman tindak lanjut;

Program/kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan :

- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai rencana.
- Optimalisasi kegiatan sertifikasi yaitu kegiatan sertifikasi sekaligus melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan pada fungsi pemeriksaan.
- Revisi target pada RAPK menjadi 96.38%

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	153.345.250	153.214.101	99,91

Berdasarkan data pada Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 96.88% dan terealisasi sebesar 97.67%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100.82%. Dengan target rincian output berupa Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh anggaran dengan kode 3165.QIC.004 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.91%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	339	100,89	402.118.000	401.828.887	99,93

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh anggaran dengan kode 3165.QIC.004 dengan rincian output “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT” dengan capaian realisasi anggaran total sebesar 99.93%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	41.443.750	41.430.343	99,97
2	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. SUPLEMEN KESEHATAN. PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	9.325.500	9.320.420	99,95
3	INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	15.863.000	15.801.000	99,61
4	INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	7.727.000	7.722.500	99,94
5	PENYEBARAN INFORMASI DALAM RANGKA PENINGKATAN INDEKS KESADARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT	150.000	150.000	100,00
6	KOORDINASI/PEMBINAAN/MONITORING EVALUASI/PENDAMPINGAN PROGRAM TERPADU BALAI DAN PUSAT	13.592.000	13.580.093	99,91
7	RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/EVALUASI/BIMTEK/PELATIHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN	33.929.000	33.911.395	99,95
8	DESK PENDAMPINGAN PENGISIAN TOOLS PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN	4.046.000	4.036.500	99,77
9	KEGIATAN PENGAWALAN PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO	3.440.000	3.440.000	100,00

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
10	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE TERHADAP GEN Z/ANGGOTA PRAMUKA/KEG KIE LAINNYA	5.500.000	5.494.800	99,91
11	KOORDINASI PROGRAM PRO KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN DAN SMART LAURA	3.687.000	3.686.500	99,99
12	BIMTEK DAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN CDOB BAGI IFK	7.441.500	7.438.700	99,96
13	SERTIFIKASI SARANA BUPN KABUPATEN KAPUAS	2.005.000	2.005.000	100,00
14	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI JALUR SUNGAI DI KABUPATEN KATINGAN	840.000	840.000	100,00
15	RAPAT KOORDINASI REGIONAL BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN	4.355.500	4.356.850	100,03

Namun demikian pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran yang mengakibatkan beberapa RO tidak mencukupi anggarannya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada RO lain tersebut, dilakukan penambahan kegiatan pada RO QIC walaupun secara tagging anggaran belum sesuai. Beberapa penambahan kegiatan lain pada RO QIC sebagai berikut:

- Penyebaran Informasi dalam rangka peningkatan indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat.
- Desk Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
- Kegiatan Pengawasan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE terhadap Gen Z/Anggota Pramuka/Kegiatan KIE lainnya.
- Koordinasi Program Pro Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Smart Laura
- Rapat Koordinasi Regional Balai Dalam Manajemen *Sampling* Obat dan Makanan di Balikpapan.

Sarana distribusi Pangan Olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran pangan olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap artinya dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan artinya mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- 1) Pemenuhan target sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa.
- 2) Ketepatan waktu pelaporan.
- 3) Kesesuaian tindak lanjut (tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

9. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

10. Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut = (A+B+C)

A: Jumlah sarana yang diperiksa sesuai target.

B: Ketepatan waktu pelaporan, serta

C: Ketepatan tindak lanjut.

Dengan nilai proporsi dari ketiga komponen tersebut yaitu:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kriteria Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88..95	104.65	104.65	Sangat Baik

Realisasi capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan pada Triwulan IV (88.95%) dibandingkan dengan target Tahun 2025 (85%) sebesar 104.65% atau masuk pada kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksaan sarana distribusi pangan telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan maupun pedoman tindak lanjut hasil pengawasan pangan yaitu Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu ketepatan pemeriksaan sesuai pedoman, ketepatan tindak lanjut serta ketepatan waktu pelaporan. Dari tiga komponen tersebut, proporsi penilaian tertinggi terdapat pada ketepatan tindak lanjut (70%), ketepatan pemeriksaan (20%) dan ketepatan waktu pelaporan (10%). Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan selanjutnya perlu lebih menitikberatkan pada kesesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta evaluasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap temuan ketidaksesuaian hasil penilaian.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	90	112.50
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	85	91.32	107.44
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	85	88.95	104.65

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan yaitu sesuai dengan Renstra awal BBPOM di Palangka Raya, sedangkan pada Triwulan III terdapat perubahan target menjadi 85% sesuai dengan revisi RAPK yang tertuang dalam Revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya. Revisi ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap realisasi yang telah tercapai serta kesepakatan dengan unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan maupun Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Dilihat dari realisasi kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat tren kenaikan dari 88.57 %, 90 % dan 91.32%. Namun terjadi penurunan kembali pada Triwulan IV menjadi 88.95%. Namun penurunan tersebut masih lebih baik dan terkendali sehingga capaian pada Triwulan IV masihi “**Sangat Baik**” karena masih masuk pada *range* capaian 100-110%.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk pengawasan Pangan Olahan berisiko di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kriteria Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	88.95	97.75	 Akan Tercapai

Dengan target angka menengah sebesar 91% dan realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 88.95% menjadikan capaian sebesar 97.75% atau masuk pada kriteria capaian **Akan Tercapai**. Dengan demikian pada tahun berikutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali kinerjanya dalam melakukan

pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan berbasis risiko serta tindak lanjutnya, khususnya berkaitan dengan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian pada sarana oleh pelaku usaha sehingga kinerja yang baik tersebut dapat ditingkatkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88.95	104.65
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	91	100	109.89
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	90	97.67	108.52

Tabel diatas menyajikan data realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Realisasi ketiga unit kerja tersebut, semuanya masuk pada kategori yang sama yaitu sangat baik (100-110%). Namun demikian pada capaian kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan kembali pada tahun berikutnya, mengingat capaian yang diperoleh masih terdapat peluang cukup besar untuk dilakukan peningkatan. Hal ini menjadi pemicu perbaikan kembali pada kinerja tahun berikutnya agar lebih baik lagi, meskipun dalam kategorisasi capaian masih masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Telah dilakukannya kegiatan sosialisasi pedoman tindak lanjut yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap potensi risiko ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan
- Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yaitu setiap bulan sehingga memungkinkan dilakukan intervensi dan koreksi dengan

segera sebelum terjadinya potensi risiko kegagalan kinerja seperti keterlambatan pelaporan oleh petugas.

- c. Adanya alokasi anggaran dan sumber daya lain yang tepat sesuai dengan jumlah target sarana dan kompetensi petugas sehingga dapat dilakukan pemeriksaan sarana dengan sesuai pedoman dan rencana pelaksanaan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 6 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP yang tidak sesuai dengan pedoman	Dilakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan	Dilakukan Bimtek Tindak Lanjut Pengawasan Pangan terhadap petugas	TW II 2026	Y	S01.1 0.03	Kompetensi petugas belum memadai (Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman)

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,95	104,65	194.789.000	194.644.444	99,93

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realiasi kinerja adalah sebesar

Rp.194.644.444,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.194.789.000,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99.93%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	100	194.789.000	194.644.444	99,93

Realisasi rincian *output* yang mendukung pencapaian target IKU sebanyak 86 sarana distribusi pangan sesuai dengan target Tahun 2025 sehingga capaian *output* sebesar 100% yaitu sesuai target RO sebanyak 86 sarana peredaran pangan yang telah diperiksa sepanjang 2025.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL. KOSMETIKA. SUPLEMEN KESEHATAN. PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	9.325.500	9.320.420	99,95
2	INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN MENJELANG IDUL FITRI DAN NATAL	15.863.000	15.801.000	99,61
3	INTENSIFIKASI PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PROGRAM UNIT PUSAT	7.727.000	7.722.500	99,94

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

- Kegiatan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
- Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan sarana distribusi pangan menjelang hari raya besar keagamaan dalam giat intensifikasi pengawasan pangan

- Tindak lanjut hasil pengawasan unit Pusat dalam mengawal keamanan pangan terkait isu-isu keamanan pangan yang berkembang di masyarakat.

11

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Iklan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi Sesuai Ketentuan adalah:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

i) Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

ii) Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

1. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah Iklan yang selesai diawasi/ jumlah target Iklan pengawasan sesuai Renlak) X 100%
2. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah Iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah Iklan yang selesai diawasi) X 100%
3. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan Iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah Iklan yang selesai diawasi/ jumlah target Iklan pengawasan sesuai Renlak) X 100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah Iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah Iklan yang selesai diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan Iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase Iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- Rerata persentase capaian pengawasan Iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan Iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4).
- Persentase capaian pengawasan Iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah Iklan per media / jumlah target per media) x 100%.

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

E. Persentase Iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah Iklan yang diawasi/ jumlah target Iklan sesuai Renlak) X 40%

- b. Kesesuaian proporsi media Iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah Iklan yang diawasi per media Iklan/jumlah Iklan yang diawasi) / proporsi target media) X 20%
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah Iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah Iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka *real*

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.99	107.13	107.13	Sangat Baik

Jumlah Realisasi Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan Iklan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan total sejumlah 971 Iklan dengan rincian *output* sebagai berikut:

1. Iklan Obat 171
2. Iklan Obat Bahan Alam 112
3. Iklan Suplemen Kesehatan 60
4. Iklan Kosmetik 356
5. Iklan pangan 272

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas pada Triwulan IV realisasi 98.99%. Target indikator ini mengalami perubahan pada bulan Agustus 2025 dari 88% meningkat menjadi 92.4% dan berlaku sejak Triwulan IV. Jika realisasi dibandingkan terhadap target tahun 2025 memperoleh angka capaian sebesar 107.13% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan yang bersangkutan dengan realisasi Triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.21	112.74
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	88	99.92	113.55
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	92.40	97.68	105.71
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	92.40	98.99	107.13

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di Triwulan III tetap lebih rendah dibandingkan realisasi Triwulan I dan II. Kenaikan realisasi dibandingkan dengan Triwulan III sebesar 1.31%, dan jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan II mengalami penurunan sebesar 0.93%. Penurunan realisasi saat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I sebanyak 0.22%.

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator kinerja "Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan" merupakan indikator baru yang tidak tersedia atau tidak diukur pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data pada tahun 2025 ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi berisiko di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kriteria Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97	98.99	102.05	 Tercapai/ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan IV tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra) menunjukkan capaian sebesar 102.05%, dengan kriteria tercapai/melampaui. Hal ini kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga dapat memberikan kajian dan masukan dalam penetapan target serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul. Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.99	107.13
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	92.4	98.62	106.73
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	89.1	89.41	100.35

Dalam hal perbandingan kinerja antar unit kerja yang sejenis, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh realisasi dan capaian tertinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo. Jika dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM di Jayapura capaian BBPOM di Palangka Raya lebih tinggi sebesar 0,4% dan jika dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM di Gorontalo capaian BBPOM di Palangka Raya lebih tinggi sebesar 6.78%.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal dikarenakan jumlah iklan yang terbatas (Ketepatan proporsi)	Melakukan koordinasi dengan dengan media penyiaran lokal (RRI)	Melakukan koordinasi deng unit pengampu untuk revisi target media penyiaran lokal dialihkan ke media lain	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S01.11.02	Tidak tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal dikarenakan iklan tidak ada yang ditayangkan (Ketepatan proporsi)

Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Terealisasinya jumlah pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu.
2. Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas sampling dan iklan melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja.
3. Telah tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal.
4. Tidak ada kendala pelaporan di SIPT.
5. Telah disetujui usulan perubahan target bulan Agustus 2025 sehingga kriteria capaian sangat baik.

Adapun kendala dalam pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi adalah:

1. Tidak tercapainya target pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan di media penyiaran lokal (radio) pada bulan Mei dan Agustus masing - masing 1 Iklan.
2. Tidak tercapainya pemenuhan Iklan pada media elektronik (televisi) dan Iklan pada media *online* per kategori pangan (terutama kategori 13).

Rekomendasi penyempurnaan kinerja :

- Konsisten menjaga realisasi pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan setiap bulan sesuai dengan yang direncanakan.
- Melakukan koordinasi ke media penyiaran lokal (radio) terkait Iklan Suplemen Kesehatan.
- Mengajukan permohonan ke unit pengampu di pusat revisi target media Iklan di Triwulan IV.

E. Analisis program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.99	107.13	6.270.000	6.270.000	100.00

Anggaran yang digunakan untuk melakukan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 adalah Rp. 6.270.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.270.000 sehingga capaian realisasi anggaran adalah 100.00%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	339	100.89	402.118.000	401.828.887	99.93

Anggaran Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan terdapat pada rincian *output* Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan makanan yang diperiksa oleh UPT. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan iklan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sejumlah 971 iklan dengan rincian *output* sebagai berikut:

- Iklan Obat 171
- Iklan Obat Bahan Alam 112
- Iklan Suplemen Kesehatan 60
- Iklan Kosmetik 356
- Iklan pangan 272

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGAWASAN LABEL HALAL. PENANDAAAN OMKA/ROKOK SERTA MONITORING HARGA	3.622.500	3.622.500	100.00
2	PENGAWASAN PERIKLANAN OMKA/ROKOK SERTA MONITORING HARGA	2.647.500	2.647.500	100.00

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
2. Pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan.
3. Kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan di SIPT pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Selain program/kegiatan tersebut diatas, terdapat juga beberapa program/kegiatan yang juga memberikan pengaruh dalam pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

- Pengisian RHPK secara benar dan tepat waktu. RHPK tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara *online* bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara *online* bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan, pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, dan pengawasan daftar kandungan rokok elektronik.

Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung budaya hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus :

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan = $\frac{A}{A+B2}$
ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Keterangan :

- A : Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
- B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan :

1. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.

2. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
3. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kategori Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,6	102,82	Sangat Baik

Selama tahun 2025, jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sebanyak 210 label terdiri dari 207 rokok konvensional dan 3 rokok elektronik. Dari pengawasan sebanyak 207 label tersebut, persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label 100% (A) dan persentase ketepatan waktu pelaporan label 87.14% (B). Persentase ketepatan waktu pelaporan tidak memperoleh nilai maksimal disebabkan adanya keterlambatan penyampaian laporan melalui SIPT sebanyak 27 label.

Dari 2 (dua) aspek perhitungan, dapat dihitung persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{A+B}{2} \\
 &= \frac{100\%+87.14\%}{2} \\
 &= 93.57\%
 \end{aligned}$$

Rata-rata dari realisasi 2 (dua) aspek penilaian tersebut adalah merupakan nilai realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu sebesar 93.57%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 91%, maka akan memberikan angka capaian 102.82% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator

kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	n/a	n/a	n/a
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	n/a	n/a	n/a
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	91	91,92	101,01
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	91	93,6	102,82

Pada awal pembahasan/desk indikator ini belum disampaikan baik oleh unit pengampu maupun Biro Perencanaan dan Keuangan dan baru muncul pada desk/pembahasan kedua pada bulan Agustus 2025 dan mulai dilakukan penghitungan bulan tersebut. Realisasi kinerja Triwulan IV meningkat dibandingkan dengan Triwulan III dengan kriteria yang sama yaitu **Sangat Baik**.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Indikator ini juga merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya hasil realisasi dan capaian ini akan menjadi *baseline* dan monev untuk target PK dan RAPK tahun 2026.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kriteria Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95	93,57	98,49	 Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 95%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 93.57% akan memberikan angka capaian sebesar 98.49% dengan kategori **Akan Tercapai**. Upaya-upaya untuk mencapai target secara konsisten telah dilakukan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap aspek kesesuaian realisasi dengan target pengawasan maupun ketepatan pelaporan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Target	Target
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93.57	102.82
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Target	Target
	91	100	109.89
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Target	Target
	85	89.93	105.80

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi “persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” tahun 2025 jika dibandingkan dengan UPT lain dalam 1 klaster, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo, realisasi tertinggi adalah Balai Besar POM di Jayapura sebesar 100% dan Balai Besar POM di Gorontalo memperoleh realisasi terendah sebesar 89.93%. Namun demikian seluruh UPT, termasuk Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh capaian di atas 100% dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan kategori seluruhnya **Sangat Baik**. Untuk capaian indikator ini, paling tinggi adalah Balai Besar POM di Jayapura dan paling rendah Balai Besar POM di Palangka Raya.

Penetapan target masing-masing UPT berbeda berdasarkan *baseline* data pengawasan label produk tembakau yang sebelumnya telah menjadi tugas rutin namun belum mempunyai indikator kinerja. Target Balai Besar POM di Palangka Raya dan Balai Besar POM di Jayapura sama sebesar 91%, sedangkan target Balai Besar POM di Gorontalo lebih rendah yaitu sebesar 85%.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Timeline label produk tembakau dan atau rokok elektronik tidak tercapai	Meningkatkan monev	Monitoring pelaporan pengawasan label tembakau melalui SIPT	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S01-12.01	Pelaporan tidak tepat waktu

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah :

- Pemenuhan jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
- Tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai serta tersedianya *tagging* anggaran untuk pembelian sampel produk tembakau dan rokok elektronik

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan. Pada tahun 2025 terdapat 27 (dua puluh tujuh) pelaporan pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak tepat waktu.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,57	102,82	6.270.000	6.270.000	100,00

Berdasarkan data pada Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 91% dan terealisasi sebesar 93.57%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 102.82%. Hal ini didukung dengan penggunaan alokasi anggaran sebesar Rp.6.270.000,00 dengan realisasi 100%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	339	100,89	402.118.000	401.828.887	99,93

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar didukung oleh anggaran dengan kode 3165.QIC.004 dengan capaian realisasi anggaran total sebesar 99.93%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGAWASAN LABEL HALAL. PENANDAAAN OMKA/ROKOK SERTA MONITORING HARGA	3.622.500	3.622.500	100,00
2	PENGAWASAN PERIKLANAN OMKA/ROKOK SERTA MONITORING HARGA	2.647.500	2.647.500	100,00

Mata anggaran dengan kode 3165.QIC.004 dengan rincian output “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT” merupakan rumah besar untuk mendukung indikator ini dengan 2 sub komponen yang mendukung secara langsung yaitu “Pengawasan Label Halal, Penandaan Omka/Rokok serta Monitoring Harga dan “Pengawasan Periklanan OMKA/Rokok serta Monitoring Harga” dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini dengan didukung anggaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik masing-masing sebanyak 1 (satu) kemasan terkecil dengan dukungan anggaran yang tersedia, untuk keperluan pengawasan label.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengawas penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga pemahaman petugas terhadap teknis pengawasan, target, dan *timeline* pelaporan meningkat.

Namun demikian pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran yang mengakibatkan beberapa RO tidak mencukupi anggarannya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada RO lain tersebut, dilakukan penambahan kegiatan pada RO QIC walaupun secara *tagging* anggaran belum sesuai. Beberapa penambahan kegiatan lain pada RO QIC sebagai berikut:

- Penyebaran Informasi dalam rangka peningkatan indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat.
- Desk Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- Kegiatan Pengawasan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE terhadap Gen Z/Anggota Pramuka/Kegiatan KIE lainnya.
- Koordinasi Program Pro Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Smart Laura.
- Rapat Koordinasi Regional Balai Dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan di Balikpapan.

13

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	102.16	102.16	102.16	Sangat Baik

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM yang disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Surabaya, Desember 2024, mengingat isu ini telah menjadi perhatian

strategis global. Oleh karena itu, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan mewujudkan komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) spesifik untuk memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan. Melalui proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029, muncul indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025, seluruh unit kerja diinstruksikan untuk merevisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Hal ini bertujuan untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029, termasuk pengintegrasian indikator tersebut.

Pengukuran Indikator Kinerja **Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT** dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan target sebesar 100%. Penilaian indikator tersebut pada level UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan pada beberapa parameter kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan apotek dengan menggunakan *tools* pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian *tools* antibiotik pada pemeriksaan Apotek.
- Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali).
- Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali).
- Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (target 2 kali).

Indikator ini mulai dihitung pada triwulan III. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemeriksaan apotek sebanyak 55 dengan menggunakan *tools* pengawasan antibiotik dan diperoleh persentase penggunaan *tools* AMR sebesar 108.63%.
- Pelaksanaan bimbingan teknis penanggung jawab apotek di Kabupaten Kotawaringin Timur pada triwulan IV (B). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.
- Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba telah dilakukan dan berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025 (C). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.
- Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 2 kali pada akhir triwulan III dan triwulan IV (D). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 2 kali maka akan memberikan capaian 100%.

Berdasarkan realisasi kegiatan di atas, maka indikator **Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT** dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pemenuhan Target} &= 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D \\ \text{Pengendalian AMR di Wilayah UPT} &= \frac{108.63\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4} \\ &= 102.16\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 sebesar 100%, maka akan memberikan angka capaian kinerja sebesar 102.16%.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	n/a	n/a	n/a
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	n/a	n/a	n/a
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	n/a	n/a	n/a
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	100	102.16	102.16

Indikator ini dihitung pada akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi tiap triwulan.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Indikator ini juga merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	102.16	102.16	 Tercapai/ Melampaui

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 100%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 102.16% akan memberikan angka capaian yang sama dengan angka realisasi sebesar 102.16% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Upaya-upaya untuk mencapai target secara konsisten telah dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah provinsi terkait pengendalian resistensi antimikroba dan telah berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan resistensi antimikroba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan menurunkan angka penyerahan antibiotik tanpa resep di apotek.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	100	102.16	102.16
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	100	104.44	104.44
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	104.28	104.28

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT tahun 2025 pada klaster terkait menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura mencapai realisasi tertinggi sebesar 104.44%. Sementara Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh realisasi terendah sebesar 102.16%. Meskipun demikian, seluruh UPT dalam klaster tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan capaian di atas 100% dan predikat kategori **Sangat Baik**.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	Pemeriksaan dan Pelaporan SIPT sarana apotek yang dilakukan petugas tidak menggunakan form AMR	Mening-katkan monev	Monitoring penyiapan form	Triwulan IV	Y	S01-13.01	Pemeriksaan dan pelaporan SIPT sarana apotek yang dilakukan petugas tidak menggunakan form AMR
	Kurangnya peserta yang hadir dalam kegiatan	Mening-katkan monev	Monitoring konfirmasi peserta yang diundang	Triwulan IV	Y	S01-13.02	Jumlah peserta bimtek kurang dari 30

Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2025 yaitu sebesar 102.16% dipengaruhi oleh beberapa aspek/kegiatan yang menjadi komponen penghitungan, sebagai berikut:

1. Penggunaan tools pengawasan antibiotik pada pemeriksaan apotek dan pelaporannya pada aplikasi SIPT
2. Pelaksanaan bimbingan teknis penanggung jawab apotek di Kabupaten Kotawaringin Timur pada triwulan IV
3. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba telah dilakukan dan berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025
4. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 2 kali pada akhir triwulan III dan triwulan IV

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Badan POM (pusat) sebagai penilaian capaian terhadap indikator kinerja maupun indikator pada peta jalan. Pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan ini dilakukan melalui sistem aplikasi pelaporan elektronik. Data yang dilaporkan merupakan instrumen penting dalam memantau kinerja Badan POM secara nasional dalam melaksanakan program pengendalian AMR serta memantau efektivitas intervensi UPT dalam mendukung sasaran strategis Badan POM.

Penggunaan *tools* antibiotik dilaporkan melalui aplikasi SIPT 3.0 sekaligus sebagai pelaporan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian/apotek. Pada SIPT pelaporan hasil pemeriksaan antibiotik bagian langkah 8 “Antibiotika”. Sedangkan kegiatan lainnya disertai data dukung dilaporkan melalui link: <https://linktr.ee/MonevKegiatanAMR>.

Pelaporan kegiatan yang diinput melalui link: <https://linktr.ee/MonevKegiatanAMR> dilaporkan tiap triwulan maksimal tanggal 5 setiap bulan pertama triwulan berikutnya. Data pelaporan akan disampaikan kepada masing-masing UPT dan dibuka akses dalam batas waktu tertentu untuk dapat diverifikasi capaian dari setiap kegiatan sebelum dilaporkan sebagai data final capaian UPT.

Guna mengoptimalkan kinerja pada periode mendatang, aspek yang menjadi prioritas pengembangan adalah penggunaan instrumen (*tools*) antibiotik pada pemeriksaan apotek. Tercatat realisasi pada aspek tersebut pada tahun 2025 sebesar 86.90%. Sementara nilai aspek lainnya telah mencapai nilai maksimal sebesar 100%.

Upaya peningkatan kinerja ke depan yang dapat dilakukan adalah pada aspek penggunaan *tools* antibiotik dan pelaporannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemeriksaan apotek harus dipastikan menggunakan tools antibiotik dan pengisiannya dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM.
2. Seluruh pemeriksaan apotek harus dipastikan dilaporkan melalui SIPT. Untuk mendapatkan data observasi terbaik dan sebagai penilaian penggunaan tools AMR pada indikator kinerja UPT, maka wajib menjawab setiap pertanyaan pada tools antibiotik sesuai hasil pemeriksaan pada apotek.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	102.16	102.16	41,443,750	41,430,343	99.97

Berdasarkan data pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT, target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 102.16%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 102.16%. Dengan target rincian *output* berupa Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT dan sub komponen “Pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian”.

Indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT didukung oleh anggaran dengan kode 3165.QIC.004 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.97%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	339	100.89	402,118,000	401,828,887	99.93

Target rincian output Sarana Distribusi Obat Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT sebanyak 336 sarana dengan realisasi sebanyak 339 sarana, diantaranya adalah pemeriksaan apotek sebanyak 55 sarana yang mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Realisasi anggaran total pada RO ini sebesar Rp. 401,828,887.00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.402,118,000.00 dengan capaian 99.93% membuktikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan kegiatan serta perhitungan kebutuhan anggaran.

Namun demikian, pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran yang mengakibatkan beberapa RO tidak mencukupi anggarannya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada RO lain tersebut, dilakukan penambahan kegiatan pada RO QIC walaupun secara tagging anggaran belum sesuai. Beberapa penambahan kegiatan lain pada RO QIC sebagai berikut:

1. Penyebaran Informasi dalam rangka peningkatan indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat
2. Desk Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
3. Kegiatan Pengawasan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE terhadap Gen Z/Anggota Pramuka/Kegiatan KIE lainnya
5. Koordinasi Program Pro Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Smart Laura
6. Rapat Koordinasi Regional Balai Dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan di Balikpapan

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN	41,443,750	41,430,343	99.97

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan tagging anggaran sub komponen "Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan

fasilitas Pelayanan Kefarmasian” dengan realisasi anggaran sebesar 99.97%. Rincian kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator ini antara lain :

1. Penggunaan *tools* pengawasan antibiotik pada pemeriksaan apotek dan pelaporannya pada aplikasi SIPT
2. Pelaksanaan bimbingan teknis penanggung jawab apotek di Kabupaten Kotawaringin Timur pada triwulan IV
3. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba telah dilakukan dan berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025
4. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 2 kali pada akhir triwulan III dan triwulan IV

14

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. *Grand Design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 2024-2025 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM salah satunya melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM pada 4 komponen penilaian antara lain pemenuhan Standar Ruang Lingkup, pemenuhan Standar Kompetensi, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Pemenuhan SKL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 dengan pembagian dan fungsi sebagai berikut :

a. Tingkat 4 : Laboratorium Balai Regional

Terdiri dari 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya.

b. Tingkat 3 : Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat Provinsi

Terdiri dari sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang berada di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya termasuk dalam laboratorium tingkat 3.

c. Tingkat 2 : Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 : Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Komponen dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM pada laboratorium tingkat 3 sebagai berikut :

- 1) Standar Ruang Lingkup (SRL);
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode Analisis yang terverifikasi.

Cara perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 =

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL Biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	76.6	105.66	105.66	Sangat Baik

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pada tahun 2025 didapatkan hasil penilaian sebesar 76.6 dengan capaian sebesar 105.66% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 72.5 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.50	75	107.91
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	71	75.30	106.06
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	72	75.50	104.86
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	72.5	76.6	105.66

Perbandingan realisasi kinerja triwulan pada tahun 2025, menunjukkan adanya peningkatan realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium setiap triwulannya. Pada triwulan IV terdapat peningkatan realisasi sebesar 1.10 jika dibandingkan dengan triwulan III.

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	79	83	105.06
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	84	86.22	102.64
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	86.42	88.57	102.49
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	72.5	76.6	105.66

Tahun 2025 merupakan periode awal renstra 2025-2029, jika dibandingkan dengan tahun periode renstra sebelumnya yaitu pada tahun 2022-2024, terdapat penurunan target renstra dan peningkatan capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Adanya penyesuaian target pada periode renstra 2025-2029 disebabkan oleh perubahan *tools* penilaian yang didasarkan *baseline* realisasi tahun 2024 dan perbedaan proporsi penilaian pada tiap komponen penilaian, mulai dari standar ruang lingkup, standar kompetensi, standar peralatan dan standar metode terverifikasi.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100	76.6	76.60	 Akan Tercapai

Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah terealisasi 76.6 pada tahun 2025 dengan capaian 76.60% terhadap target jangka menengah (Renstra) dengan kriteria **Akan Tercapai**.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	76.6	105.66
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	70	73.5	105.00
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	65.1	69.7	107.07

Hasil perbandingan realisasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Palangka Raya terhadap unit kerja sejenis antara lain BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo menunjukkan bahwa ketiga unit kerja memiliki tingkat capaian kinerja yang relatif sebanding, dengan rentang capaian antara 105.00% sampai dengan 107.07%. Hal ini mencerminkan bahwa pemenuhan standar laboratorium pada ketiga UPT telah mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa proses penguatan kompetensi laboratorium, pemenuhan sarana prasarana, serta penerapan standar mutu pengujian telah berjalan efektif. Apabila dilihat dari target yang ditetapkan BBPOM di Palangka Raya memiliki target yang tertinggi dengan realisasi tertinggi dari kedua unit kerja sejenis.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Kerusakan alat/instrumen di Laboratorium	Membuat jadwal pemeliharaan alat melalui kalibrasi antara dan verifikasi alat	Melakukan kalibrasi antara dan verifikasi alat yang sesuai dengan jadwal	TW 1 2026	Ya	S03.01.01	Kerusakan alat/instrumen di Laboratorium
	Reagen/media/ baku pembanding/ bahan habis pakai untuk melakukan verifikasi metode tidak tersedia	Melaksanakan stok opname secara berkala	Hasil stok opname digunakan untuk perencanaan pengadaan Reagen/ media/baku pembanding/bahan habis pakai uji verifikasi metode	TW 4 2026	Tidak	-	-
	Keterbatasan kompetensi SDM dalam melaksanakan verifikasi metode	Merencanakan program pengembangan kompetensi SDM menyesuaikan dengan verifikasi metode	Menyelenggarakan bimbingan teknis internal masing-masing komoditi	TW 4 2026	Tidak	-	-

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan antara lain terselenggaranya program uji verifikasi metode pada triwulan IV 2025 sesuai dengan perencanaan pada *roadmap* pemenuhan standar kemampuan laboratorium, hal ini meningkatkan nilai pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup dan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi TW IV 2025
Ruang Lingkup	OBA : penambahan 1 standar ruang lingkup Mikrobiologi : penambahan standar 4 ruang lingkup
Peralatan	-
Kompetensi	Menyesuaikan kegiatan verifikasi metode yang dilakukan
Metode Analisis Terverifikasi	Kosmetik : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Pangan : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Mikrobiologi : penambahan 2 metode analisis terverifikasi

Berdasarkan perhitungan, Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

dengan mencapai realisasi sebesar 76.6 dan capaian sebesar 105.66% dengan kriteria capaian terhadap target **Sangat Baik**.

Komposisi penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang diperoleh sebagai berikut :

- Nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 80.5
- Nilai pemenuhan Peralatan sebesar 78.6
- Nilai pemenuhan Kompetensi sebesar 90
- Nilai pemenuhan Metode Analisis Terverifikasi 26.2

Pencapaian target kinerja didukung oleh perencanaan pemenuhan standar kemampuan Laboratorium yang disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti tersedianya reagensia, media, baku pembanding, alat laboratorium, ketersediaan suku cadang, bahan habis pakai serta program pemeliharaan alat.

Perencanaan ini disusun dalam bentuk *Roadmap* pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang akan dilaksanakan setiap bulan dan dievaluasi setiap akhir triwulan.

Selain perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi terhadap *roadmap* pemenuhan SKL yang disusun, pengendalian terhadap faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator telah dilakukan dengan baik. Pengendalian yang dilakukan antara lain:

1. Pengendalian risiko terhadap kerusakan alat
2. Tidak tersedianya reagensia, media, baku pembanding, suku cadang serta alat gelas
3. Tidak terlaksananya kalibrasi alat laboratorium
4. Tidak terpenuhinya kompetensi personel

Pengendalian-pengendalian tersebut telah diakomodir melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang mendukung pemenuhan SKL telah terlaksana pada triwulan III melalui kegiatan bimbingan teknis internal pengujian. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengendalikan faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar	72.5	76.6	105.66	5,975,506,000	5,914,066,176	98.97

Kemampuan Laboratorium						

Pencapaian indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,979,506,000 dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 5,914,006,176 dengan persentase 98.97%

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	1	1	100.00	1,707,506,000	1,646,068,706	96.40
Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	1	1	100.00	4,268,000,000	4,267,997,470	100.00

Pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh 2 rincian output antara lain Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* dengan realisasi output telah mencapai target dan persentase realisasi anggaran sebesar 96.40 % dan rincian output yang kedua yaitu Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yang dengan realisasi *output* telah mencapai target dan persentase realisasi anggaran sebesar 100%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMENUHAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BBPOM	60,915,000	60,912,100	100.00
2	OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	141,750,000	80,406,834	56.72
3	PENGADAAN GLASSWARE	88,508,000	88,507,480	100.00
4	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	385,868,000	385,866,868	100.00
5	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	61,525,000	61,524,414	100.00
6	PENGADAAN SUKU CADANG PENGUJIAN	700,763,000	700,762,223	100.00
7	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	6,944,000	6,925,500	99.73
8	PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENGUJIAN	2,491,000	2,489,753	99.95
9	PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN	49,368,000	49,361,000	99.99

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
10	REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	2,013,000	2,012,400	99.97
11	UJI PROFISIENSI/KOLABORASI/KEMANDIRIAN BALAI DAN PENYUSUNAN METODA ANALISA LABORATORIUM	79,871,000	79,870,106	100.00
12	SURVEILAN KAN BSN	6,500,000	6,500,000	100.00
13	OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA FOOD SECURITY	55,109,000	55,103,776	99.99
14	KOORDINASI DALAM RANGKA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	9,001,000	9,000,500	99.99
15	KOORDINASI DALAM RANGKA RANGKA PENINGKATAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM DAN PENERAPAN GREENLABORATORY	56,880,000	56,825,752	99.90
16	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	3,581,520,000	3,581,519,470	100.00
17	PENGADAAN PENAMBAH NILAI ALAT LABORATORIUM	686,480,000	686,478,000	100.00
18	BLOKIR ANGGARAN	0	0	n/a

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium, Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, keandalan sarana prasarana, serta peningkatan mutu dan kompetensi laboratorium. Kegiatan tersebut meliputi pemenuhan kemampuan laboratorium, operasional dan pengelolaan laboratorium, pengadaan *glassware*, pemeliharaan dan rekalisasi alat laboratorium, pengadaan baku pembanding, pengadaan suku cadang dan alat pendukung pengujian, serta pengadaan alat laboratorium dan alat penambah nilai. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan peralatan yang laik fungsi, tertelusur secara metrologi, dan sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan.

Selain penguatan sarana prasarana, pencapaian nilai pemenuhan laboratorium didukung melalui kegiatan peningkatan mutu pengujian dan kompetensi laboratorium melalui uji profisiensi, kolaborasi dan serta kegiatan verifikasi metode sebagai jaminan mutu internal dan eksternal terhadap hasil uji. Di sisi lain, kegiatan koordinasi pengujian sampel regionalisasi, koordinasi peningkatan standar kemampuan laboratorium, serta penerapan konsep *Green Laboratory* turut memperkuat sinergi antar unit dan memastikan keberlanjutan pengelolaan laboratorium yang efisien dan ramah lingkungan.

Guna mendukung kegiatan operasional laboratorium, dilaksanakan kegiatan laboratorium keliling dalam rangka *food security*, serta kegiatan penunjang sumber daya manusia berupa pemeriksaan kesehatan risiko pekerjaan dan penambah daya tahan tubuh pegawai. Meskipun terdapat penyesuaian akibat

blokir anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap diprioritaskan pada program strategis yang berdampak langsung terhadap pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Secara keseluruhan, rangkaian program dan kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pengujian, pemenuhan persyaratan teknis, serta penguatan sistem manajemen mutu laboratorium sehingga mendukung pencapaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium secara berkelanjutan.

15

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Dalam upaya mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Mendukung Revitalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA), BPOM menginisiasi program Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten/Kota Pangan Aman dan telah menyusun *tools* penilaian mandiri untuk kabupaten/kota dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menyelenggarakan kegiatan terpadu tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini didasari pula terkait beberapa isu/kebijakan pemerintah maupun isu global yang menyatakan bahwa keamanan pangan sangat berkontribusi besar terhadap penurunan *stunting* (PerPres No. 72 Tahun 2021), *Sustainable Development Goals/SDGs*, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan antara lain:

- Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan keamanan pangan di daerah
- Mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
- Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria keberhasilan pendampingan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- Kabupaten/Kota mengirimkan *tools* penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Penghitungan indikator kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dihitung dari Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kabupaten/Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif

d. Formula perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100.00	100.00	Sangat Baik

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan yang sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2025, kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Utara ditetapkan sebagai kabupaten/kota target pendampingan pengisian *tools* dan data dukung penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Penetapan wilayah tersebut didasarkan pada hasil *desk monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya.

Tahun 2025 merupakan tahun perdana pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh BBPOM di Palangka Raya, yang sekaligus ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh tahapan kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman telah diselesaikan terhadap 2 (dua) wilayah target tahun 2025.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan Advokasi kepada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak dan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Tahapan selanjutnya adalah *Desk Pendampingan Monitoring* serta *Evaluasi Pengisian Tools* dan *Data dukung* yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 26 Agustus 2025 dan 26 September 2026.

Berdasarkan hasil pendampingan tersebut, Kota Palangka Raya memperoleh nilai sebesar 96.37 dan Kabupaten Barito Utara memperoleh nilai sebesar 78.85. Seluruh laporan kegiatan pendampingan kepada kabupaten/kota target telah disampaikan tepat waktu kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Indikator Persentase capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 terealisasi sebesar 100% (2 kabupaten/kota yang didampingi terhadap 10 kabupaten/kota yang menjadi lingkup wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya) dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pendampingan dalam pengisian

tools dan data dukung berjalan secara **efektif dan responsif** dalam mendukung upaya Badan POM mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	n/a	n/a	n/a
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	n/a	n/a	n/a
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	n/a	n/a	n/a
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	20	20	100.00

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Sehubungan dengan statusnya sebagai IKU baru per Juli 2025, realisasi kinerja tahun ini tidak memiliki data pembanding dengan triwulan maupun tahun sebelumnya. Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif hingga akhir periode Renstra tahun 2029. Selain itu, indikator ini juga berkontribusi langsung terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	20	20.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif hingga akhir periode Renstra 2025-2029. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama, capaian jangka menengah sebesar 20% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Hal ini kedepannya akan menjadi acuan analisis dan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko dalam tahapan pendampingan oleh UPT. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menyusun langkah strategis demi menyempurnakan pelaksanaan program sehingga target Renstra 2025-2029 dapat tercapai.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	20	20	100.00
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	5,88	5,88	100.00
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	16,67	16,67	100.00

Penilaian terhadap indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman (nilai minimal 60) dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota di wilayah kerja UPT. Indikator ini merupakan bentuk komitmen nasional yang pencapaiannya dapat diperbandingkan antar UPT.

Data menunjukkan bahwa BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai target 100%. Di antara ketiga UPT tersebut, BBPOM di Palangka Raya memiliki target yang paling besar. Keberhasilan setiap UPT tergantung pada strategi penetapan target yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kabupaten/kota, baik komitmen potensi dan kelemahan yang dimiliki serta jumlah kabupaten/kota yang menjadi lingkup wilayah kerja masing-masing. Hal ini menjadi bahan perbandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan capaian pada periode mendatang. Langkah strategis perlu disusun dengan mempertimbangan faktor internal dan

eksternal yang mendukung keberhasilan program, sebagaimana telah diimplementasikan oleh BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan salah satu IKU baru pada tahun 2025, dan pelaksanaannya baru dijalankan pada triwulan III. Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terhadap target intervensi, yaitu:

1. Advokasi Pemerintah daerah dan Operasional Perangkat Daerah (OPD)
Kegiatan ini dilaksanakan kepada seluruh kabupaten/kota yang menjadi lingkup kerja BBPOM di Palangka Raya, yaitu 10 kabupaten/kota. Tahun 2025 ini, dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Juli 2025 dan dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) peserta
2. Desk Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri dan Data Dukung
Tahapan *desk* pendampingan pengisian *tools* penilaian mandiri dan data dukung dilakukan dalam 2 (tahapan), yaitu *desk* pendampingan tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 dan tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025 di aula BBPOM di Palangka Raya
3. Pelaporan
Tahapan pelaporan hasil pendampingan kabupaten/kota pangan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan. Pelaporan hasil pendampingan ini berisikan hasil pendampingan terhadap 2 kabupaten/kota yang menjadi target intervensi, yaitu Kota Palangka Raya dengan hasil 96.37 dan Kabupaten Barito Utara dengan hasil 78.85

Keberhasilan Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Palangka Raya dalam ketepatan pengisian tools dan data dukung selama periode penilaian mandiri
2. Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti ketidaktepatan pengisian tools dan data dukung serta keterlambatan pelaporan/input hasil data dukung.

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program Keamanan Pangan secara mandiri dan berkelanjutan	Melakukan audiensi kepada pemerintah daerah dan <i>stake holder</i> terkait	Mengintensifkasikan kegiatan koordinasi dan advokasi program Penilaian Kabupaten/kota Pangan Aman seluruh kabupaten/ kota di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	2026	T	-	Tidak ada Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pengisian <i>tools</i> dan data dukung penilaian kabupaten/ kota pangan aman
	Program Keamanan Pangan bukan menjadi program prioritas			2026	T	-	OPD terkait belum memahami kesesuaian data dukung yang harus dilengkapi dalam pengisian <i>tools</i> penilaian

Pencapaian kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman perlu peningkatan kedepannya sekaligus mengatasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaannya, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan evaluasi dan analisis *gap* capaian hasil *desk* pendampingan penilaian mandiri oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan tim verifikator pusat. Mengingat terdapat *gap* yang cukup besar yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja utama Badan POM.
2. Mengembangkan inovasi yang mampu menyediakan sarana pendampingan secara intensif dan berkelanjutan kepada kabupaten/kota yang menjadi target intervensi sehingga pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan setiap waktu dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dimanapun dan kapanpun sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya inovasi ini kedepannya dapat mengatasi risiko keterbatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan kepada kabupaten/kota secara intensif serta wadah penyediaan informasi terkait kebutuhan kabupaten/kota pangan aman dalam upaya pemenuhan *tools* penilaian dan data dukung.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100.00	26,342,400	24,826,886	94.25

Realisasi anggaran tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 24,826,886,- (94.25%) dari total alokasi Rp. 26,342,400,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebesar 100% (dari sasaran 20% kabupaten/kota yang didampingi). Serapan anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan *desk* pendampingan tahap I dan II, yang mencakup biaya konsumsi serta perjalanan dinas dalam rangka audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Audiensi tersebut merupakan langkah awal strategis untuk memperkenalkan program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	100.00	497,082,000	480,446,621	96.65

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	24,845,400	24,826,886	99.93
2	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	1,497,000	0	0.00

Sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru, Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum memiliki alokasi anggaran khusus. Saat ini, anggaran indikator tersebut dimasukkan dalam Rincian *Output*, Sampel Makanan yang diperiksa UPT, dengan sub komponen Pengadaan sampel makanan dan Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan. Perencanaan penganggaran baru dapat dilakukan pada triwulan III sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode mendatang, perlu penyesuaian *tagging* anggaran melalui penyediaan subkomponen Pendampingan Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Koordinasi Lintas Sektor agar selaras dengan Definisi Operasional (DO) IKU tersebut.



Sasaran Kegiatan

*Meningkatnya Efektivitas
Pengawasan Sarana Produksi
Pangan Fortifikasi*

Sasaran Kegiatan II yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

16

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100.00	100.00	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan				100.00	100.00	Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, maka cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi hanya dilakukan terhadap 1 sarana tersebut.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Tindak lanjut yang dilakukan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan olahan.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	100.00	Baik

Indikator ini menunjukkan kinerja **Baik** dan berhasil mencapai target secara sempurna, dimana realisasi mencapai 100% terhadap target 100%. Capaian sempurna ini dikategorikan **Baik**. BBPOM di Palangka Raya menunjukkan efisiensi waktu yang sangat tinggi dengan menyelesaikan seluruh target tahunan ini pada TW I. Sarana produksi pangan fortifikasi sebagai target pada indikator kinerja ini hanya mencakup 1 sarana dan kegiatan telah selesai dilaksanakan di Triwulan I pada bulan Februari dan telah dilaporkan sebagai capaian pada TW I dan dipertahankan hingga akhir tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100	100	100.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100	100.00
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100	100	100.00
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	100	100	100.00

Kinerja indikator ini mencapai hasil sempurna (100.00%) di setiap triwulan. BBPOM di Palangka Raya menunjukkan efisiensi waktu yang sangat tinggi dengan menyelesaikan seluruh target tahunan ini pada TW I. Sarana produksi pangan fortifikasi sebagai target pada indikator kinerja ini hanya mencakup 1

sarana dan kegiatan telah selesai dilaksanakan di Triwulan I pada bulan Februari dan telah dilaporkan sebagai capaian pada TW I dan dipertahankan hingga akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja "Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan indikator baru. Oleh karena itu, data tahun 2025 akan ditetapkan sebagai nilai dasar (*baseline*) yang sangat penting untuk memantau tren perkembangan serta konsistensi pengawasan sarana tersebut di masa mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	100	119.05	 Tercapai/ Melampaui

Capaian kinerja tahun ini menunjukkan progres positif terhadap target jangka menengah (Renstra) sebesar 84%, dengan tingkat ketercapaian realisasi mencapai 119.05% sehingga dikategorikan **Tercapai/Melampaui**.

Hasil ini akan menjadi dasar analisis dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun berikutnya. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan kajian dan masukan dalam penetapan target serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi oleh UPT. Dari hasil evaluasi dan analisis ini, akan disusun langkah-langkah strategis untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan di periode mendatang demi memastikan pemenuhan target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	100	100	100.00
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Jayapura		

	Target	Realisasi	Capaian
	n/a	n/a	n/a
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	n/a	n/a	n/a

Dalam perbandingan kinerja antar unit kerja sejenis, BBPOM di Palangka Raya menjadi satu-satunya unit yang memiliki sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan BBPOM di Jayapura maupun BBPOM di Gorontalo. Meskipun hanya terdapat satu (1) sarana produksi minyak goreng sawit, keberadaannya menjadi nilai tambah yang signifikan dalam memperkuat posisi capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dibandingkan unit kerja sejenis lainnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Pemetaan kompetensi, penyusunan GAP analisis kompetensi dan perencanaan pelatihan berjenjang bagi petugas inspeksi	GAP analisis kompetensi dan penyusunan perencanaan pelatihan	2026	Y	S02.01.01	Kompetensi petugas inspeksi yang kurang memadai
	Sistem pengarsipan/dokumen administrasi pengawasan sarana dan tindak lanjut serta pelaporan hasil kinerja yang kurang efektif	Pembuatan link pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan yang tertelusur	Pengembangan inovasi PAMELA	TW 4	Y	S02.01.02	Dokumentasi Pemeriksaan Tidak Lengkap dan Akurat

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sekaligus memitigasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

- Melakukan verifikasi lapangan cepat (surveilans pasca-tindak lanjut) terhadap sarana di TW IV untuk memastikan hasil tindak lanjut (pembinaan/sanksi) tetap efektif dan sarana tetap patuh.
- Menganalisis anggaran yang dihemat karena penyelesaian cepat di TW I. Anggaran ini harus dialihkan untuk mendukung indikator yang masih dibawah target atau digunakan untuk pengembangan kompetensi tim.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	4,208,000	4,208,000	100.00

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian realisasi kinerja adalah sebesar Rp. 4,208,000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4,208,000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	100.00	4,208,000	4,208,000	100.00

Realisasi pada Rincian Output (RO) yang mendukung pencapaian target IKU telah terserap sepenuhnya dengan capaian sebesar 100%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI FORTIFIKASI	4.208.000	4.208.000	100,00

Dengan sub komponen anggaran seperti dalam tabel diatas, dapat digambarkan program kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

Capaian kinerja yang sesuai target hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan perencanaan, namun akan lebih baik jika bisa ditambahkan sub komponen yang mendukung peningkatan kompetensi petugas.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan antara lain:

- Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan.
- Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui *Mall* Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk.
- Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

- Kerjasama Lintas Sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi pangan fortifikasi.
- Program pengembangan kompetensi petugas pada bidang pemeriksaan terutama pengawasan pangan fortifikasi melalui Bimtek Nasional Pengawas Pangan mengenai Fortifikasi Pangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tanggal 19 - 20 Februari 2025 sebagai upaya peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan agar dapat dilakukan dengan tepat sesuai pedoman.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan tersebut, diperoleh capaian sasaran kegiatan pada Tahun 2025 sebesar **101.63**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	92.88	106.53	106.53	Sangat Baik
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100	100	Baik
Jumlah desa pangan aman	3	3	100	100	Baik
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	100	Baik
Capain Sasaran Kegiatan			101.63	101.63	Sangat Baik

17

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM mewakili kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas lokal/masyarakat adat, komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya.

Tujuan Pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan BPOM;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;

3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya;
4. Meningkatkan pengetahuan serta mendorong sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan KIE yang dilaksanakan oleh BPOM diukur melalui indikator kinerja Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan *audiens* KIE UPT terutama pada aspek sumber/ narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE yang dilaksanakan meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Pengukuran Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- a. Sumber atau Narasumber KIE;
- b. Konten atau Informasi KIE;
- c. Pemahaman Audiens KIE;
- d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan/atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 (satu) bulan terakhir. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan survei *online*. Jumlah responden dihitung berdasarkan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *Krejcie Morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	92.88	106.53	106.53	Sangat Baik

Hasil pengukuran Indikator Kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diperoleh nilai 92.88 dengan capaian sebesar **106.53%** dengan kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	89.83	103.03
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87.19	91.88	105.38

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	93.06	106.73
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	87.19	92.88	106.53

Secara keseluruhan, kinerja pada tahun berjalan menunjukkan tren yang sangat positif dengan capaian yang selalu melampaui target triwulanan (di atas 100%). Keberhasilan melampaui target di setiap triwulan menunjukkan bahwa BBPOM di Palangka Raya telah melakukan akselerasi kegiatan KIE sejak awal tahun. Pada Triwulan IV, terjadi sedikit penurunan angka indeks efektivitas KIE, hal ini disebabkan dipengaruhi oleh saturasi kegiatan KIE di akhir tahun atau pergeseran fokus pada evaluasi kegiatan di akhir tahun, namun capaian tetap terjaga.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.8	91.93	98.01
	Target Tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	95.7	95.72	100.02
	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	96.6	96.88	100.29
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	87.19	92.88	106.53

Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Secara persentase capaian, tahun 2025 merupakan tahun dengan **capaian tertinggi (106.53%)** dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penetapan target tahun 2025 lebih

rendah dari pada periode tahun 2022-2025. Meskipun secara persentase naik, namun jika dilihat angka realisasi murni, angka **92.88** pada tahun 2025 berada di bawah realisasi tahun 2024 (**96.88**) dan 2023 (**95.72**) dan 2022 (93,8). Dalam hal ini, capaian realisasi Tahun 2022-2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung terhadap kinerja Tahun 2025 karena terdapat perubahan mekanisme pengukuran tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Tahun 2025. Perubahan ini meliputi perubahan *tools* survei, cara pengukuran, serta target nilai Efektivitas KIE yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90.68	92.88	102.43	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan data capaian kinerja hingga tahun 2025, indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dibandingkan dengan target perencanaan strategis. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai angka 92,88, yang secara langsung telah melampaui Target Jangka Menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 90.68. Jika dibuat dalam persentase, efektivitas kegiatan KIE hingga tahun ini telah mencapai **102.43%** dari target jangka menengah yang direncanakan dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Capaian ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi dan edukasi yang dijalankan oleh BBPOM di Palangka Raya tidak hanya berjalan sesuai jalur (*on track*), tetapi juga berhasil mengakselerasi target yang seharusnya dicapai dalam jangka menengah. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan ketepatan sasaran pada program-program KIE yang telah diimplementasikan hingga Tahun 2025.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Untuk mendapatkan gambaran objektivitas keberhasilan kinerja, dilakukan perbandingan realisasi BBPOM di Palangka Raya dengan Balai Besar POM (BBPOM) di wilayah lain yang memiliki profil beban kerja serupa.

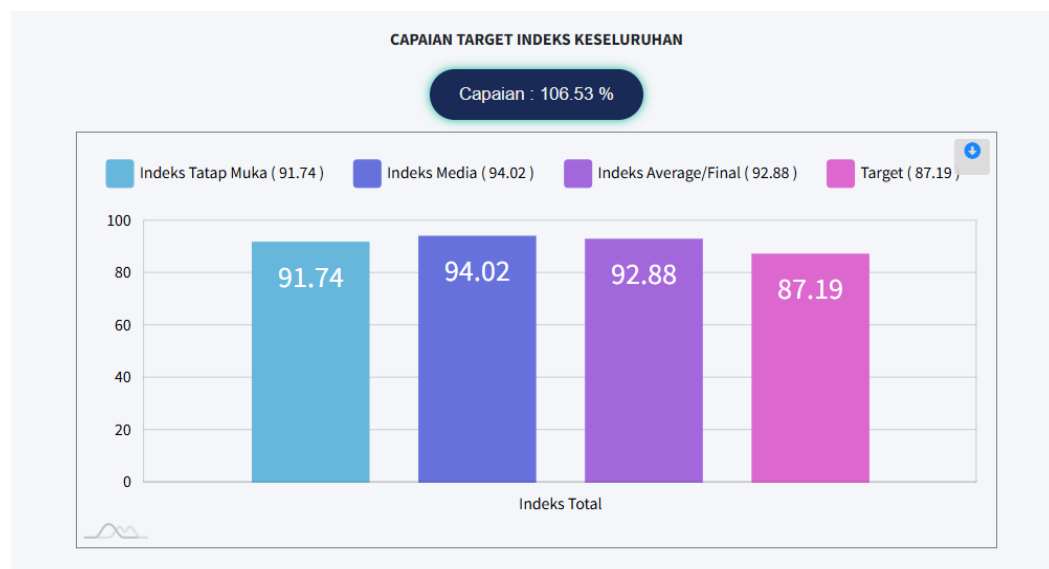
Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	92.88	106.53

	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	87.69	87.71	100.02
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	89.82	92.39	102.86

BBPOM di Palangka Raya mencatatkan **capaian tertinggi (106.53%)** dibandingkan dengan BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo. Namun demikian, BBPOM di Gorontalo memiliki target yang lebih menantang (89,82) bila dibandingkan dengan dua unit kerja sejenis. Berdasarkan perbandingan ini, kinerja BBPOM di Palangka Raya berada pada kategori **Sangat Baik** dan menjadi yang terdepan di antara unit kerja sejenis yang dibandingkan. Keberhasilan melampaui angka **92.88** dapat menggambarkan bahwa pola pendekatan KIE yang diterapkan telah melampaui standar rata-rata unit kerja yang sejenis.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Pada Tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 535 responden yang terdiri dari 293 responden survei KIE Tatap Muka dan 242 responden KIE Media. Tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 diperoleh dengan capaian sebagai berikut:



Pengukuran kriteria penilaian pada masing-masing jenis KIE adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, rata-rata responden menilai narasumber/petugas KIE/sumber informasi yang disajikan bagus sehingga audiens dapat memahami materi dengan baik dan merasakan manfaatnya. Responden juga menilai konten/materi yang disajikan sangat menarik, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi KIE merupakan kunci penting untuk menjangkau masyarakat luas dari berbagai generasi sesuai dengan media sosial yang digemari.

Materi KIE yang sangat diingat oleh responden adalah:

1. Tugas dan wewenang BPOM;
2. Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan;

3. Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM Mobile;
4. Tanya HALO BPOM/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan;
5. Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM;
6. Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan;
7. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Responden juga memberikan masukan materi KIE yang dibutuhkan, antara lain:

1. Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman;
2. Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di Masyarakat;
3. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Keberhasilan capaian melampaui target untuk indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu:

- Pelaksanaan KIE dengan menghadirkan narasumber yang kompeten memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat.
- Penggunaan ragam media (sosial, digital, cetak, hingga luar ruang) memungkinkan penyampaian informasi Obat dan Makanan menjadi lebih menarik, mudah dicerna, dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
- Peningkatan pemahaman audiens yang menunjukkan bahwa metode KIE yang digunakan efektif dalam mentransfer pengetahuan, sehingga masyarakat tidak sekadar terpapar informasi tetapi juga memahaminya.
- Kemanfaatan yang dirasakan masyarakat melalui KIE yang memberikan solusi nyata dan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman.
- Sinergitas Multi-Saluran melalui kombinasi KIE langsung (tatap muka) dan KIE melalui media elektronik serta digital memperluas jangkauan (*reach*) audiens, yang tercermin pada kestabilan capaian di atas target sepanjang tahun.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time-line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fluktuasi nilai indeks Efektivitas KIE	Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui pengembangan ragam kegiatan	Menyusun perencanaan KIE selaras dengan agenda setting tahunan dan Melak-	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S04.01.01 & S04.01.02	Pesan-pesan KIE tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik; Petugas KIE belum

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal, melibat <i>influencer/ public figure</i> serta mitra strategis BPOM lainnya	sanakan KIE dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, <i>influencer</i> , dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik				memiliki kompetensi yang memadai
		Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025	Optimalisasi peran tim publikasi dalam mengawal konten KIE media sosial	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S04. 01.01 & S04. 01.02	Pesan-pesan KIE tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik; Petugas KIE belum memiliki kompetensi yang memadai

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fluktuasi nilai indeks Efektivitas KIE	Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat	Menyusun perencanaan KIE selaras dengan agenda setting tahunan dan Melaksanakan KIE dan menghadirkan nara-	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S04. 01.01 & S04. 01.02	Pesan-pesan KIE tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan baik; Petugas KIE belum memiliki kompetensi yang memadai

			sumber kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik.				

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di periode mendatang, beberapa langkah strategis untuk peningkatan kinerja ke depan adalah:

- Inovasi Konten Digital (Micro-Learning): Mengingat efektivitas KIE diukur dari pemahaman, perlu diperbanyak konten video pendek (Reels/TikTok) yang bersifat edukasi praktis agar lebih mudah diingat oleh audiens milenial dan Gen Z.
- Peningkatan Kompetensi Komunikasi Narasumber: Melakukan pelatihan *public speaking* dan teknik komunikasi persuasif bagi petugas lapangan untuk memastikan pilar "Sumber/Narasumber" tetap mendapatkan nilai tinggi dari audiens.
- Optimalisasi Media Luar Ruang yang Strategis: Menempatkan pesan-pesan kunci pada titik keramaian baru di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya untuk menjangkau audiens yang belum terpapar media digital.
- Koleksi Data Testimoni: Mendokumentasikan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai bagian dari konten KIE berikutnya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran BPOM.

E. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	92.88	106.53	102.217.000	102.110.689	99.90

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang melampaui target didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif. Dari total Alokasi Anggaran Rp 102.217.000, telah terealisasi sebesar Rp 102.110.689, atau dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99.90%. Realisasi anggaran yang tinggi ini

menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output dan indeks kinerja.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	1508	278.74	89.232.000	89.165.023	99.92
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	32	128.	12.985.000	12.945.666	99.70

Dari total Alokasi Anggaran yang ada, Rincian Output Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE Rp.89.232.000, telah terealisasi sebesar Rp. 89.165.023, dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99,92% dan Rincian Output Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT Rp.12.985.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 12.945.666 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,92%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kie Obat Dan Makanan Oleh Petugas	19.310.000	19.300.200	99.95
2	Pemberdayaan Masyarakat Bersama Mobil Laboratorium Keliling Dan Pelayanan Melalui Inovasi Layanan Publik (Laura Jempol)	36.921.000	36.868.423	99.86
3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kie Obat Dan Makanan Secara Daring/Podcast	2.000.000	2.000.000	100
4	FGD Terkait Persepsi Lintas Sektor Terhadap Pelaksanaan Layanan Publik Dan Program Badan Pom	7.100.000	7.100.000	100
5	Kie Petugas/Bimtek Kader Dalam Rangka Peningkatan Layanan Publik Inklusif Dan Pengarusutamaan Gender (Pug)	4.200.000	4.200.000	100
6	Kie / Bimtek/Sosialisasi Melalui Inovasi Layanan Publik/Kegiatan Saka Pom/Kegiatan Cfd	10.101.000	10.096.400	99.95
7	Pemantauan Toksilovigilance	9.600.000	9.600.000	100

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
8	Penyebaran Informasi. Pameran. Publikasi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Kesadaran Dan Kepuasan Masyarakat	10.960.000	10.920.666	99.64

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
9	Penyebaran Informasi. Publikasi. Pameran. Sosialisasi Media Cetak/Elektronik	2.025.000	2.025.000	100

Faktor utama pendukung keberhasilan ini adalah optimalisasi sub-komponen kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai atau mendekati 100%:

1. Akselerasi Output Fisik dimana Output "Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE" melampaui target secara signifikan, mencapai 278,74% (1.508 orang dari target 541) dengan efisiensi anggaran 99.92%.
2. Optimalisasi Media Digital melalui Kegiatan KIE Obat dan Makanan secara Daring/Podcast mencapai realisasi anggaran mutlak 100%, yang sangat mendukung pilar konten dan pemahaman audiens di era digital.
3. Inovasi Layanan Publik pada Program LAURA JEMPOL (Mobil Laboratorium Keliling) didukung dengan penyerapan anggaran yang tinggi sebesar 99.86% (38.868.423), memfasilitasi KIE langsung yang lebih dekat dengan masyarakat.
4. Program KIE melalui Sinergi Lintas Sektor & Inklusivitas: Kegiatan FGD Lintas Sektor, Bimtek Kader/PUG, dan Pemantauan Toksikovigilans seluruhnya mencapai realisasi anggaran 100%, yang memperkuat basis dukungan kebijakan dan jangkauan audiens yang lebih inklusif.
5. Publikasi Media Cetak/Elektronik: Penyerapan anggaran sebesar 100% pada sub-komponen sosialisasi media cetak/elektronik mendukung penyebaran informasi secara masif.

Selain Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi tagging anggarannya, capaian indikator ini juga didukung oleh kolaborasi kegiatan dan anggaran yang sinergis dari anggaran RO lain. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mencapai indikator kinerja yang optimal di tengah efisiensi dan blokir anggaran Tahun 2025. Dukungan anggaran dari RO lain yang mendukung capaian indikator ini diperoleh dari pembiayaan kegiatan pada KIE Laboratorium Keliling, dukungan sarana prasarana dalam keikutsertaan di Expo/Pameran/Festival Budaya, KIE kepada Kelompok masyarakat (TP PKK Kota Palangka Raya).

18

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan

Program Sekolah dengan PJAS ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang dilaksanakan sepanjang periode renstra dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Kegiatan intervensi Keamanan PJAS ini meliputi 4 (empat) agenda utama yang dijabarkan dalam masing-masing tahapan pelaksanaan, yaitu agenda

koordinasi dengan pemerintah daerah, kemandirian sekolah, peningkatan kompetensi petugas, peran aktif kader dan pendampingan UMKM. Koordinasi dengan pemerintah daerah meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor PJAS dan Integrasi terpadu program PJAS dengan program pemerintah daerah baik dalam penetapan lokus sekolah/madrasah maupun audit/pengawasan PJAS terpadu di daerah. Kegiatan kemandirian sekolah meliputi pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, dan sosialisasi keamanan PJAS bagi komunitas sekolah baik melalui media social, webinar atau metode lainnya. Dalam program ini juga ada kegiatan peningkatan kompetensi petugas melalui tahapan Bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah. Kegiatan Peran aktif kader juga dilakukan melalui tahapan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah Tujuan utama program PJAS ini adalah mengawal PJAS aman, bermutu dan bernutrisi serta memberdayakan komunitas sekolah agar mampu dan mandiri melindungi diri sendiri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan termasuk menerapkan hygiene dan sanitasi untuk mencegah hepatitis akut.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100	100	Baik

Jumlah sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai kabupaten/kota target kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dalam program Prioritas Nasional. Penetapan pemilihan wilayah pada Tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman telah dilakukan secara menyeluruh di Kota Palangka Raya yang ditetapkan sebagai lokus intervensi, diawali dari tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Terpadu Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada bulan April 2025 sampai dengan pelaksanaan tahapan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Monitoring Evaluasi Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada bulan November 2025. Persentase capaian tahapan program Jumlah Sekolah pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 8 (delapan) sekolah dan termasuk kriteria **Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	35	50	142.86
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	70	75	107.14
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	8	8	100

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	54	54	100
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	68	68	100
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	82	82	100
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	8	8	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja triwulan apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada triwulan II dan III realisasi dan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu pula apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan juga berhasil dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan setiap tahapan Program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan baik setiap triwulannya dengan target persentase pelaksanaan tahapan dan setiap tahunnya terhadap target jumlah sekolah yang berhasil melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan di tahun selanjutnya dengan memperhatikan event yang secara rutin dilaksanakan oleh sekolah.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	18	8	44.44	 Perlu Upaya Keras

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan kinerja dari periode Renstra 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 8 (delapan) terhadap target jangka menengah sebesar 18 (delapan belas) sekolah dengan capaian terhadap jangka menengah 44.44% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Berdasarkan capaian kinerjanya, capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya bahkan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI, pada Tahun 2025 ini BBPOM di Palangka Raya berhasil memperoleh nilai 98 kepatuhan terhadap pedoman. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja atas rencana tindak lanjut Tahun 2024 dengan nilai 94.50. Akan tetapi dalam rangka penyampaian target Renstra sampai dengan 2029 perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis untuk memastikan target yang telah ditetapkan selama periode Renstra dapat tercapai.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	10	8	80
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	7	7	100

Mekanisme penilaian terhadap indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung melalui 2 cara, yaitu: jika program kegiatan masih berlangsung pada tahun berjalan maka perhitungannya berdasarkan persentase penyelesaian tahapan kegiatan dan jika program kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka akan dihitung berdasarkan sekolah yang memperoleh sertifikat PJAS Aman. Jumlah sekolah yang diintervensi di masing-masing UPT merupakan komitmen dan kontribusi tiap UPT dengan mempertimbangkan kondisi di setiap UPT yang menjadi target nasional dengan satuan ukur jumlah sehingga yang dapat dilakukan adalah membandingkan capaian tiap UPT. Berdasarkan tabel diatas, ketiga Balai Besar POM dalam 1 kluster tersebut berkontribusi memenuhi target nasional yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa BBPOM di Palangka Raya dan BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sedangkan BBPOM di Jayapura belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian hanya 80% dari 10 (sepuluh) target sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan acuan dan pembanding bagi BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan di tahun selanjutnya dengan menyusun langkah-langkah strategis dengan mempertimbangan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendukung keberhasilan program seperti yang telah dilakukan oleh BBPOM di Gorontalo dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian BBPOM di Jayapura sebagai bahan pembanding untuk menggali potensi dan risiko yang mungkin dapat terjadi di BBPOM Palangka Raya dalam melaksanakan program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan salah satu IKU yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan. Pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terhadap target intervensi, yaitu:

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi lintas sektor merupakan salah satu tahapan dalam program Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kegiatan Desa Pangan Aman dan mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasikan program ini secara mandiri. Tahapan advokasi ini dilaksanakan secara luring di Aula Setda Kota Palangka Raya pada tanggal 21 April 2025 yang dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) peserta dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Palangka Raya.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah

Tahapan sosialisasi keamanan pangan sekolah adalah salah satu tahapan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman komunitas sekolah terkait pangan aman, informasi nilai gizi, dan Cek KLIK. Kegiatan ini dilaksanakan kepada sekolah-sekolah sebagai target intervensi dan target perluasan. Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring kepada 8 (delapan) sekolah di Kota Palangka Raya sebagai target intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 dan secara luring kepada 15 (lima belas) sekolah target perluasan di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 21 Mei 2025 di Aula Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Tahapan bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah dilaksanakan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 secara daring yang dihadiri oleh masing-masing 2 (dua) peserta dari 8 (delapan) sekolah yang menjadi target intervensi, yaitu MIN 3 Kota Palangka Raya, MIS Noor Al Banjari Palangka Raya, SDN 3 Tanjung Pinang, SLBN 2 Palangka Raya, SMPN 7 Palangka Raya, SMPN 12 Palangka Raya, SMPN 4 Kota Palangka Raya dan SMKN 5 Palangka Raya. Serta dilaksanakan kepada 15 (lima belas) sekolah yang menjadi target perluasan di Kabupaten Pulang Pisau.

4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala untuk Memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri. Pada akhir program juga dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait. Pertemuan Monitoring dan *stakeholder* terkait ini dilaksanakan pada secara tanggal 27 November 2025 secara daring dan dihadiri peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) peserta serta dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris daerah Kota Palangka Raya yang berkomitmen untuk melanjutkan program secara mandiri.

5. Pengawasan

Dalam upaya memastikan keberlanjutan program dari sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya tahapan yang dilaksanakan adalah kegiatan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya tahun 2024, yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Oktober 2025 secara daring.

Keberhasilan Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Palangka Raya dalam melaksanakan keseluruhan tahapan program dengan tepat dan sesuai target yang telah ditetapkan
2. Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti penetapan waktu, tempat dan target peserta dalam setiap tahapan kegiatan serta keterlambatan dan ketepatan pelaporan/input data pada aplikasi SIAPSAPA (siapsapa.pom.go.id)

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembuda-	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yang telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan	Melakukan koordinasi dan komunikasi	TW I 2026	Y	S04.02.01	Pelaksanaan Advokasi tidak terlaksana sesuai jadwal

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
yaan keamanan pangan		<i>stakeholder</i> terkait					yang telah ditetap- kan
	Kesulitan transportasi pada sekolah dengan kondisi geografis tertentu	Menyusun strategi pelaksanaan dengan alternatif pelaksanaan secara <i>hybrid</i> (luring dan daring)	Melakukan sosialisasi langsung ke sekolah yang tidak dapat hadir	s.d TW III 2026	Y	S04. 02.02	Target sekolah tidak tercapai
	Kader Keamanan Pangan Sekolah tidak memahami materi yang diberikan	Memberikan materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video ataupun contoh-contoh	Dilakukan post test ulang untuk pertanyaan yang salah	s.d TW II 2026	Y	S04. 02.03	Peningkatan pengetahuan kader dan komunitas sekolah tidak tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak melakukan rencana aksi secara keseluruhan	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi	s.d TW IV 2026	Y	S04. 02.04	Kemandirian dan Keberlanjutan program tidak tercapai
	Tidak melakukan rencana aksi surveilen secara keseluruhan	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi surveilen	s.d TW IV 2026	Y	S04. 02.05	Kemandirian dan Keberlanjutan program tidak tercapai

Pencapaian kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan perlu peningkatan kedepannya sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan tahapannya, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan evaluasi dan analisis terkait karakteristik daerah/kabupaten serta *stakeholder* terkait yang menjadi target intervensi guna mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tahapan.
2. Memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna mengintensifikan koordinasi dan komunikasi dalam efektivitas pelaksanaan program.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100	32.625.000	32.625.000	100

Capaian realisasi anggaran pada tahun 2025 ini 100% tercapai dengan nilai sebesar Rp. 32.625.000,- yang menunjang pencapaian terhadap target pada tahun 2025 sebesar 100% dari 8 (delapan) sekolah yang diintervensi. Anggaran yang teralokasi ini terdiri sub komponen yang merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan program Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	8	8	100	32.625.000	32.625.000	100

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Advokasi Lintas Sektor Pjas Di Daerah	10.840.000	10.840.000	100
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	8.645.000	8.645.000	100
3	Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah	8.160.000	8.160.000	100
4	Pengadaan Paket Edukasi Keamanan Pangan	4.980.000	4.980.000	100

Indikator ini memiliki anggaran rutin yang dialokasi untuk pelaksanaan tahapannya dengan alokasi anggaran spesifik pada masing-masing sub

komponennya dimana capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dari alokasi anggaran yang tersedia untuk masing-masing sub komponen. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan seluruh subkomponen untuk IKU Jumlah Sekolah yang telah melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang di-tagging pada indikator ini mendukung pencapaian target IKU tersebut sesuai dengan perencanaan dan definisi operasionalnya.

19

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam program desa pangan aman, desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target adalah desa. Tahapan program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi keamanan pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	3	3	100	100	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Penetapan pemilihan wilayah/lokus intervensi pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Sampai dengan akhir Tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah dilakukan secara menyeluruh di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi, dimulai dari Advokasi Lintas Sektor pada bulan April 2025 sampai dengan pelaksanaan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pada bulan November 2025. Pada tahun 2025 ini, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Pemberdayaan masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI terkait kinerja UPT dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman, BBPOM di Palangka Raya berhasil memperoleh nilai kepatuhan terhadap pelaksanaan sesuai pedoman sebesar 72.6%. Persentase capaian program desa pangan aman pada Tahun 2025 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 3 (tiga) desa dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	70	100
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	70	70	100
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	3	3	100

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Jumlah Desa Pangan Aman	18	18	100
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	25	25	100
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
Jumlah Desa Pangan Aman	31	31	100
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	3	3	100

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian target jumlah desa pangan aman juga berhasil dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan setiap tahapan Program Desa Pangan Aman baik setiap triwulannya dengan target persentase pelaksanaan tahapan dan setiap tahunnya terhadap target jumlah desa yang berhasil melaksanakan keamanan pangan secara mandiri dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman di tahun selanjutnya dengan memperhatikan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing desa/kelurahan.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	7	3	42.86	 Perlu Upaya Keras

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan kinerja dari periode Renstra 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 3 (tiga) desa terhadap target jangka menengah sebesar 7 (tujuh) desa dengan capaian terhadap jangka menengah 42,86% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Dalam rangka penyampaian target Renstra sampai dengan 2029 perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis untuk memastikan target yang telah ditetapkan selama periode Renstra dapat tercapai dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dalam menetapkan lokus intervensi sehingga mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan program.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
Jumlah Desa Pangan Aman	Target	Realisasi	Capaian
	3	3	100
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	3	2	66.67
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	3	3	100

Berdasarkan tabel diatas, ketiga Balai Besar POM dalam 1 kluster tersebut berkontribusi memenuhi target nasional yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa BBPOM di Palangka Raya dan BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai 100% target sedangkan BBPOM di Jayapura belum berhasil mencapai target, dengan capaian hanya 66,67% dari 3 (tiga) target desa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan acuan dan pembandingan bagi BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan di tahun selanjutnya dengan menyusun langkah-langkah strategis dengan mempertimbangan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendukung keberhasilan program seperti yang telah

dilakukan oleh BBPOM di Gorontalo dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian BBPOM di Jayapura sebagai bahan pembandingan untuk menggali potensi dan risiko yang mungkin juga dapat terjadi di BBPOM Palangka Raya dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman merupakan salah satu IKU yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi Edukasi Obat dan Makanan serta merupakan Program Prioritas Nasional. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terhadap target intervensi, yaitu:

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi lintas sektor merupakan salah satu tahapan dalam program Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kegiatan Desa Pangan Aman dan mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasikan program ini secara mandiri. Tahapan advokasi ini dilaksanakan secara luring di Aula Setda Kota Palangka Raya pada tanggal 21 April 2025 yang dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) peserta dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Palangka Raya.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Tahapan pelatihan kader keamanan pangan dilaksanakan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan sampai tingkat perseorangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 bertempat di aula Kantor BBPOM di Palangka Raya yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang dengan perwakilan masing-masing kelurahan (Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bereng Bengkel dan Kelurahan Tanjung Pinang) sebanyak 5 (lima) orang.

3. Bimbingan Teknis terhadap Komunitas Desa/Kelurahan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat terkait keamanan pangan, tahapan selanjutnya dari program Desa Pangan Aman ini adalah Bimbingan teknis kepada komunitas desa yang terdiri dari komunitas Ibu Rumah Tangga, komunitas sekolah, komunitas pelaku usaha pangan olahan, komunitas pelaku usaha pangan siap saji, komunitas remaja dan komunitas ritel serta kepada komunitas bapak atau remaja putra sebagai bentuk mendukung upaya pengarusutamaan gender dalam peran serta Bapak dan remaja putra dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan. Tahapan ini dilaksanakan pada selama bulan Mei-Juni 2025 dan dilaksanakan secara

penuh oleh Kader Keamanan Pangan masing-masing Kelurahan dengan supervisi dari BBPOM di Palangka Raya.

4. Fasilitas Keamanan Pangan

Fasilitasi keamanan pangan merupakan salah satu tahapan program Desa Pangan Aman untuk membantu komunitas desa mengimplementasikan Keamanan Pangan dalam kehidupan sehari-hari di lingkup rumah tangga/sekolah dan praktik/cara produksi/ritel Pangan yang baik di lingkup usaha pangan. Tahapan ini dilaksanakan pada selama bulan Mei-Juni 2025 dan dilaksanakan secara penuh Kader Keamanan Pangan masing-masing Kelurahan melalui supervisi dari BBPOM di Palangka Raya. Melalui tahapan ini dapat terpotret gambaran praktek keamanan pangan sebelum dan sesudah intervensi.

5. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala untuk mendapatkan kendala dan potensi risiko yang mungkin timbul serta rencana keberlanjutan program yang dilaksanakan secara mandiri. Pada akhir program juga dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait. Pertemuan Monitoring dan *stakeholder* terkait ini dilaksanakan pada secara tanggal 27 November 2025 secara daring dan dihadiri peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) peserta serta dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris daerah Kota Palangka Raya yang berkomitmen untuk melanjutkan program secara mandiri.

6. Pengawasan

Dalam upaya memastikan keberlanjutan program dari desa/kelurahan yang telah diintervensi tahun sebelumnya tahapan yang dilaksanakan adalah kegiatan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang diintervensi tahun sebelumnya tahun 2024, yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 30 Oktober 2025 dan dihadiri oleh 18 (delapan belas) kader keamanan pangan.

7. Lomba Desa Pangan Aman

Pada tahun 2025, Kelurahan Muara laung I Kabupaten Murung Raya berhasil masuk dalam 5 (lima) besar nominasi Kabupaten/Kota Pangan tingkat nasional wilayah regional tengah. Tahapan lomba desa pangan ini merupakan bentuk apresiasi Badan POM kepada desa/kelurahan yang berhasil mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan.

Keberhasilan Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Palangka Raya dalam melaksanakan keseluruhan tahapan program dengan tepat dan sesuai target yang telah ditetapkan.

- Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti penetapan waktu, tempat dan target peserta dalam setiap tahapan kegiatan serta keterlambatan dan ketepatan pelaporan/input data pada aplikasi GKPD online (gkpd.pom.go.id).

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Desa Pangan Aman	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yg telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan <i>stakeholder</i> terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi	s.d TW I 2026	Y	S04. 03.01	Pelaksa- naan Advoka- si tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan
	Tidak melakukan rencana aksi sebagai wujud kemandirian desa dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksana- an rencana aksi	s.d TW IV 2026	Y	S04. 03.02	Kemandirian dan Keberlan- jutan program tidak tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Desa Pangan Aman	Kader Keamanan Pangan Desa tidak memahami materi yg diberikan	Memberikan materii dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video atau pun contoh-contoh	Dilakukan <i>post test</i> ulang untuk pertanyaan yang salah	s.d TW II 2026	Y	S04. 03.03	Peningkatan penge- tahuan kader keamanan pangan tidak tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Komunitas tidak memahami materi yang diberikan	Memberikan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video atau pun contoh-contoh	Dilakukan <i>post test</i> ulang untuk pertanyaan yang salah	s.d TW IV 2026	Y	S04.03.04	Peningkatan pengetahuan komunitas desa tidak tercapai
	Tidak melakukan rencana aksi dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi	s.d TW IV 2026	Y	S04.03.05	Kemandirian dan keberlanjutan program tidak tercapai

Pencapaian kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman perlu peningkatan kedepannya sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan tahapannya, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan evaluasi dan analisis terkait karakteristik daerah/kabupaten serta stakeholder terkait yang menjadi target intervensi guna mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tahapan;
2. Memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna mengintensifikan koordinasi dan komunikasi dalam efektivitas pelaksanaan program.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Desa Pangan Aman	3	3	100	39.805.000	39.746.155	99.85

Capaian realisasi anggaran pada tahun 2025 ini 99.85% dengan nilai sebesar Rp 39.746.155,- yang menunjang pencapaian terhadap target pada tahun 2025 sebesar 100% dari 3 (tiga) desa yang diintervensi. Anggaran yang teralokasi ini terdiri sub komponen yang merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan program Jumlah Desa Pangan Aman.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Desa Pangan Aman	3	3	100	39.805.000	39.746.155	99.85

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Pengadaan Paket Informasi Keamanan Pangan	5.573.000	5.553.219	99.65
2	Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa	13.725.000	13.725.000	100
3	Bimtek Komunitas Desa	12.995.000	12.961.936	99.75
4	Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	3.200.000	3.200.000	100
5	Pengawasan Obat Dan Makanan Melalui Jalur Sungai Di Kabupaten Katingan	3.312.000	3.306.000	99.82
6	Monitoring Dan Evaluasi Dalam Gerakan Keamanan Pangan Desa	1.000.000	1.000.000	100

Indikator ini memiliki anggaran rutin yang dialokasi untuk pelaksanaan tahapannya dengan alokasi anggaran spesifik pada masing-masing sub komponennya dimana capaian realisasi anggaran yang berhasil mencapai 100% dari alokasi anggaran yang tersedia adalah sub komponen Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Fasilitasi Keamanan Pangan Desa serta Monitoring dan Evaluasi dalam Gerakan Keamanan Pangan Desa sedangkan untuk sub komponen Pengadaan Paket Informasi Keamanan Pangan, Bimtek Komunitas dan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Jalur Sungai di Kabupaten Katingan belum mencapai 100% untuk realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan secara keseluruhan subkomponen untuk IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang di-tagging pada indikator ini mendukung pencapaian target IKU tersebut sesuai dengan perencanaan dan definisi operasionalnya, walaupun ada 1 (satu) sub komponen yang bukan merupakan tahapan pelaksanaan Program Desa Pangan, yaitu subkomponen Pengawasan Obat dan Makanan melalui Jalur Sungai di Kabupaten Katingan.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	100,00	Baik

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Indikator pasar pangan aman berbasis komunitas mengalami perubahan nama setelah ditetapkannya Reviu Renstra 2021-2024 pada bulan Oktober 2020, yang semula bernama Pasar aman bebas dari bahan berbahaya menjadi Pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar dan anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas, mengalami penurunan persentase Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev tahap 1 dibandingkan Monev tahap 2, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Penetapan pemilihan wilayah didasarkan pada kondisi

pasar yang dinyatakan layak untuk mengikuti program tersebut sesuai dengan pendoman yang telah ditetapkan. Capaian pada tahun 2025 dihitung dari jumlah pasar yang telah berhasil menerapkan keamanan pangan di pasar yang dikelola. Persentase capaian tahapan program pasar aman berbasis komunitas pada tahun 2025 sebesar 100% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	5	100,00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	80	114,29
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100	100	100,00
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	1	1	100,00

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	6	6	100
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	9	9	100
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	12	12	100
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja triwulan apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada Triwulan II realisasi dan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu pula apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian target jumlah pasar pangan aman juga berhasil dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan setiap tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas baik setiap triwulannya dengan target persentase pelaksanaan tahapan dan setiap tahunnya

terhadap target jumlah pasar yang berhasil melaksanakan keamanan pangan secara mandiri dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Walaupun realisasi yang dicapai pada setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam hal ini masih diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sehingga dapat memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh UPT sampai dengan akhir periode renstra tahun 2029 serta dapat mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasikan secara mandiri Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	3	1	33.33	 Perlu Upaya Keras

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan kinerja dari periode Renstra 2025-2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 1 (satu) terhadap target jangka menengah sebesar 3 (tiga) pasar dengan capaian terhadap jangka menengah 33,33% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Berdasarkan capaian kinerjanya, capaian kinerja tahun 2025 lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya bahkan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI, pada tahun 2025 ini BBPOM di Palangka Raya berhasil memperoleh nilai 9,43 kepatuhan terhadap pedoman. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja atas rencana tindak lanjut tahun 2024. Akan tetapi dalam rangka penyampaian target Renstra sampai dengan 2029 perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis untuk memastikan target yang telah ditetapkan selama periode Renstra dapat tercapai.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	1	1	100
Balai Besar POM di Jayapura			

	Target	Realisasi	Capaian
	1	1	100
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, ketiga Balai Besar POM dalam 1 *cluster* tersebut berhasil berkontribusi memenuhi target nasional yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan Hal ini dapat dijadikan acuan dan pembandingan bagi BBPOM di Palangkaraya untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan di tahun selanjutnya dengan menyusun langkah-langkah strategis dengan mempertimbangan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendukung keberhasilan program seperti yang telah dilakukan oleh BBPOM di Gorontalo dan BBPOM di Jayapura, untuk menggali dan menganalisa potensi dan risiko yang mungkin saja terjadi dalam pencapaian tujuan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan salah satu IKU yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi Edukasi Obat dan Makanan serta merupakan Program Prioritas Nasional. Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terhadap target intervensi, yaitu:

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi lintas sektor merupakan salah satu tahapan dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang bertujuan untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasikan program ini secara mandiri. Tahapan advokasi ini dilaksanakan bersama dengan program Prioritas Nasional lainnya secara luring di Aula Setda Kota Palangka Raya pada tanggal 21 April 2025 yang dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) peserta dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Palangka Raya.

2. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar

Tahapan bimbingan teknis petugas pengelola pasar dilaksanakan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang

keamanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan di komunitas pasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 bertempat di aula Kantor BBPOM di Palangka Raya yang dihadiri oleh 16 (enam belas) orang perwakilan komunitas pasar.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan

Tahapan sosialisasi keamanan pangan adalah salah satu tahapan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman komunitas pasar terkait pangan aman dan Cek KLIK. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala selama bulan Mei-Juni 2025 kepada komunitas pasar.

4. Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala untuk mendapatkan kendala dan potensi risiko yang mungkin timbul serta rencana keberlanjutan program yang dilaksanakan secara mandiri. Pada akhir program juga dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Pertemuan Monitoring dan Stakeholder terkait ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 secara daring dan dihadiri peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) peserta serta dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris daerah Kota Palangka Raya yang berkomitmen untuk melanjutkan program secara mandiri.

5. Pengawasan

Dalam upaya memastikan keberlanjutan program dari pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya tahapan yang dilaksanakan adalah kegiatan pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya tahun 2024, yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Juli 2025.

6. Lomba Desa Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pada tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya mengirimkan profil Pasar rakyat Pelita Hulu untuk mengikuti Lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional. Tahapan lomba desa pangan ini merupakan bentuk apresiasi Badan POM kepada desa/kelurahan yang berhasil mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan.

Keberhasilan Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Palangka Raya dalam melaksanakan keseluruhan tahapan program dengan tepat dan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Monitoring dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti penetapan waktu, tempat dan target peserta dalam setiap tahapan kegiatan serta keterlambatan dan ketepatan pelaporan/input data pada aplikasi SIPAMAN (sipaman.pom.go.id).

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Jadwal Pelaksanaan Advokasi tidak sinkron dengan jadwal yg telah ditetapkan	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemda dan stakeholder terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi	s.d TW I 2026	Y	S04. 04.01	Pelaksanaan Advokasi tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan
	Pedagang pasar lebih memilih berjualan dibanding mengikuti kegiatan penyuluhan pasar	Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunitas pedagang pasar	Melaksanakan kegiatan penyuluhan pasar di waktu dan tempat yang memungkinkan pedagang dapat mengikuti	s.d TW IV 2026	Y	S04. 04.02	Target penyuluhan pasar tidak tercapai
	Tidak semua komunitas pasar memiliki gadget	Melaksanakan tahapan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing pasar dan komunitasnya	Melaksanakan sosialisasi KP kepada komunitas pasar dengan 2 metoda, melalui konten media sosial dan pembagian stiker	s.d TW IV 2026	Y	S04. 04.03	Target pelaksanaan tahapan tidak tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Petugas Pasar belum memahami teknis pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	Memberikan materi-materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat peraga dalam bentuk video ataupun contoh-contoh	Petugas BBPOM di Palangka raya melakukan pendampingan kepada petugas	s.d TW IV 2026	Y	S04.04.04	Peningkatan pengetahuan petugas pasar tidak tercapai
	Tidak melakukan rencana aksi dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri	Intensifikasi pengawalan terhadap implementasi rencana aksi secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi	s.d TW IV 2026	Y	S04.04.05	Kemandirian dan Keberlanjutan program tidak tercapai

Pencapaian kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas perlu peningkatan kedepannya sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan tahapannya, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan evaluasi dan analisis terkait karakteristik daerah/kabupaten serta stakeholder terkait yang menjadi target intervensi guna mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tahapan;
2. Memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna mengintensifikan koordinasi dan komunikasi dalam efektivitas pelaksanaan program.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	26.535.000	26.531.308	99.99

Capaian realisasi anggaran pada tahun 2025 ini 99,99% tercapai dengan nilai sebesar Rp. 26.531.308,- yang menunjang pencapaian terhadap target pada tahun 2025 sebesar 100% dari 1 (satu) pasar yang diintervensi. Anggaran yang terealisasi ini terdiri sub komponen yang merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan program Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	26.535.000	26.531.308	99.99

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Kampanye Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	15.769.000	15.765.488	99.98
2	Pengadaan Rapid Test Kit	5.286.000	5.285.820	100
3	Survei Pasar Dalam Rangka Intervensi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	200.000	200.000	100
4	Penyuluhan Komunitas Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	3.280.000	3.280.000	100
5	Monitoring Dan Evaluasi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	2.000.000	2.000.000	100

Indikator ini memiliki anggaran rutin yang dialokasi untuk pelaksanaan tahapannya dengan alokasi anggaran spesifik pada masing-masing sub komponennya dimana hanya 1 capaian realisasi anggaran yang belum berhasil mencapai 100% dari alokasi anggaran yang tersedia yaitu sub komponen Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 99.98% sebesar Rp 15.765.488,- dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 15.769.000,-. Sedangkan 4 (empat) sub komponen lainnya berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 100% dari alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan secara keseluruhan subkomponen untuk IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang di tagging pada indikator ini mendukung pencapaian target IKU tersebut sesuai dengan perencanaan dan definisi operasionalnya.



Sasaran Kegiatan

*Meningkatnya pendampingan
UMKM dalam pemenuhan standar
keamanan dan mutu*

Keberhasilan sasaran kegiatan Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu diukur dari 1 (satu) indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.1	15.38	109.08	109.08	Sangat baik
Capaian Sasaran Kegiatan			109.08	109.08	Sangat baik

21

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Selaku institusi pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Badan POM berperan penting dalam pendampingan pelaku usaha untuk memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiat/manfaat sehingga dapat memenuhi ketentuan izin edar. Dalam menjalankan misi tersebut maka ditetapkanlah pengukuran indikator kinerja terhadap Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Indikator ini merupakan indikator yang sama dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2024) namun dengan definisi operasional yang berbeda sesuai dengan Petunjuk Teknis pendampingan yang telah ditetapkan oleh unit pengampu.

IKU ini mengalami beberapa kali perubahan manual IKU terkait cara perhitungan indikator kinerja UPT dan tahapan pendampingan yang dilakukan terutama tahapan pendampingan pelaku usaha pangan olahan, dimana pada awal tahun penetapan cara perhitungan menggunakan Rumus : $(A + B + C)/3$, dimana

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Dan pada perubahan kedua rumus perhitungan tersebut berubah menjadi

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100%

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.1	15.38	109.08	109.08	Sangat Baik

Realisasi pendampingan UMKM pada tahun 2025 mencapai 15.38%. Ini menunjukkan bahwa 12 UMKM dari 78 target UMKM tahun 2025-2029 yang direncanakan telah berhasil didampingi hingga memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Kinerja dalam pendampingan UMKM untuk memperoleh rekomendasi sertifikat/izin hingga Tahun 2025 dinilai **Sangat Baik**. Capaian melebihi 100%

menunjukkan efektivitas tinggi program pendampingan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses coaching, verifikasi, dan pemberian rekomendasi berjalan lebih baik dengan tingkat kelulusan UMKM lebih tinggi dari yang direncanakan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19	21.67	114.05
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	61	62.33	102.18
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	87	91.54	105.22
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	14.1	15.38	109.08

Capaian di atas 100% pada setiap triwulan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pendampingan (mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga audit awal) berjalan sangat efisien dan cepat, melebihi ekspektasi yang ditetapkan dalam target per triwulan.

Kinerja TW I yang sangat tinggi (114.05%) melebihi 110%, hal ini disebabkan karena perencanaan kegiatan dan pelaksanaan program pendampingan masih menggunakan juknis lama, dimana IKU persentase UMKM yang didampingi merupakan IKU yang serupa dengan tahun sebelumnya, namun pembahasan manual IKU dan perubahan tahapan pendampingan baru disampaikan pada awal bulan Maret, dimana tahapan pendampingan pangan olahan berubah dan cara perhitungan juga berubah.

Kinerja kembali meningkat di TW III (105.22%) dibandingkan TW II (102.18%). Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi terencana percepatan pendampingan di paruh kedua tahun berjalan untuk memastikan target tahunan akan tercapai atau terlampaui.

Pada TW IV cara perhitungan kinerja berbeda dari TW I hingga TW III dimana pada TW IV yang diukur adalah jumlah sarana yang memperoleh IP CPPOB dan/atau Rekomendasi CPOBAB bertahap atau CPKB. Capaian kinerja Triwulan IV mencapai 109.08%.

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77	70	90.91
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	79	86.62	109.65
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87	88.24	101.43
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	14.1	15.38	109.08

Program pendampingan UMKM ini mengalami peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Realisasi meningkat dari 70% (2022) menjadi 88.24% (2024). Peningkatan paling tajam terjadi antara 2022 ke 2023, di mana realisasi melonjak sebesar 16.62 poin. Tahun 2022 adalah satu-satunya tahun di mana target tidak tercapai 100% (hanya 90.91%). Namun, pada 2023 dan 2024, efektivitas melonjak melampaui target, menunjukkan sistem pendampingan yang sudah jauh lebih matang.

Terdapat perubahan manual IKU yang merubah rumus perhitungan kinerja pada tahun 2025. Angka target dan realisasi berubah ke kisaran 14% - 15% dan bersifat kumulatif hingga akhir renstra 2025-2029.

Setelah berhasil menstabilkan pemenuhan standar produksi di tahun 2023-2024, pada tahun 2025 fokus bergeser ke arah legalitas sertifikasi dengan tingkat keberhasilan (capaian) yang tetap terjaga tinggi di angka 109.08%,

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87.18	15.38	17.64	 Perlu Upaya Keras

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil merekomendasikan sertifikat/izin terhadap 12 sarana UMKM dari 78 sarana UMKM yang menjadi target 1 periode renstra. Sehingga memperoleh realisasi kinerja sebesar 15.38% dengan capaian 109.08%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian kinerja baru sebesar 17.64%. Namun perlu diingat bahwa capaian kinerja IKU ini bersifat kumulatif. Untuk mencapai target akhir renstra maka GAP yang harus dicapai

sebesar 71.8 % yang setara dengan 56 sarana UMKM yang harus didampingi sampai periode akhir renstra.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	14.1	15.38	109.08
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	14.75	14.75	100
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	16.07	16.07	100

Dalam hal perbandingan kinerja antar unit kerja yang sejenis, Balai Besar POM di Palangka Raya menjadi yang tertinggi capaian kinerja dengan perolehan sebesar 109.08%. Dengan target yang hampir setara unit kerja lain memperoleh capaian sebesar 100%, yang artinya unit kerja lain berhasil melakukan pendampingan dan menerbitkan rekomendasi/izin penerapan terhadap seluruh UMKM yang didampingi, sementara Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil menerbitkan rekomendasi/izin penerapan yang lebih besar dari target yang ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian yang secara konsisten melampaui target menunjukkan bahwa program pendampingan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

5. Telah mengantisipasi kualitas pendampingan yang kurang optimal dengan melaksanakan tahapan pendampingan dan *coaching* sesuai dengan juknis pendampingan pelaku usaha serta fokus pada poin-poin krusial dalam pemenuhan persyaratan GMP serta pengembangan kompetensi fasilitator agar memiliki dedikasi tinggi dan kompeten, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan UMKM, sehingga meningkatkan motivasi dan kepatuhan UMKM
6. Telah mengantisipasi kurangnya komitmen dan partisipasi aktif UMKM dengan memilih UMKM yang memiliki komitmen tinggi dan infrastruktur dasar yang memadai berdasarkan GAP persyaratan sarana sehingga potensi kelulusan dan percepatan proses rekomendasi lebih besar

7. Telah mengantisipasi putusnya kemitraan dengan Perguruan tinggi dalam melanjutkan inovasi UMKM BERDIKARI dengan mengubah skema fasilitator mahasiswa dari mahasiswa dengan mata kuliah kewirausahaan menjadi mahasiswa magang.
8. Telah mengantisipasi adanya hubungan keluarga antara pelaku usaha dan petugas fasilitator dengan mengendalikan integritas petugas melalui surat pernyataan benturan kepentingan
9. Telah mengantisipasi adanya praktik pemberian gratifikasi dan pemerasan dengan mengendalikan integritas petugas fasilitator melalui surat pernyataan benturan kepentingan dan mencantumkan "Petugas Tidak Diperkenankan Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun" pada surat tugas.

Meski capaian indikator Sangat Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	UMKM tidak memiliki motivasi yang kuat untuk memperoleh sertifikat, menganggap proses pendampingan sebagai beban, kurangnya keterbukaan terhadap perubahan	Pemetaan dan GAP <i>assessment</i> kesiapan pelaku usaha	Meminta surat pernyataan komitmen pendampingan pelaku usaha	2026	Y	S05.01.01	UMKM berguguran/tidak melanjutkan selama proses pendampingan
	Antrian pengujian sampel dalam rangka pendampingan pelaku usaha	Koordinasi dengan penguji terkait parameter uji dan jadwal pengujian	Penjadwalan sampling dan pengujian untuk pendampingan UMKM	2026	T	-	LHU terlambat untuk proses registrasi produk
	Keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan pendampingan on site hanya dapat dilakukan di Kota Palangka Raya	Kolaborasi antar kelompok kerja untuk efisiensi penggunaan anggaran dan penugasan bersama	Penugasan bersama	2026	T	-	Pendampingan <i>onsite</i> di kabupaten dilaksanakan bersamaan dengan penugasan lain

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

1. Mendorong UMKM yang telah lulus untuk menjadi mentor bagi UMKM lain (pendekatan *peer-to-peer*), sehingga beban kerja pendamping formal dapat berkurang
2. Formalisasi pelaksanaan pendampingan dan *coaching* yang lebih ringan melalui telepon atau chat oleh tim pendamping, sehingga beban kerja di lapangan berkurang tetapi kualitas tetap terjaga.
3. Libatkan lintas sektor yang memiliki program serupa guna peningkatan kinerja dan efisiensi kegiatan.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.1	15.38	109.08	7.600.000	7.597.400	99.97

Anggaran yang mendukung IKU persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan merupakan anggaran UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.97%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	13	100.00	7.600.000	7.597.400	99.97

Indikator ini didukung dengan anggaran rutin Balai Besar POM di Palangka Raya dan memiliki rincian output sebesar 13 sarana UMKM, dimana Rincian output tercapai dengan didampinginya 11 sarana UMKM Pangan Olahan, 1 sarana UMKM Obat Bahan Alam dan 1 sarana UMKM Kosmetik, sehingga capaian rincian output indikator sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99.97%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	UMKM BERDIKARI FASILITAS/PENDAMPINGAN PEMENUHAN PERSYARATAN REGISTRASI PRODUK UMKM	7.600.000	7.597.400	99,97

Dari sisi anggaran yang terbatas, berdampak pada sub komponen yang dapat mendukung program/kegiatan pendampingan UMKM, namun hal tersebut tidak menghambat capaian kinerja baik dari segi output (100%) maupun anggaran (99,97%). Anggaran pendampingan UMKM sekaligus mendukung inovasi Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu inovasi UMKM Berdikari.

Capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam program pendampingan UMKM sesuai dengan perencanaan tahapan pendampingan, namun akan lebih baik jika bisa ditambahkan sub komponen yang mendukung peningkatan kompetensi petugas fasilitator dan branding, sosialisasi dan desk pelaku usaha yang dilakukan secara luring.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan Kelima yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, pelaksanaan penindakan dilakukan melalui tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Indikator Kinerja *Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* adalah bahwa Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari operasi intelijen untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya dianalisis guna memastikan kebenaran atas dugaan terjadinya tindak pidana di masyarakat, sampai dengan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%. -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perkara Carry Over dapat dihitung jika terdapat progress perkara pada tahun berjalan.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104.17	104.17	Sangat baik
Capaian Sasaran Kegiatan			104.17	104.17	Sangat baik

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104.17	104.17	Sangat Baik

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Tahun 2025 mencapai 100%. Capaian tersebut diukur berdasarkan penyelesaian berkas perkara sampai dengan Tahap II serta terpenuhinya target penanganan sebanyak 3 (tiga) perkara dalam proses penyidikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 96%, maka diperoleh capaian indikator kinerja sebesar 104.17%.

Berdasarkan kategori penilaian kinerja, persentase capaian tersebut termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan secara optimal, efektif, dan mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	18	33.33	185.17
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	38	33.33	87.71
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	71	71.67	100.94
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	96	100	104.17

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	125	127.55
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	99	100	101.01
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	100	100	100
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	96	100	104.17

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 33.33%. Realisasi yang sama juga tercapai pada Triwulan II Tahun 2025, yaitu sebesar 33.33%, sehingga belum menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, pada Triwulan III Tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi persentase keberhasilan penyidikan mencapai 71.67%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya percepatan penyelesaian perkara pada periode dimaksud.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi persentase keberhasilan penyidikan mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target Triwulan IV Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 96%, maka diperoleh capaian indikator kinerja sebesar

104.17% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyidikan pada akhir tahun telah melampaui target yang direncanakan.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	100	100	 Tercapai/ Melampaui

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja terhadap target jangka menengah juga mencapai 100% dengan kategori capaian Tercapai/Melampaui. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyidikan pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104.17
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	85	96.25	113.24
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	85	97	114.12

Dalam rangka mengukur persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palangka Raya dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis di UPT pada beberapa Balai Besar POM dan dianalisis terhadap indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target sebesar 96% dengan realisasi mencapai 100%, sehingga diperoleh capaian

sebesar 104.17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menetapkan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 96.25%, sehingga menghasilkan capaian 113.24%. Adapun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo menetapkan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 97%, sehingga memperoleh capaian 114.12%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, seluruh unit kerja menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun secara persentase capaian BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo lebih tinggi karena perbedaan penetapan target, namun secara substansi realisasi kinerja BBPOM di Palangka Raya telah mencapai 100%, yang menunjukkan tingkat keberhasilan penyidikan yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Sebanyak 3 (tiga) perkara berhasil diselesaikan sampai dengan Tahap II sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja berada pada kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan dalam realisasi kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen serta dukungan pimpinan terhadap optimalisasi keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
2. Adanya dukungan dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI serta kerja sama lintas sektor dalam penyediaan informasi intelijen yang akurat dan dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
3. Adanya dukungan dari Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI dalam pengungkapan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Palangka Raya;
4. Adanya dukungan dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI dalam penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Palangka Raya;
5. Adanya dukungan Korwas PPNS dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah yang memberikan bantuan teknis dan taktis dalam pengungkapan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyidikan;

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada fungsi penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya secara proaktif melaksanakan koordinasi serta menerapkan strategi komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan *Criminal Justice System* (CJS). Sinergi tersebut terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri pada tingkat kabupaten/kota, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta jajaran di wilayah, serta Pengadilan Negeri di kabupaten/kota. Koordinasi dan kerja sama yang terstruktur tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan perkara sampai dengan Tahap 2;
7. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun, baik melalui kegiatan pembelajaran daring maupun luring. Upaya tersebut bertujuan untuk memperbarui wawasan, memperdalam pemahaman, serta memastikan ketepatan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penyidikan;
8. Terjalannya dukungan serta kolaborasi internal yang solid antara fungsi penindakan dengan fungsi lainnya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, termasuk dukungan laboratorium, tenaga ahli, pengelolaan anggaran, serta sumber daya manusia. Sinergi internal tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Dalam proses pencapaiannya teridentifikasi adanya 1 (satu) kendala. Kendala tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap capaian indikator kinerja, namun berdampak pada tingkat ketuntasan penanganan perkara, khususnya pada aspek penuntutan dan pembuktian di persidangan pada perkara ke-3 di tahun 2025. Meskipun demikian, secara keseluruhan target kinerja tetap dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*, perkara ke-3 Tahun 2025 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Tahap II) pada bulan November 2025 dan saat ini masih dalam proses persidangan. Dengan demikian, dari sisi penyidikan, target kinerja Tahun 2025 telah tercapai karena seluruh perkara telah diselesaikan sampai Tahap II. Namun demikian, proses persidangan dijadwalkan pada awal Tahun 2026, sementara pada tahun anggaran 2026 terdapat keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan sidang, khususnya dalam menghadirkan saksi dan ahli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan pada aspek efektivitas penuntutan dan pembuktian di persidangan, meskipun tidak berdampak langsung terhadap capaian indikator kinerja penyidikan Tahun 2025. Sebagai upaya mitigasi, telah direncanakan pelaksanaan koordinasi dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS) pada Triwulan I Tahun

2026 guna memastikan proses persidangan tetap berjalan optimal. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun strategi teknis dan administratif, khususnya

- Penguatan koordinasi serta pembentukan dan pengembangan jejaring intelijen di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang disertai dengan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

dalam menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga risiko keterlambatan maupun kendala dalam pembuktian dapat diminimalkan. Berdasarkan tabel daftar risiko fungsi penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, kendala keterbatasan anggaran pada tahap persidangan belum dikelola secara formal sebagai risiko. Padahal, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas *outcome* penegakan hukum. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan pencatatan dan pengelolaan kendala serupa dalam register risiko secara resmi, disertai kode dan peristiwa risiko yang teridentifikasi, agar proses pengendalian dan mitigasi dapat dilaksanakan secara lebih sistematis.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengantisipasi potensi risiko, diperlukan langkah perbaikan yang terencana dan terukur. sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan CJS terkait persidangan online karena keterbatasan anggaran pada tahapan lanjutan penanganan perkara;
- Penguatan manajemen risiko pada fungsi penindakan terkait peristiwa risiko keterbatasan anggaran pada tahapan lanjutan penanganan perkara;

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomen- dasi	Rencana Tindak Lanjut	Time- line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risi- ko	Peristiwa Risiko
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara ke-3 tahun 2025 telah dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (Tahap II) pada bulan November 2025 dan sedang dalam proses persidangan,	Persidangan dijadwal-kan awal tahun 2026, dengan terbatasnya anggaran tahun 2026 diperlukan strategi koordinasi dalam pelaksana-an sidang untuk menghadir-kan saksi dan ahli	Koordina-si dengan CJS	TW I Tahun 2026	T	-	-

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104.17	358.335.000	358.156.037	99.95

Berdasarkan data pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja Tahun 2025 sebesar 96%, dengan realisasi mencapai 100%. Dengan demikian, capaian terhadap target Tahun 2025 adalah sebesar 104.17%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, alokasi yang tersedia sebesar Rp 358.335.000 dengan realisasi sebesar Rp 358.156.037 atau 99.95% dari pagu anggaran.

Tingginya persentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa program dan kegiatan pendukung penyidikan telah dilaksanakan secara optimal dan efisien, dengan serapan anggaran yang hampir seluruhnya termanfaatkan untuk mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan.

Keterkaitan antara capaian kinerja yang melampaui target (104.17%) dengan realisasi anggaran yang tinggi (99.95%) menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan sumber daya.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	3	100.00	358.335.000	358.156.037	99.95

Rincian output yang mendukung pencapaian target IKU, realisasi sebanyak 3 (tiga) perkara dari target 3 (tiga) perkara. Dengan capaian realisasi anggaran 99.95%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	72.063.000	72.039.000	99.97
2	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan. Skenario Penindakan. dan Olah TKP	240.000	240.000	100
3	Operasi Penindakan	41.352.000	41.342.994	99.98
4	Penangkapan dan Penahanan	1.554.000	1.553.000	99.94
5	Pemberkasan	31.761.000	31.756.080	99.98
6	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	15.000.000	15.000.000	100
7	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	3.500.000	3.500.000	100
8	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	22.895.000	22.895.000	100
9	Pelaksanaan Wasmatlitrik	6.364.000	6.364.000	100
10	KOORDINASI DALAM RANGKA PERTEMUAN SUPERVISI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	1.140.000	1.140.000	100
11	PENGALANGAN/PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA	7.287.000	7.286.500	99.99
12	BIMTEK/PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL PPNS (CIAO) DI JAKARTA	17.689.000	17.686.588	99.99

13	BIMTEK/PELATIHAN/WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI PPNS BIDANG PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA	22.896.000	22.889.008	99.97
14	PENGALANGAN PKK	28.295.000	28.295.000	100
15	KOORDINASI BANTUAN DIGITAL FORENSIK SIBER OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA	9.586.000	9.583.957	99.98
16	KONFERENSI FORUM INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TA 2025 DI JAKARTA	5.681.000	5.680.687	99.99
17	PENINGKATAN KOMPETENSI DI BIDANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE	14.312.000	14.309.152	99.98
18	AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI MAKASSAR	20.829.000	20.822.739	99.97
19	FORKOM/PELATIHAN/KOORDINASI/PENINGKATAN KOMPETENSI INTELIJEN PPNS BIDANG PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA	26.916.000	26.908.632	99.97
20	PENGALANGAN/KOORDINASI PPNS/PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LINTAS SEKTOR DI BANJARMASIN	300.000	300.000	100.00
21	PENGALANGAN/PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN	8.675.000	8.563.700	98.72

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan cegah tangkal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
2. Kegiatan intelijen di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
3. Pengawasan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
4. Pelaksanaan penyidikan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
5. Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait;
6. Dukungan operasional dalam rangka pembuktian perkara.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran yang mengakibatkan beberapa RO di Balai Besar POM di Palangka Raya tidak mencukupi anggarannya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada RO lain tersebut, dilakukan penambahan kegiatan pada RO QCD walaupun secara *tagging* anggaran belum sesuai. Beberapa penambahan kegiatan lain pada RO QCD sebagai berikut:

1. Bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi manajerial PPNS (CIAO/*Certified Internal Audit Officer*) di Jakarta;
2. Pengalangan PKK;
3. Audit Internal manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi tahun 2025 di Makassar.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran Kegiatan Keenam yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif. Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penjejak Digital adalah hasil kegiatan patroli siber dan profiling yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT Badan POM; yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; dan
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Dihitung berdasarkan jumlah laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan:

1. Analisis penjejak digital dihitung 12 (12 bulan);
2. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun);
3. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara perhitungan dan Formula Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

2. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
3. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%);

4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun;
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25);
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	110	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan			111.11	110	Tidak Dapat Disimpulkan

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	110	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 90% akan memberikan angka capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 111.11% dilakukan normalisasi capaian menjadi 110% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** (>110%).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	50	50	100
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	50	50	100
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	90	100	111.11

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 50%. Realisasi tersebut memberikan angka capaian sebesar 100% terhadap target triwulanan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja ini menggambarkan progres penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sekaligus pencapaian output laporan analisis.

Target sebesar 50% pada akhir Triwulan I sampai dengan Triwulan III ditetapkan dengan ketentuan terpenuhinya laporan analisis penelusuran siber, yaitu hasil kegiatan patroli siber dan penjejak digital (profiling siber) yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan dilaporkan sesuai standar yang ditetapkan yakni Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber maksimal tanggal 25 pada bulan berjalan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun yang ditetapkan sebesar 90%, dimana target tersebut tercapai apabila laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada ranah siber dan cegah tangkal telah diselesaikan sesuai standar, maka diperoleh capaian indikator kinerja sebesar 111.11% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** (>110%).

Hal ini diperoleh jika:

1. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan

kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25);

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Indikator Kinerja	Keterangan
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya.

Hal ini kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga dapat memberikan masukan dalam penetapan target serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul.

Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan dalam Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	100	106.38	 Tercapai/ Melampaui

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya mencatat realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 94%, maka capaian indikator kinerja terhadap target jangka menengah juga mencapai 106.38% dengan kategori capaian **Tercapai/Melampaui**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	90	84.03	93.37
Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	99	110

Dalam rangka mengukur capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dilakukan perbandingan kinerja antara Balai Besar POM di Palangka Raya dengan unit kerja sejenis, yaitu Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Gorontalo.

Ketiga unit kerja tersebut memiliki target yang sama pada tahun 2025, yaitu sebesar 90%, sebagaimana ditetapkan oleh unit pengampu indikator, yaitu Direktorat Siber dan Cegah Tangkal BPOM RI, sehingga perbandingan kinerja dapat dilakukan secara objektif karena menggunakan standar target yang seragam.

Dari perbandingan tersebut dapat dianalisis bahwa realisasi dua unit kerja, yaitu Balai Besar POM di Palangka Raya dan Balai Besar POM di Gorontalo, berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan Balai Besar POM di Jayapura belum mencapai target yang ditentukan.

Secara persentase capaian, Balai Besar POM di Palangka Raya menunjukkan kinerja tertinggi dengan capaian 111.11%, diikuti oleh Balai Besar POM di Gorontalo sebesar 110%, dan Balai Besar POM di Jayapura sebesar 93.37%. Keunggulan capaian Balai Besar POM di Palangka Raya dipengaruhi oleh tingkat realisasi yang mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah diselesaikan sesuai standar.

Secara keseluruhan, kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dapat dikategorikan sangat baik dalam konteks perbandingan antar unit kerja sejenis, karena tidak hanya melampaui target, tetapi juga menunjukkan konsistensi penyelesaian laporan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan target yang sama untuk seluruh UPT, capaian yang lebih tinggi mencerminkan optimalisasi pelaksanaan proses analisis laporan serta efektivitas pengendalian mutu penyusunan laporan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pencapaian target. Seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi waktu, proses, maupun pemenuhan standar mutu laporan.

Pada Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Laporan ini mencakup Analisis Penelusuran Siber, Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT. Realisasi Output dari kegiatan-kegiatan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

1. Laporan Analisis Penelusuran Siber kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Bulan Januari sd Desember 2025 sebanyak 12 Laporan yang diinput pada Aplikasi Data Crawler dan telah diberikan *feedback* oleh unit Pengampu Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI sebagai berikut:
 - Laporan hasil patroli siber yang dilaporkan UPT telah ditindaklanjuti Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan mengajukan surat rekomendasi takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan *Indonesian E-Commerce Association (idEA)* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing. Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengajuan Takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta *Indonesian E-Commerce Association (idEA)* Periode Januari-Desember 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya Total yang Direkomendasikan *Takedown* adalah 237 link, dan jumlah Tautan yang telah ter *Takedown* adalah 230 link dengan persentase sebesar 97.05%;
 - Laporan Profiling atau Laporan Penyusunan Profil Pelanggaran/Kejahatan Obat dan Makanan Informasi yang dilaporkan telah dihimpun ke dalam database profiling Direktorat Siber Obat dan Makanan.
2. Laporan Analisis Kerawanan kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 1 (satu) laporan dengan judul: “Penyalahgunaan Obat obatan Tertentu di Kalangan Pelajar SMA di Buntok Kabupaten Barito Selatan: Studi Kasus dan Upaya Pencegahannya” yang telah diberikan penilaian oleh Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya dan Monitoring dan evaluasi dari unit pengampu Direktorat Cegah tangkal Badan POM RI dengan hasil evaluasi sebagai berikut :
 - Seluruh data yang disampaikan dalam pemetaan kerawanan kejahatan telah valid/disetujui (100%) dengan jenis sumber informasi yang beragam;

- Penyusunan analisis telah dilaksanakan dengan judul “Penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu di Kalangan Pelajar SMA di Buntok Kabupaten Barito Selatan: Studi Kasus dan Upaya Pencegahannya” dan telah dilengkapi dengan penilaian Kepala UPT.
3. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT sebanyak 1 (satu) Laporan yang telah diberikan *feedback* MS (Memenuhi Syarat) oleh Unit pengampu yaitu Direktorat Cegah Tangkal Badan POM RI dengan hasil revidir Direktorat Cegah tangkal Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut :
- Bahwa Seluruh rekomendasi analisis telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Palangka Raya;
 - Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan pengukuran respon positif kegiatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan capaian kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan yang terstruktur, koordinasi internal dan eksternal dengan lintas sektor yang berjalan efektif, pengendalian mutu laporan analisis yang dilakukan secara berjenjang sebelum di finalisasi dan monitoring evaluasi terhadap progress penyusunan laporan.

Tidak adanya kendala operasional menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Meskipun tidak terdapat kendala aktual, indikator ini telah diidentifikasi dan dikelola sebagai risiko dengan kode risiko S06.01.01, yaitu: *“Kesimpulan dari kajian analisis belum menggambarkan fakta di lapangan.”*

Risiko tersebut menunjukkan bahwa meskipun laporan telah selesai sesuai standar, namun masih terdapat potensi kelemahan pada aspek kualitas substansi analisis, khususnya dalam hal kedalaman kajian dan keterkaitan antara data dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, fokus perbaikan ke depan tidak lagi pada kuantitas penyelesaian laporan, melainkan pada peningkatan kualitas dan ketajaman analisis.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada periode berikutnya agar laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat memberikan dampak strategis dalam penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan metodologi analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan berbasis data;

2. Peningkatan kualitas SDM fungsi penindakan;
3. Monitoring pengelolaan risiko S06.01.01 dalam forum manajemen risiko;
4. Penguatan Pengumpulan dan Pendalaman Informasi di Lapangan dan media daring;
5. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor termasuk CJS, APH lainnya dan instansi pengemban fungsi intelijen lainnya;
6. Penggalangan dan Koordinasi dengan organisasi profesi.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time-line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana	Peningkatan Kualitas Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan olahan	-	Y	S06.01.01	Kesimpulan dari kajian analisis belum menggambarkan fakta di lapangan

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	1.100.000	1.100.000	100

Capaian kinerja yang melampaui target (111.11%) dengan realisasi anggaran sebesar 100% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan kegiatan serta perhitungan kebutuhan anggaran.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	14	14	100	1.100.000	1.100.000	100

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar						

Berdasarkan data pada Indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja pada Tahun 2025 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 111.11%. Dengan target rincian *output* berupa Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT Balai Besar POM di Palangka Raya sebanyak 14 Laporan dan realisasi 14 laporan.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	VERIFIKASI DATA HASIL PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	1.000.000	1.000.000	100,00
2	KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PENINDAKAN	100.000	100.000	100,00

Dari sisi anggaran, dialokasikan dana sebesar Rp 1.100.000 dan terealisasi seluruhnya sebesar Rp 1.100.000 atau 100%. Realisasi anggaran yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut, kegiatan dilaksanakan secara paralel dengan memanfaatkan anggaran dari indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Strategi ini diterapkan sebagai bentuk efisiensi anggaran pada fungsi penindakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain kegiatan Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan serta Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penindakan. Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.



Sasaran Kegiatan

Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu Layanan Publik UPT yang prima. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	105.53	Sangat baik
Capaian Sasaran Kegiatan			105.53	105.53	Sangat baik

24

Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di instansi pemerintah merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BPOM dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Implementasi PEKPPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari indikator kinerja bagi UPT BPOM dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Mengukur Efektivitas dan Akuntabilitas Pelayanan:** PEKPPP menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengukur sejauh mana UPT BPOM telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Indikator-indikator yang diukur dalam PEKPPP, seperti kepuasan pengguna layanan, waktu penyelesaian layanan, dan penanganan pengaduan, secara langsung mencerminkan efektivitas operasional dan akuntabilitas UPT BPOM kepada masyarakat.

2. **Identifikasi Area Peningkatan:** Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, UPT BPOM dapat mengidentifikasi area-area dalam penyelenggaraan pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil PEKPPP menjadi *feedback* berharga untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan infrastruktur pelayanan. Dengan demikian, PEKPPP bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi dan Kepercayaan Publik:** Informasi mengenai kinerja pelayanan publik yang dihasilkan melalui PEKPPP dapat menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data kinerja pelayanan, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh UPT BPOM. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
4. **Keselarasan dengan Tujuan Strategis Nasional:** Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan PEKPPP secara efektif, UPT BPOM turut berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
5. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Data dan informasi yang dihasilkan dari PEKPPP menjadi landasan yang kuat bagi pimpinan UPT BPOM dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan. Keputusan yang didasarkan pada data kinerja yang valid akan lebih terukur dampaknya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan BPOM dan diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	105.53	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya dilakukan pada tahun 2025 dengan target sebesar 4.7 dan telah diterima hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik melalui PEKPPP Tahun 2025 dengan nilai 4.96 dengan kriteria **Pelayanan Prima**. Capaian Terhadap target tahun 2025 diperoleh sebesar 105.53% dengan kategori **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Pelayanan Publik UPT	n/a	n/a	n/a
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	n/a	n/a	n/a
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	n/a	4,96	n/a
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	4.7	4.96	105.53

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.01	4.58	114.21
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	4.4	4.59	104.32
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	4.65	4.77	102.58
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	4.7	4.96	105.53

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2025, sehingga capaian terhadap realisasi kinerja triwulan diperoleh nilai 4.96 dengan capaian realisasi Triwulan IV sebesar

105.53%. Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan dilakukan perbandingan dengan realisasi periode mulai tahun 2022 sampai dengan 2025. Berdasarkan tabel di atas, terdapat tren peningkatan yang signifikan pada Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM di Palangka Raya selama periode 2022 hingga 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam bertransformasi menuju standar Pelayanan Prima. Grafik Profil Nilai IPP BBPOM di Palangka Raya menunjukkan tren positif yang konsisten selama empat tahun terakhir. Dimulai dari angka 4.58 pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya di angka 4.96 pada tahun 2025. Peningkatan ini membuktikan adanya komitmen berkelanjutan dalam melakukan reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9	4.96	101.22	 Tercapai/ Melampaui

Sampai dengan tahun 2025, realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT telah berhasil melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 4.96 dari target Renstra sebesar 4.9, persentase capaian indikator ini mencapai 101.22% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini merefleksikan komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi melampaui standar yang direncanakan untuk periode jangka menengah. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	4.7	4.7	100.00
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	4.7	5	106.38

Untuk mengukur posisi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dalam lingkup organisasi yang lebih luas, dilakukan pembandingan (*benchmarking*) dengan unit kerja sejenis yang memiliki target tahunan yang sama, yaitu sebesar 4.7. Berdasarkan tabel di atas, realisasi IPP BBPOM di Palangka Raya (4.96) menunjukkan performa yang sangat kompetitif di antara unit kerja sejenis. Capaian BBPOM di Palangka Raya berhasil melampaui capaian BBPOM di Jayapura (4.7) yang berada tepat pada angka target. Namun demikian, jika dibandingkan dengan BBPOM di Gorontalo (5.0), BBPOM di Palangka Raya masih memiliki ruang untuk peningkatan kualitas (dengan gap sebesar 0.04 poin) guna mencapai nilai Indeks Pelayanan Publik yang sempurna.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dimana tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4.96 (kategori pelayanan prima). Pencapaian ini merupakan bukti dari komitmen kuat seluruh jajaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pedoman evaluasi kinerja terkait.

Adapun poin penting yang menjadi faktor keberhasilan capaian adalah sebagai berikut:

- **Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan:** Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan meningkat tajam, ditandai dengan ketersediaan dan keteraksesan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang informatif dan dipublikasikan secara luas. Maklumat Pelayanan juga dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.
- **Pengelolaan Pengaduan:** Terdapat peningkatan signifikan dalam kecepatan dan ketuntasan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pemanfaatan sistem pengaduan yang terintegrasi berjalan efektif, meningkatkan kepercayaan publik.
- **Inovasi Pelayanan Publik:** Adopsi teknologi dan inovasi, seperti layanan digital terpadu melalui layanan pengujian sampel pihak ketiga melalui SIPT Terintegrasi, mekanisme pengaduan melalui kanal pengaduan resmi (SP4N-Lapor, Halo Infokom, akun media sosial BBPOM di Palangka Raya, Lapor KaBalai), dan Implementasi Inovasi SMART LAURA telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan, yang menjadi faktor pendorong utama kenaikan skor.
- **Profesionalisme SDM:** Program peningkatan kompetensi aparatur yang berfokus pada *service excellent* dan etika pelayanan terbukti efektif dalam meningkatkan sikap dan perilaku petugas layanan, yang tercermin dari

tingginya hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang dikumpulkan setiap bulannya.

- **Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik,** khususnya dalam penyediaan pelayanan publik kelompok rentan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Indeks Pelayanan Publik UPT	Standar Pelayanan Tahun 2025 belum dipahami secara optimal dari masyarakat/ pengguna layanan	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan	Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan 2026 pada berbagai media	s.d TW IV Tahun 2026	T	-	-
	Variabilitas kompetensi petugas pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia	Meningkatkan kompetensi petugas pelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoringan pujan mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S04.01.02	Petugas KIE belum memiliki kompetensi yang memadai
	Masih terdapat GAP dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan	Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, dalam memenuhi pelayanan pelanggan prioritas/ kelompok rentan	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S08.01.03	Layanan publik BBPOM di Palangka Raya belum memadai untuk melayani kaum rentan
	Efisiensi anggaran sehingga sulit dalam memenuhi kehadiran pelayanan publik di BBPOM di Palangka Raya pada MPP kab/kota catchment area	Mengembangkan Inovasi Layanan Publik	Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MPP Target (Kota Palangka Raya) dan kabupaten potensial lainnya	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S08.01.02	Layanan tele public service melalui Inovasi Smart Laura pada MPP Kab/Kota mengalami gangguan koneksi/ kerusakan dan atau kendala lainnya
	Masih terdapat GAP pada jangkauan/ akses edukasi dan/atau pengembangan kapasitas	Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan	Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan	s.d TW IV Tahun 2026	Y	S08.01.03	Layanan publik BBPOM di Palangka Raya belum memadai

	pengguna layanan dari kelompok rentan		kader, fasilitator UMKM dan KIE				untuk melayani kaum rentan

Atas capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya, untuk perbaikan kinerja direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan publik;
2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik;
3. Mengawal implementasi Inovasi Layanan Publik SMART LAURA secara berkesinambungan;
4. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	145.537.000	144.497.854	99.29

Berdasarkan tabel di atas, Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT yang melampaui target didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif. Dari total Alokasi Anggaran Rp 145.537.000, telah terealisasi sebesar Rp 144.497.854, atau dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99.29%. Realisasi anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output dan indeks kinerja.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	711	792	111,39	145.537.000	144.497.854	99.29

Dari total Alokasi Anggaran Rp 145.537.000, telah terealisasi sebesar Rp 144.497.854, atau dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 99.29%. Realisasi anggaran yang tinggi ini menunjukkan diperoleh dari Rincian Output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PEMBERIAN/PENCABUTAN SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI/DISTRIBUSI/PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN	12.157.000	12.154.400	99.98
2	GAP ASSESSMENT PELAKU USAHA	14.140.000	13.140.000	92.93
3	RAPAT MONITORING EVALUASI KEGIATAN /PELATIHAN DI BIDANG SERTIFIKASI	12.069.000	12.066.963	99.98
4	OPEN HOUSE LAYANAN KELOMPOK RENTAN	6.760.000	6.760.000	100.00
5	NET ZERO CARBON PROGRAMME	1.411.000	1.411.000	100.00
6	LAYANAN SERTIFIKASI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	99.000.000	98.965.491	99.97

Memperhatikan Sub Komponen kegiatan dari Rincian Output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT, berikut adalah analisis program dan kegiatan yang menjadi pendorong utama keberhasilan capaian kinerja, berdasarkan tingkat penyerapan anggarannya:

a. Layanan Sertifikasi Pengujian Sampel Pihak Ketiga (Sub Komponen 6)

Sebagai komponen dengan alokasi anggaran terbesar, realisasi yang hampir mencapai 100% ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelayanan sertifikasi dan pengujian sampel berjalan sangat optimal. Tingginya realisasi output "Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan" sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan ini. Optimalnya layanan ini berkontribusi langsung pada percepatan penyelesaian sertifikasi bagi masyarakat atau pihak ketiga, yang pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pelayanan Publik melalui tingginya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha atas layanan yang diberikan.

b. Pemberian/Pencabutan Sertifikasi Sarana Produksi/Distribusi/Pelayanan Obat dan Makanan (Sub Komponen 1)

Realisasi anggaran yang sangat tinggi pada sub komponen ini menunjukkan bahwa proses pemberian dan pencabutan sertifikasi sarana telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini krusial dalam memastikan standar sarana produksi dan distribusi, yang merupakan bagian penting dari layanan publik yang berkualitas dan terjamin. Penyerapan anggaran yang optimal di sini mendukung secara langsung capaian rincian output sertifikasi yang melampaui target.

c. Rapat Monitoring Evaluasi Kegiatan / Pelatihan di Bidang Sertifikasi (Sub Komponen 3)

Realisasi anggaran yang optimal pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelatihan menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas proses sertifikasi. Kegiatan ini penting untuk

memastikan bahwa petugas sertifikasi memiliki kompetensi yang memadai dan proses bisnis dievaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

d. Open House Layanan Kelompok Rentan (Sub Komponen 4)

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi anggaran penuh 100% merupakan indikator positif dari upaya organisasi dalam memberikan layanan yang inklusif. Kegiatan yang menysasar kelompok rentan ini secara langsung berdampak pada persepsi publik terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pelayanan Publik.

e. Net Zero Carbon Programme (Sub Komponen 5)

Realisasi anggaran 100% pada program ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Meskipun alokasi anggarannya kecil, pelaksanaan yang optimal dari program-program pendukung seperti ini memberikan nilai tambah pada citra publik organisasi, yang dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pelayanan Publik.

g. Gap Assessment Pelaku Usaha (Sub Komponen 2)

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92.93%, kegiatan "Gap Assessment Pelaku Usaha" memiliki penyerapan anggaran yang paling rendah di antara sub komponen lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kendala tersebut mungkin terkait dengan partisipasi pelaku usaha, proses pelaksanaan asesmen di lapangan, atau efisiensi anggaran yang terjadi. Kurang optimalnya pelaksanaan asesmen ini dapat berdampak pada pemahaman petugas terhadap kesenjangan (gap) yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi standar sertifikasi. Hal ini berpotensi menghambat petugas dalam memberikan bimbingan atau layanan yang lebih proaktif dan tepat sasaran kepada pelaku usaha di masa mendatang. Meskipun dampaknya tidak signifikan terhadap capaian output tahun 2025 yang melampaui target, hal ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan bagi peningkatan kinerja dan kualitas layanan pada periode selanjutnya.

Selain Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi tagging anggarannya, capaian indikator ini juga didukung oleh kolaborasi kegiatan dan anggaran yang sinergis dari anggaran RO lain. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mencapai indikator kinerja yang optimal di tengah efisiensi dan blokir anggaran Tahun 2025. Dukungan anggaran dari RO lain yang mendukung capaian indikator ini diperoleh dari pembiayaan kegiatan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik, Forum Konsultasi Publik (FKP), pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik serta penyediaan dukungan sarana prasarana untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik.

Kegiatan yang menunjang Layanan Publik sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan Review Standar Layanan Publik dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.26 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Publik di BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah dilakukan review Maklumat Pelayanan dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.27 Tahun 2025 dengan menambahkan komitmen dalam memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta anak-anak) serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah membuat publikasi hasil SKM Mandiri bulan Januari-September tahun 2025 pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah memperhatikan kebijakan jam pelayanan/kerja bagi pelanggan dan aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan;
- Telah menerapkan aturan terkait penerapan 5S di area layanan publik;
- Telah melaksanakan sosialisasi terkait konsultasi dan pengaduan menggunakan SP4N-LAPOR kepada masyarakat/publik;
- Melaksanakan pelaporan layanan melalui www.simpellpk.pom.go.id;
- Menyusun Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai PPID Pelaksana BBPOM di Palangka Raya;
- Melakukan publikasi Keamanan Obat dan Makanan pada media luar ruang (Baliho) pada jalan protokol dengan materi Cek Produk Kosmetik Aman, BPOM Mobile, SKM 2025 & Maklumat Pelayanan;
- Melaksanakan Bimtek Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan kepada seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya, tenaga kontrak, security dan resepsionis pada bulan Mei 2025;
- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh *stakeholder* pelayanan publik, pengguna layanan, pakar, dan perwakilan organisasi masyarakat pada bulan Juni 2025;
- Melaksanakan perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya dalam memenuhi standar layanan publik bagi kelompok rentan
- Melaksanakan dan memantau Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kab/Kota melalui Inovasi SMART LAURA di kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas dan Kota Palangka Raya (layanan tatap muka sesuai jadwal);
- Telah selesai pelaksanaan SKM Tahun 2025 (terpusat);
- Telah mengikuti Desk Monev PEKPPP Tahun 2025;

- Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Badan Publik dan PPID Pelaksana yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan BPOM;
- Telah dikembangkan Inovasi Pelayanan Publik yang dikembangkan melalui rencana aksi AoC BBPOM di Palangka Raya, yaitu Inovasi Jendela Kinerja, BALANGA (buku informasi layanan publik dengan huruf *Braille*) dan SIKAP GASPOL (sosialisasi kanal pengaduan resmi BBPOM di Palangka Raya bagi masyarakat);
- Melaksanakan Open House Pelayanan Publik bagi pengguna Layanan Kelompok Rentan untuk memberikan penilaian terhadap sarana prasarana pelayanan publik khususnya bagi kelompok disabilitas.



Sasaran Kegiatan

*Terwujudnya tatakelola pemerintah
Unit Organisasi yang optimal*

Sasaran Kegiatan 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
25.	Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	87.83	100.41	100.41	Sangat Baik
26.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83.87	80.81	96.35	96.35	Baik
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100.00	100.00	Baik
28.	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3	2.93	97.93	97.93	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan				98.61	98.61	Baik

25

Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup berbagai aspek, seperti organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi melibatkan perubahan fundamental dalam cara

pemerintah beroperasi, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.

1. Reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek penting, seperti:
 - a. **Organisasi:** Memastikan kelembagaan pemerintah efisien dan terstruktur.
 - b. **Tata Laksana:** Menyederhanakan prosedur kerja dan meningkatkan efisiensi.
 - c. **Peraturan Perundang-undangan:** Memastikan adanya dasar hukum yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
 - d. **Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur negara.
 - e. **Pengawasan:** Memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan.
 - f. **Akuntabilitas:** Menegakkan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - g. **Pelayanan Publik:** Meningkatkan kualitas dan menjangkau masyarakat.
 - h. **Pola Pikir dan Budaya Kerja:** Mengubah mindset dan perilaku aparatur negara menuju yang lebih positif dan berintegritas.
2. Tujuannya adalah:
 - a. **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel :** Melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. **Birokrasi yang Efektif dan Efisien :** Meningkatkan produktivitas dan hasil kerja;
 - c. **Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas :** Menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17.5 %

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW IV Tahun 2025	Realisasi TW IV Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW IV Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	88.19	100.41	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan IV yang sekaligus akhir periode tahun 2025 dibandingkan dengan target pada Triwulan berjalan masuk pada kriteria capaian Sangat Baik. Dimana realisasi pada indikator ini sebesar 88.19 atau capaian 100.41%. Terdapat perubahan kriteria dari pengukuran sebelumnya dimana kriteria Tidak Dapat Disimpulkan mulai pada capaian di atas 120% diturunkan menjadi di atas 110% disesuaikan dengan SE terbaru untuk Pengukuran dan pelaporan Kinerja 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Pembangunan ZI UPT	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	N/A	88.19	Belum dapat disimpulkan
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	87.83	88.19	100.41

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Indeks RB UPT	86.2	87.95	102.03
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	89.2	88.18	98.86
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	92.2	87.33	94.72
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	87.83	88.19	100.41

Realisasi kinerja Indeks RB UPT pada Triwulan IV dibandingkan dengan target pada Triwulan III Tahun 2025 dan Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 Tidak Dapat Dilakukan (N/A) karena penetapan target pada Indikator ini bersifat tahunan dan akan diukur tiap akhir tahun. Meskipun berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.277 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada BBPOM di Palangka Raya capaian indikator ini keluar di Triwulan III dan diperoleh hasil sebesar 88.19.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di atas. Terjadi fluktuasi realisasi dan capaian dari tahun 2022 hingga 2025 dimana terjadi peningkatan realisasi dan capaian dibanding 2024, 2023 dan 2022, namun capaian menurun sebesar 1.62% dibandingkan tahun 2022. Penurunan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2022 dikarenakan terjadi perbedaan target dimana tahun 2025

mengalami kenaikan target sebesar 1.63 dan realisasi tahun 2025 belum bisa meningkat secara signifikan.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	88.19	98.17	 Tercapai/ Melampaui

Capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100.41 dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ada di Renstra sebesar 98.17. maka capaian tahun 2025 masuk kategori telah tercapai. Dibutuhkan usaha keras dan kerja cerdas dari tiap pegawai agar berkontribusi maksimal di tiap Pokja dan AoC untuk mempertahankan capaian dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kerja sama yang erat di lintas fungsi perlu ditingkatkan. Pengukuran setiap rencana kerja dan inovasi harus bisa menggambarkan hingga dampaknya yang bisa dirasakan masyarakat.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83	88.19	100.41
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	87.1	89.91	103.23
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	91.97	92	100.03

BBPOM di Palangka Raya berada di *cluster* yang sama dengan BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo. Besaran target dan capaian BBPOM di Palangka Raya hampir sama dengan BBPOM di Jayapura namun lebih tinggi capaian BBPOM di Jayapura sebesar 2.82% (103.23%). Sedangkan target kinerja BBPOM di Gorontalo paling tinggi dibanding BBPOM di Palangka Raya dan BBPOM di Jayapura dan capaiannya mampu melampaui target sebesar 100.03%.

Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian dari ketiga Balai tersebut adalah 101.22% atau telah mencapai target yang ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	Hasil penilaian dari Inspektorat Badan POM seperti pada uraian di bawah	Peningkatan kualitas pembangunan ZI dengan melaksanakan perbaikan atas rekomendasi Inspektorat Badan POM	TW 1-4 tahun 2026	Y	S09.0 1.01	Resistensi pegawai terhadap perubahan
					Y	S09.0 1.02	Tidak semua orang siap untuk digitalisasi
					Y	S09.0 1.03	tidak diketahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
					Y	S09.0 1.04	Pelaporan apel pada SIMOD terlambat
					Y	S09.0 1.05	Kelengkapan dokumen dasar pegawai tidak lengkap
					Y	S09.0 1.06	data kinerja yang tidak valid. tidak tertelusur dan terkumpul tepat waktu
					Y	S09.0 1.07	Public campaign gratifikasi belum dilakukan secara berkala
					Y	S09.0 1.08	Petugas tidak memahami SMAP
					Y	S09.0 1.09	Kualitas laporan implementasi inovasi pelayanan publik kurang memadai

Hasil penilaian atas Pembangunan ZI sebesar 88.19 masih di atas target sebesar 87.83. namun jika dicermati lebih dalam. masih terdapat capaian nilainya masih

bisa ditingkatkan untuk masing-masing Pokja dan 1 bagian di aspek pengungkit (Capaian Kinerja lebih baik) dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.277 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025. sehingga masih ada peluang perbaikan agar pembangunan ZI di masa mendatang semakin baik lagi yang tertuang dalam rekomendasi yang disampaikan Inspektorat Badan POM.

Agenda pembangunan ZI Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan/program kerja yang mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- BBPOM di Palangka Raya berhasil mempertahankan konsistensi pembangunan ZI dengan memotret adanya progres pembangunan ZI (before/after)
- pengisian LKE ZI dan data dukung LKE melalui link yang telah disediakan Badan POM telah sesuai dan memenuhi syarat (MS)
- pelaksanaan rencana kerja prioritas telah dijalankan dengan baik oleh setiap Pokja
- implementasi, monitoring dan evaluasi inovasi telah dilakukan dengan baik dan konsisten
- kegiatan pendukung yang diinisiasi *Agent of Change* (AoC) bisa menjadi katalisator atas pembangunan ZI BBPOM di Palangka Raya
- diperolehnya apresiasi dari beberapa UPT lain terkait inovasi yang dikembangkan sehingga UPT lain merasa perlu melakukan ATM dari inovasi BBPOM di Palangka Raya

Pembangunan ZI diperoleh nilai sebesar 88.19 atau capaian 100.41% dari target 87.83. Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat capaian nilainya masih bisa ditingkatkan untuk masing-masing Pokja dan 1 bagian di aspek pengungkit (Capaian Kinerja lebih baik) dinilai tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun peningkatan pembangunan ZI. Inspektorat memberikan saran atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI, yaitu :

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
1	Telah terdapat prosedur/mekanisme dalam pembentukan tim kerja ZI namun belum terdapat kriteria penentuan tim untuk setiap area pembangunan ZI	Menetapkan kriteria penentuan tim untuk setiap area pembangunan ZI	Manajemen Perubahan
2.	Pemantauan dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI telah dilakukan. Namun, tidak terdapat kendala/hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk rencana kerja yang belum terlaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI yang dilengkapi dengan kendala/hambatan serta tindak lanjut yang dilakukan secara berkala	Manajemen Perubahan

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
3.	Belum terdapat SOP Mikro yang mengatur pelaksanaan inovasi	Menyusun SOP untuk pelaksanaan inovasi	Tata Laksana
4.	Belum terdapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE. termasuk dampak implementasi SPBE pada pelayanan publik	Tata Laksana
5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi hanya dilaksanakan pada inovasi terkait fungsi penyidikan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penggunaan teknologi informasi	Tata Laksana
6.	Unit kerja telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan transformasi digital melalui inovasi sistem internal secara berkala namun hasil monitoring dan evaluasi tidak menunjukkan adanya perubahan kondisi dari periode sebelum dan setelahnya	Menyusun analisis perbandingan kondisi sebelum dan sesudah transformasi digital untuk menunjukkan efektivitas dan perubahannya	Tata Laksana
7.	Belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi internal telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan hasil assessment pegawai.	Menyusun mekanisme movev mutasi/rotasi dan mendokumentasikan seluruh proses untuk memastikan mutasi/rotasi telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan berdasarkan hasil assessment pegawai	Sistem Manajemen SDM Aparatur
8.	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi hanya berisi monitoring ketercapaian Jumlah Pelajaran (JP) dari masing-masing pegawai belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja	Melakukan dan menyusun monitoring dan evaluasi kinerja pasca pelatihan dikaitkan dengan peningkatan kinerja	Sistem Manajemen SDM Aparatur
9	Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja namun belum terdapat data dukung bahwa implementasi tersebut telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan	Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan aturan disiplin/kode etik serta mendokumentasikan hasilnya untuk menjamin konsistensi pelaksanaan aturan disiplin	Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Keterlibatan pimpinan secara langsung pada perencanaan maupun pemantauan kinerja belum terdokumentasi dengan baik	Melibatkan pimpinan secara langsung pada proses perencanaan dan pemantauan kinerja dan mendokumentasikan arahan pimpinan dengan baik	Sistem Manajemen SDM Aparatur

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
11.	Belum seluruh personel/SDM pengelola akuntabilitas telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja	Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh SDM pengelola akuntabilitas	Sistem Manajemen SDM Aparatur
12.	Sebagian besar capaian kinerja utama tercapai 100% dari target yang ditetapkan. namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya.	Melakukan identifikasi penyebab penurunan kinerja dan menyusun strategi pemulihan berbasis data serta target capaian yang realistis	Akuntabilitas
13.	Unit kerja telah melakukan upaya dalam pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign terkait gratifikasi. namun tidak terdapat pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi selama tiga tahun terakhir	Meningkatkan upaya internalisasi terkait pengelolaan gratifikasi pada unit kerja dan mendorong seluruh pegawai untuk aktif dalam pelaporan penerimaan ataupun penolakan gratifikasi	Pengawasan
14.	Telah terdapat inovasi terkait pengendalian dan pengawasan pada unit kerja. namun belum terdapat laporan implementasi inovasi tersebut	Menyusun laporan pelaksanaan inovasi pengendalian dan pengawasan untuk menunjukkan progres dan dampaknya secara nyata	Pengawasan
15.	Monitoring pengaduan telah dilakukan secara berkala. namun belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil	Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil	Pengawasan
16.	Belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan masukan stakeholder	Melakukan reviu standar pelayanan dengan mengacu pada masukan stakeholder dan hasil SKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
17.	Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi. namun belum terlihat bukti pelaksanaan tindak lanjut telah selesai dilaksanakan	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dengan RATL yang berkelanjutan dan tuntas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
18.		Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Semua Pokja

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83	88.19	100.41	5,789,458,650	5,771,646,341	99.69

Berdasarkan data pada Indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menetapkan target kinerja pada Tahun 2025 sebesar 87.83 dan terealisasi sebesar 88.19. sehingga menghasilkan capaian sebesar 100.41%. Alokasi anggaran pada indikator ini sebesar Rp. 5,789,458,650.- dengan realisasi sebesar Rp. 5,771,646,341 atau menghasilkan capaian 99.69%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	100.00	312,633,000	301,786,645	96.53
Layanan Perkantoran	1	1	100.00	7,915,151,000	7,904,238,230	99.86

Indikator ini didukung oleh 2 anggaran rutin Balai Besar POM di Palangka Raya. Pertama anggaran berupa Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT dan memiliki rincian output sebanyak 1 laporan. dimana Rincian output tercapai dengan terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT 1 kegiatan. sehingga capaian rincian output indikator sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96.53%. Kedua adalah anggaran Layanan Perkantoran dan memiliki rincian output sebanyak 1 layanan. dimana Rincian output tercapai dengan terlaksananya. sehingga capaian rincian output indikator sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99.86%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGELOLAAN ARSIP	2,236,000	2,235,819	99.99
2	PEMBINAAN/SOSIALISASI/DISEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	5,112,000	5,100,075	99.77

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
3	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	4,081,500	4,081,500	100.00
4	PEMUSNAHAN BMN	5,770,000	5,770,000	100.00
5	PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN/ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ GREEN LABORATORY DALAM RANGKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	12,829,750	11,371,534	88.63
6	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	91,280,000	91,264,704	99.98
7	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	1,140,000	1,140,000	100.00
8	PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	96,676,000	91,846,232	95.00
9	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	4,140,777,000	4,133,502,614	99.82
10	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	843,352,000	839,013,426	99.49
11	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	29,338,000	28,910,800	98.54
12	PENGADAAN JASA OUTSOURCING	249,038,400	248,998,058	99.98
13	OPERASIONAL PERKANTORAN	61,269,800	62,149,294	101.44
14	LANGGANAN DAYA DAN JASA	82,428,800	88,070,993	106.84
15	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	84,530,000	82,040,851	97.06
16	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	5,452,600	5,329,460	97.74
17	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	36,230,600	31,110,754	85.87
18	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	20,800,000	20,819,531	100.09
19	JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	840,000	709,527	84.47
20	KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	8,080,400	9,985,418	123.58
21	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	8,195,800	8,195,752	100.00

Sub komponen pendukung pada IKU Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM terdiri dari : PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN/ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ GREEN LABORATORY DALAM RANGKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN sebesar Rp 12,829,750 dan terealisasi seluruhnya sebesar Rp 11,371,534 atau 88.63% dan PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS sebesar Rp 91,280,000 dan terealisasi seluruhnya sebesar Rp 91,264,704 atau 99.98%. sehingga menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang melampaui target (100.41%) dengan realisasi anggaran sebesar 88.63% dan 99.98% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan kegiatan serta perhitungan kebutuhan anggaran.

26

Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang memiliki kapabilitas, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan nilai yang didapatkan dari hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya yang mencakup :

4. Perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
5. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
6. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
7. Evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
8. Pencapaian kinerja atas output maupun outcome.

Dengan rentang nilai pemenuhan sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Penilaian AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi penilaian AKIP yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	80.81	96.35	96.35	Baik

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menilai terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada semester I tahun 2025 telah terlaksana melalui kegiatan evaluasi pada tanggal 26 Agustus 2025. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Utama Nomor PI.04.71.7.01.26.57 tanggal 27 Januari 2026 mengenai laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2025, penilaian AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 83,87.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	83.87	80.81	96.35

Indikator Nilai AKIP digunakan untuk mengukur mewujudkan tata kelola pemerintah BBPOM di Palangka Raya secara optimal bersama dengan tiga

indikator lainnya yaitu, Nilai Pembangunan ZI, Nilai Kinerja Anggaran dan Nilai Maturitas Risiko pada Renstra 2025-2029. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan duabelas tahun 2025, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2020	Capaian tahun 2022
Nilai AKIP UPT BPOM	81	77.05	95.12
	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian tahun 2021
	78.6	80.36	102.24
	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
	80.1	81.79	102.11
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	81.6	82.91	101.61
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	85.25	83.37	97.79
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	83.87	80.81	96.35

Indikator Nilai AKIP telah diukur sejak Renstra 2015-2019, hal tersebut menunjukkan komitmen dalam rangka penataan dan penguatan organisasi BPOM. Dalam penerapannya AKIP mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan pengembangan organisasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Realisasi AKIP sejak tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024, sebesar 6.32 dari realisasi 77.05. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2024 mendekati realisasi tahun 2021 sebesar 2,56. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan komponen capaian kinerja. Penurunan tertinggi disebabkan 62.07% indikator kinerja tahun 2024 tidak lebih baik capaian kinerjanya dari tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	85.87	80.81	94.11	 Akan Tercapai

Realisasi nilai AKIP BBPOM di palangka Raya pada tahun 2025 sebesar 80.81 mencapai 94.11 % jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025-2029 dengan kategori “Akan Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Palangka Raya telah sejalan dengan target yang ditetapkan dan mencerminkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang cukup baik. Pengawasan terhadap capaian nilai AKIP perlu diperkuat terhadap seluruh komponen penilaian dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	80.81	96.35
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	77.17	74.72	96.83
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	80.1	76.44	95.43

Hasil perbandingan realisasi nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya terhadap unit kerja sejenis antara lain BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo menunjukkan bahwa ketiga unit kerja memiliki tingkat capaian kinerja yang relatif sebanding, dengan rentang capaian antara 95,43% sampai dengan 96,83%. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing unit kerja telah berjalan secara konsisten dan terarah sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun dari ketiga unit kerja tersebut belum mencapai realisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.04.71.7.01.26.03 tanggal 5 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 terhadap 83 (delapan puluh tiga) Satuan Kerja di Lingkungan BPOM, rata-rata nilai SAKIP sebesar 78.48 mengalami penurunan sebesar 0.48 jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP tahun 2024. Penyebab utama penurunan tersebut adalah menurunnya capaian kinerja output dan outcome pada sebagian Satuan Kerja.

Meski mengalami penurunan nilai akibat capaian kinerja sebesar 2.56, namun Nilai SAKIP BBPOM di Palangka Raya tetap menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari perolehan nilai 80.81 yang berada diatas rata-rata nasional sebesar 78.48. Jika dibandingkan dengan unit kerja sejenis realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Gorontalo yang nilai SAKIPnya masih berada dibawah rata-rata nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terlepas dari dinamika penurunan capaian kinerja pada 62.07% indikator kinerja , BBPOM di Palangka Raya tetap memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam penerapan SAKIP khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi capaian Nilai AKIP tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai target dan terdapat penurunan nilai dibandingkan dengan tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap masing-masing komponen SAKIP adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Kinerja**
Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia antara lain dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan aktivitas serta anggaran yang mendukung kinerja namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
 - Dokumen Renstra balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029 belum diformalkan dan belum dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen kinerja berkelanjutan
 - Terdapat ketidaksesuaian berupa perbedaan penyajian nomenklatur Sasaran Strategis antara dokumen PK dan RAPK dengan yang tercantum pada manual IKU.
 - Terdapat beberapa indikator Loka yang masih tercantum dalam SK IKU dan belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menimbulkan perbedaan indikator antara SK IKU dengan dokumen PK dan RAPK.

- **Pengukuran Kinerja**
Pemenuhan kriteria komponen pengukuran kinerja berupa tersedianya manual IKU dan SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
 3. Pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan secara tertib dan konsisten setiap bulan, khususnya dalam pembaruan status rekomendasi pada menu rencana tindak lanjut.
- **Pelaporan Kinerja**
Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
 - Terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja antara dokumen pelaporan kinerja dan Aplikasi SIMETRIS akibat adanya perubahan pada proses perhitungan Definisi Operasional pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyebabkan penyajian analisis tidak selaras atas hasil realisasi dan capaian kinerja antar dokumen pelaporan seperti pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim dengan Aplikasi SIMETRIS.
 - Pada laporan kinerja Triwulan I tahun 2025 telah memuat monitoring atas rekomendasi/rencana aksi namun belum selaras dengan rekomendasi/rencana aksi pada bab III Laporan Kinerja Tahun 2024 Laporan Kinerja Interim belum seluruhnya menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya dan belum terlihat adanya kondisi sebelum dan sesudah adanya rencana aksi.
 - Laporan kinerja belum sepenuhnya menginformasikan:
 - Kesimpulan/pembahasan pencapaian terhadap akhir periode Renstra di setiap IKU;
 - Pembahasan pemanfaatan informasi kinerja yang dikaitkan dengan capaian setiap indikator kinerja;
- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Laporan evaluasi internal telah disusun setiap triwulan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
 - Laporan Evaluasi Internal (LEI) Triwulan I belum dilengkapi dengan evaluasi terhadap RAPK yang seharusnya memuat:
 - a. Sasaran strategis/kegiatan, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran;
 - b. Target kinerja dan anggaran per bulan; serta
 - c. Capaian kinerja dan anggaran per bulan yang disertai data dukung (kertas kerja)
 - Masih terdapat perbedaan antara capaian kinerja yang tercantum dalam LEI dengan data realisasi indikator kinerja pada Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) melalui menu e-Performance

- Terdapat 6 (enam) IKU yang tidak mencapai target pada Laporan Kinerja Tahunan 2024. Lapkin yang disusun telah mencantumkan kendala/hambatan dan RTL atas tidak tercapainya IKU tersebut diatas, namun monitoring RTL IKU tersebut belum dilaksanakan secara optimal pada pelaksanaan evaluasi internal TW I 2025. Belum terdapat analisa apakah RTL tersebut telah dilaksanakan atau masih relevan atau tidak. Selain itu belum terdapat penyajian informasi terkait kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan RTL. Tahapan-tahapan tersebut perlu dilaksanakan karena merupakan satu siklus implementasi AKIP yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Pengisian realisasi dan capaian kinerja dilakukan secara tertib pada Aplikasi SIMETRIS, penyajian pada Aplikasi tersebut dijadikan dasar penyusunan dan penyajian data kinerja pada Laporan Evaluasi Internal dan Lapkin Interim, namun terdapat catatan ketidaksesuaian karena penyajian Kendala/Hambatan, RTL dan monitoring RTL pada Aplikasi SIMETRIS belum sepenuhnya selaras dengan penyajian pada Laporan Evaluasi Internal 2024-2025, Laporan Kinerja Interim 2024-2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024

Atas capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2025, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja
 - a. Menyusun SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyajikan seluruh IKSP/IKSK/IKU pada Perjanjian Kinerja (PK);
 - b. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; tidak adanya perbedaan nomenklatur antara beberapa IKU; tidak adanya perbedaan target kinerja.
- Pengukuran Kinerja

Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, termasuk pembaruan status rekomendasi pada menu RTL.

Pelaporan Kinerja

 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja;
 - b. Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/rencana

- aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- c. Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan pemanfaatan informasi yang dikaitkan dengan capaian IKU sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Melengkapi penyusunan LEI dengan mencantumkan evaluasi terhadap RAPK secara lengkap, meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, target dan realisasi kinerja serta anggaran bulanan beserta kertas kerja pendukungnya;
 - b. Melakukan reviu berjenjang dalam rangka memastikan kesesuaian angka capaian pada LEI dan Lapkin Interim dengan data pada Aplikasi SIMETRIS (menu e-Performance) sebelum batas input tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, untuk menghindari perbedaan data kinerja antar dokumen;
 - c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan RTL atas IKU yang tidak mencapai target secara berkala, dengan membuat tabel tindak lanjut berisi status pelaksanaan, hasil/efektivitas RTL, serta rekomendasi lanjutan jika RTL dinilai tidak lagi relevan;
 - d. Melakukan reviu berjenjang dalam rangka memastikan kesesuaian penyajian data kendala, hambatan, dan RTL di Aplikasi SIMETRIS dengan yang tercantum pada LEI, Laporan Kinerja Interim, dan Laporan Kinerja Tahunan, melalui reviu silang antar dokumen sebelum finalisasi laporan.
 - Capaian Kinerja

Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja.

Terhadap rekomendasi yang disajikan dalam laporan hasil evaluasi atas kelemahan pelaksanaan SAKIP BBPOM di Palangka Raya upaya perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 difokuskan pada

- Penyelarasan dokumen kinerja
- Pengendalian data yang dilaporkan untuk menjaga konsistensi data
- Reviu berjenjang atas kesesuaian data dan pengendalian kualitas analisis dalam konsistensi penyajian kendala, hambatan, dan RTL antar dokumen melalui reviu silang
- Monitoring seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
- Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam hal ini evaluasi capaian kinerja atas realisasi tahun sebelumnya dan mengoptimalkan peran aktivitas pengendalian risiko

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai AKIP UPT BPOM	Tata kelola dokumen kinerja masih lemah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penyusunan SK TIM SAKIP, serta mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk menjamin keselarasan dokumen, konsistensi nomenklatur IKU, dan ketepatan target kinerja di seluruh instrumen perencanaan.	Menyusun dan memperbarui SK Penetapan IKU serta SK Tim SAKIP dengan pembagian penugasan yang spesifik untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), konsistensi nomenklatur, serta ketepatan target di seluruh dokumen perencanaan.	Desember 2026	T	-	-

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pengisian data tersebut belum dilakukan secara tertib dan konsisten setiap bulan, khususnya dalam pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, termasuk pembaruan status rekomendasi pada menu RTL	Melakukan input dan pembaruan data pada Aplikasi SIMETRIS secara rutin setiap bulan sesuai jadwal, dan memanfaatkan aplikasi untuk pelaporan dari RTL dari ketua tim untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan RTL pada Aplikasi Simetris	Desember 2026			

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Laporan Kinerja Interim belum seluruhnya menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya dan belum terlihat adanya kondisi sebelum dan sesudah adanya rencana aksi	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan) dengan menyajikan hasil monitoring rencana aksi yang selaras antar periode (termasuk status penyelesaian dan perbandingan kondisi before-after), serta menyusun analisis mendalam mengenai pencapaian terhadap target akhir Renstra dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi	Menggunakan aplikasi untuk pelaporan RTL dari ketua tim untuk pemantauan dan pelaporan RTL laporan kinerja interim dan tahunan agar konsisten dan termonitoring secara berkala	Desember 2026			
	Pemanfaatan informasi kinerja belum berorientasi strategis	Menyajikan pembahasan pemanfaatan informasi kinerja dalam lakip dan menerapkan siklus evaluasi berbasis PDCA	Menyajikan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan evaluasi internal dan lapkin	Desember 2026	T	-	-

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	80.81	96.35	470,822,550	469,439,256	99.71

Pencapaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470,822,550 dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 469,439,256 dengan persentase 99.71 %.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	100.00	312,633,000	301,786,645	96.53
Layanan Perkantoran	1	1	100.00	7,915,151,000	7,904,238,230	99.86

Pencapaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM didukung oleh 2 rincian output antara lain Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT dengan realisasi output telah mencapai target dan persentase realisasi anggaran sebesar 96.53 % dan rincian output yang kedua yaitu layanan Perkantoran dengan realisasi output telah mencapai target dan persentase realisasi anggaran sebesar 99.86%.

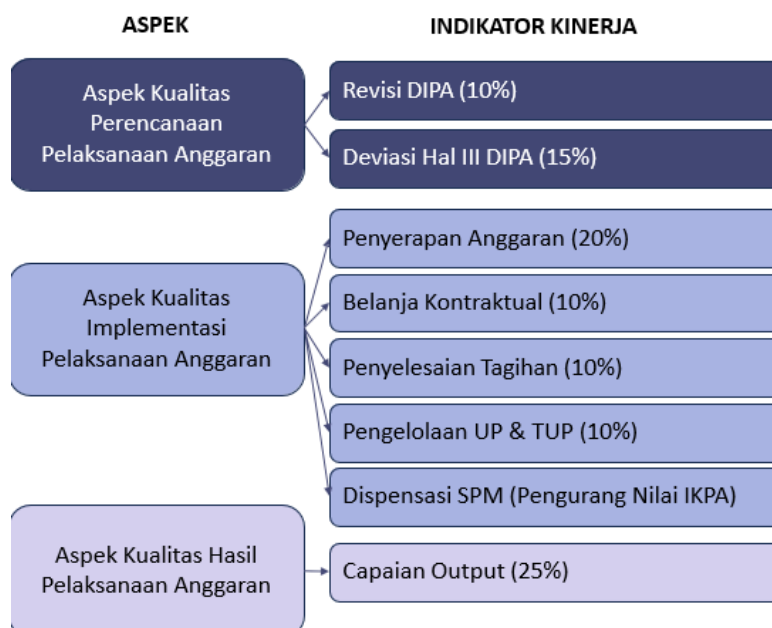
No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGLOLAAN ARSIP	2,236,000	2,235,819	99.99
2	PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	5,112,000	5,100,075	99.77
3	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	4,081,500	4,081,500	100.00
4	PEMUSNAHAN BMN	5,770,000	5,770,000	100.00

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
5	PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN/ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ GREENLABORATORY DALAM RANGKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	12,829,750	11,371,534	88.63
6	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	91,280,000	91,264,704	99.98
7	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	1,140,000	1,140,000	100.00
8	PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	96,676,000	91,846,232	95.00
9	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	4,140,777,000	4,133,502,614	99.82
10	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	843,352,000	839,013,426	99.49
11	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	29,338,000	28,910,800	98.54
12	PENGADAAN JASA OUTSOURCING	249,038,400	248,998,058	99.98
13	OPERASIONAL PERKANTORAN	61,269,800	62,149,294	101.44
14	LANGGANAN DAYA DAN JASA	82,428,800	88,070,993	106.84
15	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	84,530,000	82,040,851	97.06
16	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	5,452,600	5,329,460	97.74
17	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	36,230,600	31,110,754	85.87
18	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	20,800,000	20,819,531	100.09
19	JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	840,000	709,527	84.47
20	KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	8,080,400	9,985,418	123.58
21	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	8,195,800	8,195,752	100.00

Indikator kinerja Nilai AKIP merupakan aktivitas kegiatan dukungan manajemen yang tidak memerlukan kebutuhan anggaran besar. Pada penyusunan dokumen RAPK, untuk mendukung Nilai AKIP telah di tagging 17 sub komponen kegiatan dari 2 Kelompok Rincian Output dari 2 program/kegiatan di lingkungan BPOM. Dari 17 sub komponen kegiatan tersebut hanya 2 kegiatan yang lebih mendukung yaitu Operasional Manajemen Perkantoran dan Operasional Perkantoran. Atas tagging tersebut perlu dilakukan reviu atas tagging sub komponen kegiatan yang mendukung untuk selaras dalam pendukung pencapaian kinerja indikator.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA pada tingkat satuan kerja dilakukan terhadap aspek kinerja perencanaan anggaran diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dimana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian IKPA dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (25%), aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran (50%) dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%), sebagai berikut:



Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai\ EKA \times 50\%) + (Nilai\ IKPA \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai NKA	Kategori	Konversi indeks
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d 60	Kurang	2
60.01 s.d 80	Cukup	3
80.01 s.d 90	Baik	4
90.01 s.d 1000	Sangat Baik	5

Pada tahun 2025 terdapat perubahan frekuensi pengukuran dan satuan penilaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, dilakukan penilaian setiap bulan dan berupa persentase, pada tahun 2025, pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun dan dalam bentuk indeks.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	100.00	Sangat Baik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran berasal dari 50% nilai IKPA dan 50% nilai EKA, dengan nilai IKPA 98.24 dan nilai EKA 92.52 memberikan nilai NKA 95.38. Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran dikonversi menjadi indeks yaitu indeks 5 dari target 5 dengan capaian 100% dan kategori capaian Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	N/A	N/A	

			Belum dapat disimpulkan
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	5	5	100.00

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	93.6	89.7	95.83
	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
	92	91.3	99.24
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	90.7	92.01	101.44
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	5	5	100.00
		95.38	

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran sangat dinamis dalam pelaksanaan dan penilaiannya dimana hampir setiap tahun mengalami perubahan kebijakan dan penilaian. Pada tahun 2025 indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran mengalami reformulasi pengukuran menjadi indeks yang merupakan hasil konversi dari gabungan penilaian IKPA dan EKA serta perubahan waktu pengukuran, yang semula diukur setiap bulan menjadi bulan duabelas atau akhir tahun pada dokumen RAPK.

Berdasarkan tabel diatas realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 merupakan realisasi tertinggi sebesar 95.38 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan telah dimanfaatkannya rekomendasi evaluasi kinerja tahun sebelumnya dalam menindaklanjuti kendala yang dihadapi untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	 Tercapai/Melampaui

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah tercapai 100% dengan kategori capaian tercapai/melampaui.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
	5	5	100.00
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	5	5	100.00
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	5	5	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 pada kelompok unit kerja lain yang sejenis, ketiga unit pelaksana teknis tersebut telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ketiga unit pelaksana teknis tersebut berhasil mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan dengan realisasi sama sebesar 5.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Kinerja Anggaran UPT	Deviasi hal III DIPA bekum mencapai target	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.	Melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan.	2026	Y	S09.03.01	RPD tidak tercapai

Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Penyerapan Anggaran tidak sesuai	Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya	Melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan	2026	T	-	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	12Desember	043	063	432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,75 15 14,21	97,38	98,87 20 19,77	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,72	100,00 25 25,00	100,00	98,99	100,00%	0,75	98,24

Komponen Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran Sater (IKPA). Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 tercapai 100% terhadap target 5 dengan realisasi 5. Keberhasilan pencapaian IKPA antara lain :

0. Percepatan penyelesaian belanja modal pada triwulan I tahun 2025.
1. Monitoring dan pengendalian rencana penyerapan anggaran secara berkala
2. Penyediaan uang persediaan melalui mekanisme LS ke rekening pegawai untuk perjalanan dinas.

Tahun 2025 indikator yang belum tercapai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Ketidakberhasilan kedua indikator ini dipengaruhi oleh :

1. Keterlambatan proses pembayaran pengadaan barang sebagai akibat perubahan kebijakan mekanisme integrasi

pembayaran dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang dikembangkan pada tahun 2025

2. Keterlambatan barang datang serta kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
3. Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.

Sehingga sebagai perbaikan kinerja direkomendasikan untuk melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan.

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	1,748,680,250	1,747,492,122	99.93

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	100.00	312,633,000	301,786,645	96.53
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	150,000,000	150,000,000	100.00

Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	100,00	100,000,000	100,000,000	100.00
Layanan BMN	1	1	100,00	2,000,000	1,992,100	99.61
Layanan Perkantoran	1	1	100,00	7,915,151,000	7,904,238,230	99.86

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGELOLAAN ARSIP	2,236,000	2,235,819	99.99
2	PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT	5,112,000	5,100,075	99.77
3	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	4,081,500	4,081,500	100.00
4	PEMUSNAHAN BMN	5,770,000	5,770,000	100.00
5	PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN/ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ GREENLABORATORY DALAM RANGKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	12,829,750	11,371,534	88.63
6	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	91,280,000	91,264,704	99.98
7	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	1,140,000	1,140,000	100.00
8	PERTEMUAN NASIONAL/RAPAT TERPADU/MONITORING DAN EVALUASI/WORKSHOP DAN SOSIALISASI/DIKLAT/KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA	96,676,000	91,846,232	95.00
9	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	4,140,777,000	4,133,502,614	99.82
10	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	843,352,000	839,013,426	99.49
11	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	29,338,000	28,910,800	98.54
12	PENGADAAN JASA OUTSOURCING	249,038,400	248,998,058	99.98
13	OPERASIONAL PERKANTORAN	61,269,800	62,149,294	101.44
14	LANGGANAN DAYA DAN JASA	82,428,800	88,070,993	106.84
15	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	84,530,000	82,040,851	97.06
16	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	5,452,600	5,329,460	97.74
17	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG	36,230,600	31,110,754	85.87
18	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	20,800,000	20,819,531	100.09
19	JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT	840,000	709,527	84.47
20	KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN	8,080,400	9,985,418	123.58

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
21	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	8,195,800	8,195,752	100.00

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 yaitu 100% dari target 5 dengan realisasi 5. Alokasi anggaran sebesar Rp1.748.680.250,00 dengan realisasi Rp1.747.492.122,00 sehingga capaian realisasi anggaran 99,93%. Alokasi anggaran Tahun 2025 telah mendukung pencapaian target kinerja secara optimal dengan capaian output 100% pada seluruh kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran cukup efektif dalam mendukung pencapaian output kegiatan. Kegiatan tersebut mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan telah sesuai.
- Monitoring pelaksanaan anggaran berjalan dengan efektif.
- Efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas output.

Dari pencapaian tersebut terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga perlu penguatan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interim Pemerintah (SPIP) mengatur kerangka kerja dan proses yang digunakan pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasional dan sumber daya yang dimilikinya. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini mencakup identifikasi dan analisis risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tuntutan untuk mewujudkan *Good Governance* pada lingkungan birokrasi memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah sehingga pada sasaran kegiatan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Indeks Manajemen Risiko menjadi salah satu indikator kinerja yang dimunculkan pada dokumen Renstra 2025-2029.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Dalam penerapannya dilakukan penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi mengimplementasikan dan mengintegrasikan

manajemen risiko secara efektif dan efisien. Tingkat maturitas risiko digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

A. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian	Kategori Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.93	97.67	97.67	Baik

Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 sebesar 2.93 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 97.67%. dengan kategori capaian Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	N/A	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
	3	2.93	97.67

Maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan BPOM mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis diwajibkan melaporkan penerapan Manajemen Risiko setiap semester melalui Aplikasi SAPAAPIP. Dalam penilaiannya, Inspektorat Utama mengacu pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Penilaian maturitas manajemen risiko dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 sesuai dengan yang ditetapkan pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 sebesar 2.93 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 97.67%. dengan kategori capaian Baik.

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian tahun 2023
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	2.906	-
	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian tahun 2024
	-	2.938	-
	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian tahun 2025
	3	2.938	97.93

Maturitas manajemen risiko telah diimplementasikan dan dinilai sejak tahun 2021. Pada tahun 2025 maturitas manajemen risiko menjadi salah satu indikator kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal setelah ditetapkannya dokumen Renstra 2025-2029. Realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 sebesar 2.938 sama dengan realisasi tahun 2024. Realisasi mengalami kenaikan 0.032 dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar 2.906.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Kategori Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2	2.93	91.56	 Akan Tercapai

Realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 sebesar 2.938 memberikan capaian 91.56 terhadap target jangka menengah sebesar 3.2 dengan kategori “Akan Tercapai”. Namun demikian, apabila mempertimbangkan

kenaikan tren tahun-tahun sebelumnya. rata-rata kenaikan nilai indeks setiap tahun hanya sebesar 0.03 poin.

Dengan baseline tahun 2025 sebesar 2.938 diperlukan kenaikan total sebesar 0.62 poin untuk mencapai target tahun 2029 sebesar 3.2. Artinya, dibutuhkan kenaikan rata-rata 0.065 poin per tahun selama periode 2026-2029. Kebutuhan kenaikan ini lebih dari 2 kali lipat tren kenaikan rata-rata sebelumnya (0.03). sehingga pencapaian target tidak dapat mengandalkan pola kerja seperti sebelumnya.

Untuk dapat mencapai target jangka menengah di tahun 2029, diperlukan upaya akseleratif dan sistematis melalui strategi penguatan implementasi manajemen risiko yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko secara bertahap hingga menjadi bagian dari budaya organisasi pada tahun 2029.

D. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Indikator Kinerja	Balai Besar POM di Palangka Raya		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.93	97.67
	Balai Besar POM di Jayapura		
	Target	Realisasi	Capaian
	3	2.87	95.67
	Balai Besar POM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	Capaian
	3	2.93	97.67

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 pada kelompok unit kerja lain yang sejenis, ketiga unit pelaksana teknis tersebut belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Balai Besar POM di Palangka Raya dan Balai Besar POM di Gorontalo memiliki realisasi sama sebesar 2.93 dengan capaian 97.67% dan Balai Besar POM di Jayapura dengan realisasi lebih kecil sebesar 2.87 dengan capaian sebesar 95.67%.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 02 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 terhadap 115 Satuan/Unit Kerja di Lingkungan BPOM, rata-rata nilai maturitas manajemen risiko sebesar 2.875 atau Risk Aware dengan rata-rata 2.974 di tingkat Balai Besar POM. Nilai maturitas manajemen risiko ketiga UPT dalam 1 kelompok yang sama ini masih berada dibawah rata-rata nasional di

tingkat Balai Besar POM. Berdasarkan evaluasi, hal-hal yang masih perlu diperbaiki antara lain:

1. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko.
2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat bottom up
3. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru
4. Masih terdapat Unit Pemilik Risiko yang belum melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16
5. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16

Untuk memperbaiki penerapan manajemen risiko, dengan tingkat maturitas manajemen risiko yang semula berada pada level 2 menjadi level 3 atau risiko ditetapkan (risk defined). beberapa hal yang harus diperbaiki atau dipenuhi antara lain:

1. Menyusun perencanaan pelatihan/sertifikasi manajemen risiko secara berkesinambungan dan terjadwal
2. Memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan manajemen risiko
3. Memastikan pegawai yang mengelola manajemen risiko unit kerja telah mengikuti sertifikasi manajemen risiko
4. Mengendalikan pelaksanaan seluruh tahapan manajemen risiko sesuai dengan pedoman manajemen risiko
5. Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk level risiko inheren ≥ 16
6. Memastikan identifikasi risiko telah dilakukan pada seluruh fungsi/bagian, sasaran strategis/kegiatan, kategori risiko dan program baru
7. Memastikan seluruh isu internal dan eksternal serta pencapaian kinerja tahun/periode sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam identifikasi risiko
8. Menyediakan kertas kerja yang disertai justifikasi penetapan skor risiko pada penetapan kriteria untuk penilaian kemungkinan dan dampak
9. Melakukan integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja melalui cascading kinerja dan tagging risiko pada setiap RHK pegawai
10. Melakukan eskalasi kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk risiko yang belum dapat dikelola oleh Unit Pemilik Risiko.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Pembentukan tim manajemen risiko dan pelatihan dasar manajemen risiko	1. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko. 2. Pembentukan tim manajemen risiko di setiap fungsi dan bagian 3. Pelatihan dasar tim manajemen risiko 4. Implementasi hasil pelatihan sbb : a. Reviu usulan daftar risiko yang disusun pada dialog kinerja terhadap pedoman b. Penyusunan risk register final dilengkapi dengan dokumentasi kerja kerja penentuan level kemungkinan dan dampak. c. Penetapan risk register baru. d. Evaluasi penetapan dan efektivitas aktivitas pengendalian risiko. e. Reviu penentuan level kemungkinan dan dampak pada risiko residual. f. Penyusunan RTP untuk risiko inheren dengan level risiko lebih dari 16. g. Menguji RTP dengan dokumentasi kerja	Agustus tahun 2025	Tidak	-	-

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kerja hasil pengujian. h.Memutakhirkan risk register sapa apip				

Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya merupakan indikator kinerja baru pada dokumen Renstra 2025-2029 yang mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 untuk mengukur tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya. Meskipun demikian, Manajemen Risiko telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai bagian dari sistem pengendalian intern organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko yang belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor utama kegagalan tersebut adalah tidak berlanjutnya estafet pengelolaan manajemen risiko secara konsisten. Manajemen risiko belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya organisasi. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem manajemen risiko masih terbatas pada sebagian kecil pegawai, serta belum dilakukan transfer of knowledge secara sistematis kepada pegawai maupun Ketua Tim Kerja yang mengawal pelaksanaan indikator kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar manajemen risiko belum merata dan masih terdapat berbagai kelemahan dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas risiko tahun 2025, menunjukkan masih adanya kelemahan dari tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti sehingga menimbulkan kelemahan berulang dalam penerapan manajemen risiko. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Aspek kompetensi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai
2. Aspek komunikasi dan sosialisasi
3. Aspek identifikasi dan pengendalian risiko
4. Aspek dokumentasi dan pengujian aktivitas pengendalian

Berdasarkan kelemahan tersebut, langkah perbaikan yang menjadi prioritas adalah pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko pada setiap fungsi dan bagian yang akan diberikan pelatihan dasar manajemen risiko yang akan berperan sebagai:

- Agen perubahan dan informan dalam membangun pemahaman manajemen risiko di fungsi dan bagiannya

- Pelaksana revidi dan penyempurnaan data serta melengkapi dokumen manajemen risiko
- Pengawal tindak lanjut atas kelemahan hasil penilaian maturitas manajemen risiko tahun 2025
- Penggerak pembangunan budaya risiko sesuai pedoman yang berlaku

F. Analisis Program/kegiatan yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.93	97.67	470.822.550	469.439.256	99.71

Indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko merupakan output dari program/kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang merupakan kegiatan dukungan manajemen dari Kelompok Rincian Output Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT dan Layanan Perkantoran Capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko sebesar 97.67% didukung dengan anggaran dengan realisasi sebesar 99.71%.

Rincian Output	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	100.00	312.633.000	301.786.645	96.53
Layanan Perkantoran	1	1	100.00	7.915.151.000	7.904.238.230	99.86

Indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko merupakan output dari program/kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang merupakan kegiatan dukungan manajemen dari Kelompok Rincian Output Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT dengan realisasi anggaran sebesar 96.53% dan Layanan Perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar 99.86%.

No	Sub Komponen	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
1	PENGELOLAAN ARSIP - ZI	2,236,000	2,235,819	99.99
2	PEMBINAAN/SOSIALISASI/DESEMINASI HASIL PELATIHAN DAN KEBIJAKAN BPOM/BIMBINGAN TEKNIS OLEH INSTANSI TERKAIT - ZI	5,112,000	5,100,075	99.77
3	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI - ZI	4,081,500	4,081,500	100.00
4	PEMUSNAHAN BMN - BMN	5,770,000	5,770,000	100.00
5	PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN/ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ GREENLABORATORY DALAM RANGKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN – IPP	12,829,750	11,371,534	88.63
6	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN - ZI	1,140,000	1,140,000	100.00
7	OPERASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN	22,003,500	21,683,100	98.54
8	PENGADAAN JASA OUTSOURCING - ZI	186,778,800	186,748,544	99.98
9	OPERASIONAL PERKANTORAN	45,952,350	46,611,970	101.44
10	LANGGANAN DAYA DAN JASA - ZI	61,821,600	66,053,245	106.84
11	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR - ZI	63,397,500	61,530,638	97.06
12	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR - ZI	4,089,450	3,997,095	97.74
13	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG - ZI	27,172,950	23,333,066	85.87
14	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR - ZI	15,600,000	15,614,649	100.09
15	JASA POS/ GIRO/ SERTIFIKAT - ZI	630,000	532,145	84.47
16	KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN -ZI	6,060,300	7,489,064	123.58
17	PENGADAAN PAKAIAN DINAS - ZI	6,146,850	6,146,814	100.00

Indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko merupakan aktivitas kegiatan dukungan manajemen yang tidak memerlukan kebutuhan anggaran besar kecuali kebutuhan untuk memenuhi sebagai satu-satunya mitigasi risiko dalam pengendalian risiko, Pada penyusunan dokumen RAPK, untuk mendukung Indeks Manajemen Risiko telah di tagging 17 sub komponen kegiatan dari 2 Kelompok Rincian Output dari 2 program/kegiatan di lingkungan BPOM, Dari 17 sub komponen kegiatan tersebut hanya 2 kegiatan yang lebih mendukung yaitu Operasional Manajemen Perkantoran dan Operasional Perkantoran, Atas tagging tersebut perlu dilakukan reuiu atas tagging sub komponen kegiatan yang mendukung untuk selaras dalam pendukung pencapaian kinerja indikator.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang diindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Kinerja tidak dapat disimpulkan	Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target	1. Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk ke laboratorium di awal bulan 2. Melakukan pengujian sampel dan melaporkan melalui SIPT sesuai dengan timeline yang ditetapkan	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV Tahun 2025	Tidak		
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	1. Belum terdapat rencana pelaksanaan KIE PV 2. Belum dilaksanakannya KIE PV 3. Belum dilakukan Pemantauan pelaporan e-MESO oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Membuat perencanaan dan pelaksanaan KIE PV serta melakukan pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan	1. Menyusun rencana pelaksanaan KIE PV 2. Melaksanakan KIE PV pada Triwulan II 3. Membuat surat himbauan untuk pelaporan KTD/ESO dan apresiasi atas pelaporan oleh fasyankes yang sudah melaporkan secara rutin 4. Pemantauan Pelaporan e-MESO 5. Melakukan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes dan melakukan pendampingan/desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes di wil kerja BBPOM di Palangka Raya	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling pangan targeted dan PIRT dilakukan bersamaan oleh petugas yang sama	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Terdapat 13 sampel di sampling tidak sesuai renlak, terdiri 3 sampel MD/ML (biji/sayuran kering, sirup glukosa, Nori) dan 10 sampel PTT yang seharusnya disampling di bulan Juni namun karena keterbatasan ketersediaan di pasaran sehingga tidak dapat di sampling sehingga diganti dengan jenis sampel lainnya.	Dilakukan sampling terhadap pangan tertentu pada bulan-bulan berikutnya jika terdapat adanya kasus di masyarakat terkait isu keamanan pangan olahan untuk dapat memenuhi target yang telah dibuat hingga akhir tahun.	Dilakukan penggantian sampling Pangan Tertentu dengan jenis pangan lainnya sehingga target output tetap tercapai	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV Tahun 2025	Tidak		
		Pada laboratorium pengujian terdapat kendala pada parameter uji cemaran logam dikarenakan instrumen yang mengalami kerusakan dan memerlukan pergantian suku cadang. Selain itu terdapat beberapa	Melakukan pengawalan proses pengadaan dan memastikan barang dan suku cadang dapat diterima tepat waktu.	Pengujian segera dilaksanakan setelah suku cadang dan BHP telah diterima	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV Tahun 2025	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		reagen dan BHP seperti Kit ELISA dan SPE, masih dalam proses inden sehingga pengujian pangan olahan terkendala.								
5	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum diperoleh angka capaian indikator kinerja	1. Mengikuti progress pembahasan DO	1. Mempersiapkan sarana prasarana untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan 2. Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Untuk setiap kasus keracunan MBG di wilayah: a. Agar proaktif penanganan kasus KLB MBG, tanpa menunggu status KLB dari dinas b. Segera lakukan pengambilan sample/investigasi dan pengujian	2. Untuk setiap kasus keracunan MBG di wilayah: a. Agar proaktif penanganan kasus KLB MBG, tanpa menunggu status KLB dari dinas b. Segera lakukan pengambilan sample/investigasi dan pengujian	Melakukan pengambilan sampel segera setelah mendapat informasi terjadi kasus keracunan (KLB).	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV Tahun 2025	Tidak		
6	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran	1. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan 2. Retargeting sampel PIRT	1. Retargeting sampling 2. pembinaan pelaku usaha PIRT dalam pembuatan label bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 3. pengembangan inovasi terkait pembuatan label yang benar menurut	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	1. TW IV 2. TW I	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				peraturan perundang-undangan						
7	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi masih rendah	Meningkatkan monev dan tahapan tindak lanjut sesuai dengan Kep BPOM No 295 tahun 2022	Melakukan desk/konsultasi/monev CAPA secara berkala dengan pelaku usaha/penanggung jawab	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
8	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum melakukan pengawasan ke sarana produksi karena cuma ada 3 target direncanakan di TW2	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	Segera melakukan pengawasan ke saran produksi pada bulan April	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Realisasi dari 1 sarana dan capaian tidak dapat disimpulkan	1. Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW 2. Mengusulkan revisi target IKU ke unit pengampu menjadi 92% supaya capaian masuk kriteria sangat baik	1. Mengusulkan revisi target IKU ke unit pengampu menjadi 92% 2. Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
9	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana industri pangan olahan	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi pangan olahan di Kab. Kotawaringin Timur pada bulan April 2025 2. Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan di tiap TW hingga TW 3	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
10	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum bisa dihitung capaian IK	Mengikuti progress pembahasan DO	Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Target terlalu rendah karena terdapat satu komoditi sarana distribusi yang targetnya belum masuk pada target awal tahun	Memperhatikan target dan realisasi supaya capaian tidak melebihi 110%	1. Menyampaikan usulan perubahan target pada desk renstra tanggal 23-24 Juni 2025 2. Melakukan perencanaan inspeksi sesuai dengan breakdown renlak perbulan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi di masing-masing komoditi supaya capaian tidak melebihi 110% 3. Memperhatikan timeline SIPT dan kesesuaian tindak lanjut sarana dengan juknis/pedoman TL	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
11	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan bersamaan dengan Intensifikasi Pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri	Perlunya menekankan kembali kepada petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan sarana pada SIPT, selain pada laporan bit.ly Inwas.	Penekanan terhadap petugas agar pelaporan hasil pemeriksaan tidak melebihi timeline	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Belum adanya sosialisasi terkait pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan mengacu pada	Perlu dilakukan sosialisasi pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu sesuai dengan	Melakukan Sosialisasi pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK.	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW III	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana maupun temuan produk.	Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengawasan Peredaran Produk Pangan Badan POM.	02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan.						
12	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja triwulanan telah mencapai target yang ditetapkan	Konsisten dengan realisasi perencanaan untuk mencapai target	Memperhatikan realisasi dan target yang ditetapkan supaya capaian baik/sangat baik	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan lanjutan penilaian Indikator Kinerja terkait Standar Kemampuan Laboratorium pada periode renstra sebelumnya yaitu "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	Diperlukan strategi untuk mencapai target indikator dengan menyusun perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan faktor-faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.	1. Pembuatan roadmap pemenuhan SKL tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW I 3. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW II 4. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW III 5. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW IV	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW I-TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sesuai standar GLP". Namun kedua indikator ini mempunyai cara perhitungan dan formula yang berbeda yang terletak pada baseline perhitungan serta persentase komposisi penilaian yang dimana sebelumnya dihitung menggunakan rata-rata namun pada tahun 2025 perhitungan menggunakan proporsi penilaian yang berbeda pada masing-masing komponen. Nilai realisasi indikator "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP" pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,57 % dengan capaian 102,49 % telah mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan.								
14	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya pada 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang berada diwilayah kerja	- melakukan efisiensi perjadiin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan	Efisiensi perjadiin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW I	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			- meningkatkan pembinaan dan pengawasan produk pangan fortifikasi yang beredar di Provinsi Kalimantan Tengah							
15	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Realisasi melampaui target dengan kriteria sangat baik	1. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025. 2. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41,4%), media social (13,9%), dan webinar/daring (9,5%)	1. Menyusun perencanaan KIE sesuai dengan Juknis KIE tahun 2025 2. Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE triwulan I tahun 2025 (nilai: 89,83) 3. Sampai dengan bulan September tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 503 responden yang terdiri dari 293 responden survei KIE Tatap Muka dan 210 responden KIE Media, dengan nilai indeks 93.06 (capaian 106,73%) 4. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE secara berkala 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIE secara berkala 6. Meningkatkan social media management melalui konten yang menarik dan selaras dengan Agenda Setting 2025 7. Melaksanakan KIE dan menghadirkan narasumber	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik. 8. Meningkatkan penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline "bukan kata orang pastikan kataBPOM" 9. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE Triwulan IV 10. Pelaksanaan KIE SAKA POM/Gen Z"						
16	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	1. Memastikan pelaksanaan setiap tahap tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
17	Jumlah Desa Pangan Aman	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	1. Memastikan pelaksanaan setiap tahap tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
18	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya 2. Melakukan pengawasan terhadap pasar yang telah dintervensi tahun sebelumnya	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				3. Memastikan pelaporan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan						
19	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. adanya carry over pendampingan UMKM Kosmetik dari tahun sebelumnya 2. perubahan tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan	Mengikuti Sosialisasi Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan	1. Melanjutkan pendampingan UMKM kosmetik yang carry over dari tahun sebelumnya 2. melaksanakan tahapan pendampingan yang terlompati	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW II	Tidak		
		Upaya penerapan inovasi UMKM berdikari dengan pendampingan bersama mahasiswa magang dalam penyusunan dokumen CPPOB UMK	Penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pendampingan pelaku usaha di kabupaten dan pemanfaatan inovasi Smart Laura sebagai layanan publik	Pelaksanaan kegiatan: a. Bimtek CPPOB tahap 2 b. Desk coaching e-sertifikasi c. Desk coaching e-registrasi	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Belum adanya Informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bernilai A1 untuk di Tindak Lanjuti 2. Tindak Lanjut Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan gagal saat dilakukan Operasi penindakan 3. Capaian indikator penyidikan TW 1 terkait	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain, dalam menentukan cara bertindak yang lebih terukur, waspada, dan sesuai prosedur untuk menjamin keberhasilan operasi serta keselamatan personel	1.Koordinasi dan kolaborasi dengan Aparat penegak Hukum dan pihak lain dalam pengungkapan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan rutin"	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penanganan perkara melebihi target TW 1	di lapangan terutama ketika informasi menunjukkan bahwa target operasi merupakan seorang residivis, 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan							
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Kualitas hasil Patroli Siber oleh Tim Patber Lintas Fungsi tidak semuanya memenuhi standar yang ditetapkan	Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala pada hasil patroli siber guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di media daring.	1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi hasil patroli siber secara rutin setiap akhir periode patroli siber bulan berjalan. 2. Mengarsipkan seluruh hasil Monev dan dokumentasi tindak lanjut ke dalam sistem digital aplikasi internal yang dapat di akses seluruh anggota tim patroli siber	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Ya	S07.01.01	Kualitas laporan patroli siber belum sesuai dengan pedoman
22	Indeks Pelayanan Publik UPT		1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik 4. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik 5. Mengembangkan	1. Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2025 pada berbagai media (SP dan Maklumat Layanan) pada area layanan publik, media sosial, media luar ruang, dan sub site BBPOM di Palangka Raya 2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayan publik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan	elayanan publik, coaching dan mentoring 3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan prioritas/kelompok rentan 4. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MMP di Kab Barito Selatan 5. Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan kader, fasilitator UMKM dan KIE 6. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MMP pada MPP Kab. Pulang Pisau dan kabupaten potensial lainnya						
23	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai telah melaksanakan implementasi Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2026 dan telah menginput narasi dan lembar kerja LKE ZI pada link Inspektorat Utama	1. Implementasikan Road Map RB utk Tahun 2025 2. Implementasikan Road Map AOC utk Tahun 2025	1. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas di tiap Pokja 2. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas oleh AoC 3. Survei dalam rangka menjangkau minat pegawai terkait pokja yang diminati dan diharapkan mampu berkontribusi aktif	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				mengimplementasikan ZI 4. Bimtek Implementasi Zona Integritas dengan narasumber Inspektorat Badan POM 5. Pengisian mandiri LKE ZI dan pemenuhan data dukungnya"						
24	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Laporan evaluasi internal masih belum sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut masih belum selaras antara simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja 3. Belum semua SDM yang terlibat SAKIP mengikuti pelatihan implementasi SAKIP	1. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan akuntabilitas Balai 3. Perencanaan pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP	1. Pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP 2. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 3. Penyusunan lakip interim tw I 2025 4. Finalisasi tindak lanjut evaluasi SAKIP 2024 5. Persiapan penilaian indikator AKIP 2025 melalui SAPA APIP	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW III	Ya	S09.02.03	rencana aksi yang dicanangkan tidak terevaluasi pada periode berikutnya
25	Nilai Kinerja Anggaran UPT	blokir anggaran perjadi, belanja barang dan belanja modal dalam rangka efisiensi anggaran	efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, perubahan sampling dan pengujian, digitalisasi	1. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, digitalisasi 2. Pengawasan RPD halaman III DIPA, pengawasan pencapaian target output dan pengawasan pengelolaan UP dan TUP	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Tidak		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
26	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	Daftar risiko disusun sebelum penetapan PK 2025, cascading IKU pusat ke Balai dan IKU Direktif	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	Selesai	Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti	TW IV	Ya	S09.04.01	Tidak melaksanakan penilaian aktivitas pengendalian Inheren Risk

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan nyata dari komitmen instansi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan manajemen kinerja yang berbasis data, di mana informasi yang dihasilkan dari pelaporan berkala mulai dari Triwulan I hingga Triwulan III tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat kendali manajemen yang strategis.

Melalui kerangka SAKIP, evaluasi terhadap capaian di setiap periode menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran demi memastikan seluruh target tahunan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Berikut adalah rincian pemanfaatan informasi kinerja yang telah dilaksanakan:

1) Penyesuaian aktivitas atau kegiatan

Penyesuaian aktivitas atau kegiatan yang dilaporkan dibatasi untuk Indikator triwulan sebelum tidak tercapai dan/atau Indikator yang belum dapat dinilai capaian pada triwulan sebelumnya untuk dapat menunjukkan dampak dari penyesuaian aktivitas atau kegiatan pada periode pelaporan saat ini.

- a) Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO walaupun realisasinya baru dilaporkan pada akhir tahun berdasarkan data realisasi yang sudah ada dan perhitungan estimasi capaiannya adalah 42,73% sehingga telah dilakukan aktivitas sebagai berikut sebagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan:

- Membuat surat himbauan untuk pelaporan KTD/ESO dan apresiasi atas pelaporan oleh fasyankes yang sudah melaporkan secara rutin 65
- Melakukan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes dan melakukan pendampingan/desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Sehingga pada akhir tahun target indikator ini dapat tercapai dengan capaian realisasi 104,15% ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan tersebut berdampak untuk pencapaian target.

- b) Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi 94,39% sehingga di triwulan IV dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan melalui sosialisasi intensif kepada pelaku usaha mengenai pola tindak lanjut dan penyusunan CAPA, baik dilakukan secara langsung maupun melalui koordinasi dengan organisasi profesi seperti IAI. Petugas secara proaktif

memberikan layanan konsultasi melalui telepon dan WhatsApp untuk memantau progres serta memastikan surat tindak lanjut tersampaikan dengan tepat waktu. Selain itu, dilakukan penguatan sinergi lintas sektor melalui tim TKPPOM di kabupaten/kota serta penerapan evaluasi berkala agar seluruh proses pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dan hasilnya pada akhir tahun target indikator ini dapat tercapai dengan capaian realisasi 101,08% ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan tersebut berdampak untuk meningkatkan realisasi dan pencapaian target.

- c) Indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi 99,70% sehingga di triwulan IV. Capaian indikator yang belum mencapai target 100% disebabkan oleh beban kerja petugas yang melebihi kapasitas (*overload*) sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan, serta adanya keterbatasan kompetensi dan pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sebagai langkah perbaikan, telah dilaksanakan supervisi serta monitoring dan evaluasi (*monev*) secara intensif guna memastikan ketepatan timeline pelaporan dan kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut di lapangan. Selain itu, dilakukan upaya penguatan kapasitas melalui sosialisasi dan penyegaran (*refreshing*) terkait petunjuk teknis dan pedoman tindak lanjut, yang disertai dengan supervisi berkelanjutan terhadap indikator kinerja serta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaiannya demi optimalisasi kinerja pada periode mendatang.
- d) Indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT untuk realisasi akan dilaporkan pada akhir tahun, berdasarkan laporan triwulan sebelumnya salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator ini yaitu Bimbingan teknis belum dilaksanakan hal ini karena menunggu surat edaran Gubernur Kalimantan dan pada triwulan IV kegiatan bimtek ini telah dilaksanakan sehingga pada akhir tahun targetnya dapat tercapai dengan realisasi 102,16%.
- e) Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dinilai pada triwulan sebelumnya. Namun, dari hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya telah berhasil memenuhi penilaian tools dan data dukung sehingga telah dilakukan upaya untuk menjaga capaian kinerja sebagai berikut:
 - Melakukan evaluasi dan analisis hasil penilaian mandiri tools dan data dukung masing-masing kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya sehingga mampu memetakan potensi dan kelemahan dari masing-masing kabupaten/kota dalam upaya menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan

pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan di periode waktu selanjutnya.

- Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna menjalin kerjasama dan komitmen untuk pelaksanaan penilaian di periode selanjutnya.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasilnya pada akhir tahun realisasi untuk indikator ini mencapai target dengan capaian 100%.

f) Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya untuk penilaiannya dilakukan di akhir tahun, tapi di triwulan sebelumnya salah satu komponen penilaiannya IKPA yang berbobot 50% sudah dapat diukur capaiannya dengan dari hasil evaluasi tersebut telah dilakukan upaya mempertahankan capaian kinerja sebagai berikut:

- Menyelaraskan perencanaan anggaran (RPD dan PoA) dengan target penyerapan serta melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Memantau realisasi secara rutin untuk menjaga akurasi perencanaan (deviasi < 5%) dan segera melakukan revisi jika terdapat sisa anggaran atau pagu minus.
- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap mengikuti kebijakan terbaru dari kementerian/lembaga.
- Melakukan pembayaran kontrak secara tepat waktu sesuai kemajuan pekerjaan dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
- Meningkatkan ketertiban dan kecepatan dalam penyampaian dokumen untuk proses pencairan anggaran.
- Mengevaluasi target yang belum tercapai serta menyusun strategi percepatan untuk memastikan target output terpenuhi secara efisien.
- Memperketat monitoring mingguan oleh PPK dan Ketua Tim terhadap progres fisik serta realisasi anggaran.

Hasilnya pada akhir tahun realisasi untuk indikator ini mencapai target dengan capaian 100%.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan sebelumnya adalah Rp 13.194.594.030,- yang berarti 61% dari pagu awal dan 79% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu aktif paling rendah pada belanja barang 68% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyesuaian strategi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Memfokuskan penggunaan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian target.

- Melaksanakan kegiatan di lokasi yang sama secara bersamaan untuk menghemat biaya perjalanan dinas dan akomodasi.
- Memanfaatkan sisa anggaran (*sharing budget*) untuk mendukung pencapaian pada rincian output yang anggarannya masih diblokir.

Dari strategi tersebut berikut penyesuaian penggunaan anggaran yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2026:

- Telah dilakukan Revisi anggaran untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan IV di tanggal 13 Oktober 2025, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian nilai IKPA dalam komponen penilaian Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran.
- Pada tanggal 21 Oktober 2025 dilakukan revisi anggaran dengan kewenangan KPA untuk melakukan penambahan anggaran pada pemeliharaan alat laboratorium senilai Rp28.730.000,- yang berasal dari sisa anggaran dari pengadaan suku cadang dan perjalanan dinas kegiatan terpadu yang tidak jadi dilaksanakan.
- Pada tanggal 29 Oktober 2025 dilakukan revisi anggaran dengan kewenangan DJA untuk memindahkan anggaran yang bersumber dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang senilai Rp10.000.000,- karena berdasarkan estimasi sisa anggaran gaji masih berlebih dan dimanfaatkan untuk menambah biaya operasional untuk pembayaran listrik.
- Pada tanggal 05 November 2025 dilakukan revisi anggaran dengan kewenangan DJA untuk Buka blokir anggaran pada RO BAH.001 (sertifikasi) senilai Rp 127.182.000,- bersama dengan ini dilakukan target RO BAH dari 510 dokumen menjadi 711 dokumen.

3) Evaluasi hasil tindak lanjut atas rekomendasi atau rencana aksi kinerja sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya pada sub bab 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya, BBPOM di Palangka Raya telah menyelesaikan rencana aksi dengan status capaian seluruh indikator kinerja (100%) dinyatakan "Selesai" ditindaklanjuti. Upaya perbaikan pada aspek operasional difokuskan pada sinkronisasi manajemen sampling dan pengujian, di mana pengambilan sampel dilakukan pada akhir bulan untuk target bulan berikutnya guna memastikan pelaporan melalui aplikasi SIPT sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan pemisahan tugas petugas sampling untuk komoditi yang berbeda guna meminimalisir kesalahan kategori dan memastikan target tetap tercapai meskipun terdapat kendala ketersediaan sampel di pasaran.

Dalam aspek pengawasan dan pelayanan publik, instansi telah memperkuat koordinasi lintas sektor dan pendampingan kepada pelaku usaha. Hal ini mencakup pelaksanaan konsultasi Corrective Action and Preventive Action (CAPA) secara berkala, serta percepatan penanganan kasus KLB keracunan

pangan secara proaktif tanpa menunggu penetapan status resmi dari dinas terkait. Pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi "Smart Laura" dan optimalisasi manajemen media sosial juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi.

Pada sisi manajerial dan akuntabilitas, BBPOM di Palangka Raya melaksanakan strategi efisiensi anggaran dengan menggabungkan beberapa target kegiatan dalam satu perjalanan dinas luar kota serta melakukan pengawalan ketat terhadap RPD Halaman III DIPA. Penguatan internal juga diwujudkan melalui revidi daftar risiko pasca penyusunan matriks peran hasil, percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), serta perbaikan kualitas laporan evaluasi internal SAKIP agar selaras dengan pedoman instansi. Beberapa kendala strategis, seperti kualitas laporan patroli siber dan monitoring rencana aksi, saat ini telah diintegrasikan ke dalam manajemen risiko formal organisasi untuk menjamin keberlanjutan kinerja pada periode mendatang.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 menjadi dasar dalam menyusun strategi dan menetapkan target pada tahun 2026. BBPOM di Palangka Raya melakukan penyesuaian perencanaan untuk periode mendatang yang mencakup aspek-aspek berikut:

a) Penyesuaian Target dan Indikator Kinerja

Evaluasi capaian kinerja tahun 2025 menjadi dasar utama dalam menyusun strategi dan menetapkan target untuk tahun 2026. Penyesuaian ini bertujuan agar setiap target tetap menantang namun tetap realistis untuk dicapai. Dari dua puluh delapan indikator kinerja yang diukur, terdapat dua indikator yang menjadi perhatian karena belum mencapai seratus persen, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian 96,35% dan Indeks Manajemen Risiko dengan capaian 97,67%. Sebagai tindak lanjut, rencana kerja tahun depan akan difokuskan pada penguatan sistem manajemen, perbaikan tata kelola risiko, serta penyelarasan antara perencanaan dan pelaporan agar target tersebut dapat terpenuhi sepenuhnya.

Secara umum, penetapan target untuk tahun depan akan ditetapkan minimal sama dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2025 atau lebih tinggi. Hal ini akan didasarkan pada hasil perhitungan ulang dan analisis mendalam yang dilakukan dalam proses penetapan target guna memastikan peningkatan kualitas kinerja yang berkelanjutan. Perbaikan ini juga mencakup penajaman panduan pengukuran kinerja agar setiap indikator mampu menggambarkan kualitas kerja secara akurat dan sesuai dengan tantangan pengawasan di wilayah Kalimantan Tengah.

Melalui langkah penyesuaian ini, Balai Besar POM di Palangka Raya diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya yang saat ini sudah berada pada kategori Istimewa.

b) Penyesuaian Perencanaan Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 menjadi acuan utama dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2026 guna menciptakan perencanaan yang lebih akurat dan realistis. Dalam proses ini, Balai Besar POM di Palangka Raya tetap mempertimbangkan adanya kebijakan pemblokiran anggaran yang menjadi kendala pada tahun berjalan. Dengan memetakan kembali sisa pagu aktif serta total anggaran yang terblokir, penetapan anggaran di tahun mendatang diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan riil organisasi. Langkah ini penting dilakukan agar target kinerja tetap dapat tercapai secara maksimal meskipun terdapat batasan ketersediaan anggaran.

Selain fokus pada besaran pagu, perhatian utama juga diberikan pada akurasi penandaan (*tagging*) anggaran terhadap setiap indikator kinerja. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, masih ditemukan beberapa pengalokasian dana yang belum sepenuhnya tepat sasaran atau kurang sesuai dengan capaian kinerja pada indikator tertentu. Oleh karena itu, pada tahun 2026 akan dilakukan tinjauan lebih mendalam dalam proses penetapan penandaan anggaran. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki kaitan langsung dengan indikator kinerja yang dituju, sehingga penghitungan indeks efisiensi dapat dilakukan secara lebih objektif dan akuntabel.

Komitmen untuk melaksanakan kegiatan secara efisien akan terus dipertahankan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, terutama sebagai strategi dalam menghadapi kendala anggaran yang terblokir. Organisasi telah melakukan berbagai upaya konkret, seperti mengutamakan metode pertemuan secara daring atau *hybrid* untuk menghemat biaya operasional. Strategi efisiensi ini terbukti mampu menjaga kesinambungan program kerja tanpa mengurangi kualitas hasil di lapangan. Pada tahun mendatang, pola kerja yang hemat biaya namun berdampak besar ini akan terus dikembangkan guna memastikan seluruh sasaran strategis tetap terpenuhi di tengah dinamika kebijakan anggaran.

c) Penyesuaian Strategi untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian strategi dilakukan agar pencapaian target kinerja memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata, tidak hanya terbatas pada pemenuhan administratif. Rincian langkah tersebut meliputi:

- Transformasi Strategi Pengawasan Berbasis Kualitas
BBPOM di Palangka Raya melakukan perubahan pendekatan pengawasan dari yang semula berorientasi pada pemenuhan

jumlah target (kuantitas) menjadi fokus pada mutu dan efektivitas hasil kerja (kualitas). Strategi ini diimplementasikan dengan menetapkan kriteria pemilihan sampel (baseline target) yang lebih tajam serta melaksanakan pemeriksaan sarana secara lebih selektif. Melalui metode ini, kegiatan pengawasan di lapangan tidak lagi hanya mengejar pencapaian angka harian, melainkan lebih diutamakan untuk mendeteksi produk ilegal atau substandar yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, hasil pengawasan menjadi lebih akurat dan memberikan dampak perlindungan yang lebih nyata serta berkualitas.

- Digitalisasi dan Inovasi Proses

BBPOM di Palangka Raya melakukan percepatan digitalisasi guna menciptakan proses kerja yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Strategi ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pengawasan serta penguatan integritas pegawai saat menjalankan tugas di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, organisasi mengintegrasikan penggunaan aplikasi sistem informasi ke dalam prosedur operasional standar. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi "Sang Integritas" diwajibkan untuk memitigasi risiko benturan kepentingan, sedangkan aplikasi "Elamahamen" digunakan untuk mendokumentasikan proses pendampingan teknis secara sistematis. Selain itu, inovasi proses juga dilakukan pada sistem pemantauan kinerja melalui dasbor digital yang memungkinkan pimpinan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga setiap kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan diatasi lebih dini.

- Optimalisasi Kemitraan Strategis

BBPOM di Palangka Raya memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi masyarakat. Strategi ini didasarkan pada prinsip sinergi, di mana organisasi membangun jejaring kerja yang lebih erat dengan instansi pemerintah serta sektor swasta guna menciptakan ekosistem pengawasan yang komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan dengan instansi pemerintah difokuskan pada sinkronisasi program prioritas, seperti advokasi keamanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan keberlanjutan program secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sementara itu, kolaborasi dengan sektor swasta dilakukan melalui pola pembinaan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha guna mendorong kepatuhan serta kemandirian dalam



menjaga kualitas produk. Melalui kemitraan yang optimal, keterbatasan sumber daya organisasi dapat diatasi melalui dukungan peran serta aktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

3.3 Realisasi Anggaran

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) selama tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 19 (sembilan belas) kali Revisi DIPA, terdiri dari 10 Revisi Kewenangan KPA, 3 Revisi Kewenangan Kanwil dan 6 Revisi Kewenangan DJA sebagai berikut :

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
1	14/01/2025	-	KPA	- Perubahan jumlah unit Pada belanja Modal Laboratorium - Perubahan Pagu anggaran outsourcing - Penambahan Pagu anggaran untuk gaji PPNPN Gelombang 1 dan 2	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 1.420.656.000
2	22/02/2025	Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Tanggal 24 Januari 2025 Nomor S-37/MK.02/2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	DJA	- Blokir anggaran sesuai daftar lampiran	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 8.093.017
3	05/03/2025		KPA	- Revisi POK untuk Pemenuhan Gaji PPNPN sd akhir tahun 2025 - Penyelesaian pagu minus pada level detil	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang :

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
					Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 8.093.017
4	21/03/2025	Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 015/RILIS/BKN/III/2025 tentang Penetapan NIP CASN 2024 Sampai Penetapan SK Pengangkatan	DJA	- Pemenuhan gaji PPNPN - Revisi Antar RO untuk Reagen Sampel Pangan	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 8.093.017
5	10/04/2025	Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor BPR.05.03.1.2.03.25.84 hal Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025	DJA	- Buka Blokir anggaran sesuai daftar lampiran	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
6	23/04/2025		Kanwil	- Revisi Halaman III DIPA - Revisi akun minus	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
					: Rp 4.898.808.000
7	17/06/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penambahan Sub Kompnen (kegiatan) di BKB dan PDD - Penyesuaian Pagu Gaji PPNPN yang telah diangkat menjadi P3K	Total pagu : Rp 22.128.308.000 Rupiah Murni : Rp 20.884.570.000 PNBPN : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 5.530.734.000 Belanja Barang : Rp 10.694.106.000 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
8	08/07/2025	Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025	DJA	- Revisi pengurangan belanja Pegawai senilai Rp 546.605.000 - Penambahan pagu Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN Rp 5.588.000	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBPN : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
9	17/07/2025		Kanwil	- Revisi Halaman III DIPA - Revisi akun minus	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBPN : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
					: Rp 4.898.808.000
10	07/08/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penambahan Sub Kompnen (kegiatan) di QCD - Penyesuaian Pagu Gaji Outsourcing	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
11	09/09/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penyesuaian pagu anggaran untuk kegiatan	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
12	17/10/2025		Kanwil	- Revisi Halaman III DIPA - Revisi akun minus	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
13	21/10/2025		KPA	- Revisi POK pada RO PDD dan QIA terkait ke pengalihan anggaran pengadaan di laboratorium menjadi pemeliharaan di laboratorium	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
14	03/11/2025	Revisi belanja pegawai ke operasional	DJA	- Revisi belanja pegawai ke belanja oprasional (listrik) senilai Rp 10.000.000	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.898.808.000
15	11/11/2025	Nota dinas NOMOR: PR.05.03.2.11.25.666 Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025	DJA	- Buka blokir pada RO BAH (sertifikasi) senilai Rp 127.182.000,- - Penambahan target RO BAH dari 510 dokumen menjadi 711 dokumen (+201) - Revisi sumber dana antar RO: 1. BAH, PNBP - 90.000.000,- / RM +90.000.000,- 2. BKB PNBP +28.680.000,- / RM -28.680.000,- 3. PDD PNBP +61.320.000,- / RM - 61.320.000,- - Penambahan belanja pegawai pada RO BAH senilai Rp 13.314.000,- untuk pelaksanaan kegiatan pada RO	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.770.996.000

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
				BAH akibat buka blokir	
16	18/11/2025		KPA	- Revisi pada RO BAH, BKB, BMB, PDD, QCD, QDB, QIA, QIC dan EBA.WA untuk menyesuaikan pagu minus dan rencana pelaksanaan kegiatan - Penyesuaian pagu Belanja pegawai dalam rangka optimalisasi sisa anggaran per item	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBPNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.770.996.000
17	05/12/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penyesuaian pagu anggaran untuk kegiatan	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBPNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.770.996.000

No	Tanggal Penetapan	Surat acuan	Kewenangan	Perubahan	Rincian Pagu Per Jenis Belanja & Blokir
18	10/12/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penyesuaian pagu anggaran untuk kegiatan	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.770.996.000
19	12/12/2025		KPA	- Revisi Penyesuaian Pagu Minus setelah pelaksanaan kegiatan - Penyesuaian pagu anggaran untuk kegiatan	Total pagu : Rp 21.587.291.000 Rupiah Murni : Rp 20.343.553.000 PNBP : 1.243.738.000 Belanja Pegawai : Rp 4.984.129.000 Belanja Barang : Rp 10.699.694 Belanja Modal : Rp 5.903.468.000 Blokir Anggaran : Rp 4.770.996.000

Pada akhir tahun 2025 pagu yang dikelola menjadi Rp. 21,587,291,000,- dengan blokir anggaran Rp 4.770.996.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 16.816.295.000,-

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Pagu Aktif	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% terhadap Pagu Awal	% terhadap Pagu Aktif
1	Belanja Pegawai	4.974.129.000	-	4.974.129.000	4.963.649.906	99,79%	99,79%
2	Belanja Barang	10.709.694.000	3.385.528.000	7.324.166.000	7.232.071.063	67,53%	98,74%
3	Belanja Modal	5.903.468.000	1.385.468.000	4.518.000.000	4.517.997.470	76,53%	100,00%
TOTAL		21.587.291.000	4.770.996.000	16.816.295.000	16.713.718.439	77,42%	99,39%

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp 16.713.718.439,- yang berarti 77,42% dari pagu awal dan 99,39% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu aktif paling rendah pada belanja barang 98,74% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%.

Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

- i. Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- ii. Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
- iii. Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.
- iv. Dengan adanya anggaran yang direlaksasi maka dapat dilakukan upaya sharing anggaran kepada Rincian Output yang anggarannya masih diblokir, agar dapat memaksimalkan capaian output dan capaian realisasi anggaran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penyerapan anggaran di Tahun 2026 ini adalah terdapat anggaran yang bersumber dari PNBPN yang tidak dapat digunakan karena kesalahan teknis saat proses buka blokir anggaran sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan walaupun telah dibuka blokirnya dan untuk kendala akan dilakukan pengecekan kembali sebelum revisi diproses sehingga tidak terulang kembali.

B. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Output

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya didukung dengan 22 Rincian Output dan berikut hasil pengukuran capaian realisasi output dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya terhadap pagu awal dan pagu aktif di tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Aktif 2025 (Pagu-Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Aktif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	14	100,00%	100,00%	72.439.000	1.100.000	1.100.000	100,00%	1,52%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	711	711	792	111,39%	111,39%	145.537.000	145.537.000	144.497.854	99,29%	99,29%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	541	1508	278,74%	278,74%	193.733.000	89.232.000	89.165.023	99,92%	46,02%
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	736.000.000	312.633.000	301.786.645	96,53%	41,00%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	25	32	128,00%	128,00%	78.895.000	12.985.000	12.945.666	99,70%	16,41%
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	1,00	100,00%	100,00%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	1	100,00%	100,00%	1.707.506.000	1.707.506.000	1.646.068.706	96,40%	96,40%
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	3	3	100,00%	100,00%	358.335.000	358.335.000	358.156.037	99,95%	99,95%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	8	8	8	100,00%	100,00%	344.372.000	32.625.000	32.625.000	100,00%	9,47%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Aktif 2025 (Pagu-Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Aktif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	3	3	3	100,00%	100,00%	501.455.000	39.805.000	39.746.155	99,85%	7,93%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	1	100,00%	100,00%	137.071.000	26.535.000	26.531.308	99,99%	19,36%
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	48	106,67%	106,67%	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	13	13	100,00%	100,00%	43.762.000	7.600.000	7.597.400	99,97%	17,36%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	441	100,00%	100,00%	447.082.000	497.082.000	480.446.621	96,65%	107,46%
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	985	988	100,30%	100,30%	768.855.000	718.855.000	717.998.488	99,88%	93,39%
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	26	100,00%	100,00%	20.688.000	20.688.000	20.679.666	99,96%	99,96%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	336	339	100,89%	100,89%	402.118.000	402.118.000	401.828.887	99,93%	99,93%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	1	100,00%	100,00%	5.772.068.000	4.268.000.000	4.267.997.470	100,00%	73,94%
21	EBA.956 Layanan BMN	1	1	1	100,00%	100,00%	8.000.000	2.000.000	1.992.100	99,61%	24,90%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	100,00%	100,00%	10.094.234.000	7.915.151.000	7.904.238.230	99,86%	78,30%

C. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Kinerja

Balai Besar POM di Palangka Raya dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki 28 Indikator Kinerja berikut hasil pengukuran capaian realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya terhadap pagu pagu aktif di tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	110,00	718.855.000	717.998.488	99,88
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	104,15	4.300.000	4.294.280	99,87
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	103,56	219.030.750	211.501.690	96,56
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	32.678.100	32.616.355	99,81
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,86	109,25	109,25	219.030.750	211.501.690	96,56
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84,91	101,08	101,08	3.246.000	3.246.000	100,00
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	108,70	8.721.000	8.716.833	99,95
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,96	108,70	108,70	8.721.000	8.716.833	99,95
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	100,82	153.345.250	153.214.101	99,91
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,95	104,65	104,65	194.789.000	194.644.444	99,93

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	98,99	107,13	107,13	6.270.000	6.270.000	100,00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,57	102,82	102,82	6.270.000	6.270.000	100,00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,16	102,16	102,16	41.443.750	41.430.343	99,97
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76,6	105,66	105,66	5.975.506.000	5.914.066.176	98,97
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	100,00	26.342.400	24.826.886	94,25
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	4.208.000	4.208.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	92,88	106,53	106,53	102.217.000	102.110.689	99,90
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100,00	100,00	32.625.000	32.625.000	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00	100,00	39.805.000	39.746.155	99,85
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	100,00	26.535.000	26.531.308	99,99
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,1	15,38	109,08	109,08	7.600.000	7.597.400	99,97
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17	104,17	358.335.000	358.156.037	99,95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	110,00	1.100.000	1.100.000	100,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,96	105,53	105,53	145.537.000	144.497.854	99,29
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	88,19	100,41	100,41	5.789.458.650	5.771.646.341	99,69
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	80,81	96,35	96,35	470.822.550	469.439.256	99,71
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	100,00	1.748.680.250	1.747.492.122	99,93
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67	97,67	470.822.550	469.439.256	99,71

D. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

1) Pengukuran Efisiensi Output

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	111,39%	99,29%	1,12	0,12	100% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	278,74%	99,92%	2,79	1,79	78% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	96,53%	1,04	0,04	100% (efisien)
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	128,00%	99,70%	1,28	0,28	95% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
7	CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	96,40%	1,04	0,04	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100,00%	99,95%	1,00	0,00	100% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	99,85%	1,00	0,00	100% (efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	99,99%	1,00	0,00	100% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	99,87%	1,07	0,07	100% (efisien)
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00%	99,97%	1,00	0,00	100% (efisien)
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	96,65%	1,03	0,03	100% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,30%	99,88%	1,00	0,00	100% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	99,96%	1,00	0,00	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,89%	99,93%	1,01	0,01	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	99,61%	1,00	0,00	100% (efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	99,86%	1,00	0,00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,11	100% (efisien)

Dari 22 Rincian output (RO) 21 RO telah efisien dengan dan 1 RO tidak efisien disebabkan capaian output yang lebih besar dibandingkan capaian realisasinya. Secara umum capaian efisiensi mulai dari 0 sampai 1,79 dan secara total capaian efisiensi BBPOM Palangka Raya tahun 2025 adalah 0,11 dengan kriteria 100% efisien.

2) Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110,17	99,88	1,10	0,10	100% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	104,15	99,87	1,04	0,04	100% (efisien)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,56	96,56	1,07	0,07	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	99,81	1,00	0,00	100% (efisien)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,25	96,56	1,13	0,13	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	101,08	100,00	1,01	0,01	100% (efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	99,95	1,09	0,09	100% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	99,95	1,09	0,09	100% (efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,82	99,91	1,01	0,01	100% (efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,65	99,93	1,05	0,05	100% (efisien)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	107,13	100,00	1,07	0,07	100% (efisien)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	102,82	100,00	1,03	0,03	100% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	102,16	99,97	1,02	0,02	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105,66	98,97	1,07	0,07	100% (efisien)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	94,25	1,06	0,06	100% (efisien)
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,53	99,90	1,07	0,07	100% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	99,85	1,00	0,00	100% (efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	99,99	1,00	0,00	100% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	109,08	99,97	1,09	0,09	100% (efisien)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	104,17	99,95	1,04	0,04	100% (efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	111,11	100,00	1,11	0,11	100% (efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	105,53	99,29	1,06	0,06	100% (efisien)
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	100,41	99,69	1,01	0,01	100% (efisien)
26	Nilai AKIP UPT BPOM	96,35	99,71	0,97	-0,03	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	100,00	99,93	1,00	0,00	100% (efisien)
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	97,67	99,71	0,98	-0,02	Tidak Efisien
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,04	100% (efisien)

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang capaian efisiensi adalah dari -0,03 hingga 0,13 dari 28 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya hanya 2 Indikator Kinerja yang tidak efisien yaitu Nilai AKIP UPT BPOM dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM hal ini disebabkan capaian realisasi anggarannya lebih besar dibandingkan capaian realisasi kinerjanya, secara total capaian efisiensi BBPOM Palangka Raya tahun 2025 adalah 0,04 dengan kriteria 100% efisien.

3) Pengukuran Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pengukuran efisiensi per sasaran kegiatan dilakukan dengan merata-rata capaian Indikator kinerja dalam sasaran kegiatannya, hasil pengukuran untuk efisiensi per sasaran kegiatan di BBPOM Palangka raya pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
		Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja*	Total Realisasi Anggaran**	Capaian Realisasi anggaran***		
a	b	c	d	e	f	g=(d/f)-1	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15 Indikator	104,59	7.539.314.119	99,04	0,06	100% (efisien)
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	1 Indikator	100,00	4.208.000	100,00	0,00	100% (efisien)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Indikator	101,63	201.182.000	99,93	0,02	100% (efisien)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Indikator	109,08	7.600.000	99,97	0,09	100% (efisien)
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Indikator	104,17	358.335.000	99,95	0,04	100% (efisien)
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1 Indikator	111,11	1.100.000	100,00	0,11	100% (efisien)
7	Layanan Publik UPT yang prima	1 Indikator	105,53	145.537.000	99,29	0,06	100% (efisien)
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4 Indikator	98,61	8.479.784.000	99,76	-0,01	Tidak Efisien

* Hasil dari rata-rata Capaian Indikator kinerja yang dapat dinilai

** Jumlah realisasi anggaran indikator kinerja dalam sasaran kegiatan

*** Hasil dari Capaian realisasi anggaran Indikator kinerja

Pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,01 sampai 0,11 dan dari rata-rata per sasaran kegiatan ini capaian efisiensi untuk BBPOM Palangka Raya di tahun 2025 ini adalah **0,05** dan masuk dalam kriteria **100% efisien**. Berikut analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan:

- I. Sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” terdiri atas 15 Indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini capaian efisiensinya adalah 0.06 dan masuk dalam kriteria efisien, dari 15 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensinya ada pada rentang 0.00 sampai 0.13 dengan kriteria 100% efisien. Realisasi anggaran untuk sasaran kegiatan ini adalah Rp 7.539.314.119,- dengan Pagu Rp 7.618.549.00,- dengan capaian 99,04%.
- II. Sasaran kegiatan 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi” pagu anggaran Rp 4.208.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di triwulan 1 dengan capaian 100% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.
- III. Sasaran kegiatan 3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”. Terdiri atas 4 indikator kinerja dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,41 dimana Output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan. dari 4 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensinya ada pada rentang 0.00 sampai 0.07 dengan kriteria 100% efisien. Realisasi anggaran untuk sasaran kegiatan ini adalah Rp 201.013.152,- dengan Pagu Rp 201.182.000,- dengan capaian 99,93%.
- IV. Sasaran kegiatan 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pagu anggaran Rp 43.762.000,- dengan blokir anggaran Rp 36.162.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 7.600.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian kinerja 109.08% dengan capaian realisasi anggaran 99,97% sehingga sasaran kegiatan ini telah efisien pelaksanaannya.
- V. Sasaran kegiatan 5 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 358.335.000 terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian tahun 2025 104,17% dan capaian realisasi anggaran 99,95% sehingga berdasarkan pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini efisien yaitu capaian kinerja lebih besar dibandingkan capaian realisasi anggarannya.
- VI. Sasaran kegiatan 6 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” pagu anggaran Rp 72.439.000,- dengan blokir anggaran Rp 71.339.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 1.100.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil 100% efisien.
- VII. Sasaran kegiatan 7 “Layanan Publik UPT yang prima” pagu anggaran Rp 145.537.000,- dengan blokir anggaran Rp 127.812.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 17.725.000,- terdiri atas 1 Indikator dengan capaian kinerja 105,53 dengan capaian realisasi anggaran 99,29 sehingga capaian efisiensinya adalah 0,06 dengan kriteria 100% efisien.
- VIII. Sasaran kegiatan 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” pagu anggaran Rp 10.547.217.000,- dengan Blokir anggaran Rp 2.067.433.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 8.479.784.000,- terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan dari hasil pengukuran efisiensi 2 Indikator telah efisien dan 2 indikator tidak efisien. 2 indikator tidak efisien



akibat realisasi kinerjanya lebih rendah dari capaian realisasi anggaranya. Sehingga capaian untuk Sasaran kegiatan ini tidak efisien dengan capaian efisiensi -0.01.

BAB

4

Lakip
Tahunan
2025



Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi

BAB 4. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sepanjang tahun 2025, Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil menunjukkan performa organisasi yang sangat impresif dengan raihan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **103.51** dengan Predikat NKO **Istimewa**. Secara umum, keberhasilan ini merepresentasikan efektivitas fungsi pengawasan, penindakan, serta pendampingan yang dijalankan secara konsisten. dengan pencapaian per indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 110,17% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
2. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO berhasil tercapai dengan capaian 104,15% dengan kriteria Sangat Baik.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 103,56% dengan kriteria Sangat Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT berhasil tercapai dengan capaian 100.00% dengan kriteria Baik.
5. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 109,25% dengan kriteria Sangat Baik.
6. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berhasil tercapai dengan capaian 101,08% dengan kriteria Sangat Baik.
7. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,70% dengan kriteria Sangat Baik.
8. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,70% dengan kriteria Sangat Baik.
9. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100,82% dengan kriteria Sangat Baik.
10. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 104,65% dengan kriteria Sangat Baik.
11. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 107,13% dengan kriteria Sangat Baik.
12. Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 102,82% dengan kriteria Sangat Baik.
13. Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT berhasil tercapai dengan capaian 102,16% dengan kriteria Sangat Baik.

14. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berhasil tercapai dengan capaian 105,66% dengan kriteria Sangat Baik.
15. Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
16. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
17. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 106,53% dengan kriteria Sangat Baik.
18. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
19. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
20. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
21. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 109,08% dengan kriteria Sangat Baik.
22. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT berhasil tercapai dengan capaian 104,17% dengan kriteria Sangat Baik.
23. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 111,11% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
24. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT berhasil tercapai dengan capaian 105,53% dengan kriteria Sangat Baik.
25. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM berhasil tercapai dengan capaian 100,41% dengan kriteria Sangat Baik.
26. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM berhasil tercapai dengan capaian 96,35% dengan kriteria Baik.
27. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
28. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM berhasil tercapai dengan capaian 97.67% dengan kriteria Baik.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, telah berhasil tercapai dengan capaian 104,59%. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan 15 indikator kinerja yang seluruhnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan Secara kualitatif, distribusi capaian indikator tersebut terdiri atas 12 indikator dengan predikat Sangat Baik dan 2 indikator dengan predikat Baik. Adapun terdapat 1 indikator yang secara kuantitatif mencapai angka 110,17%,

- namun berdasarkan kriteria penilaian teknis dikategorikan sebagai Tidak Dapat Disimpulkan.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
 3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 101,63% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 3 indikator tercapai dengan kriteria baik.
 4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu berhasil tercapai dengan capaian 109,08% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT tidak berhasil tercapai dengan capaian 104,17% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif berhasil tercapai dengan capaian 111.11% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
 7. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Layanan Publik UPT yang prima berhasil tercapai dengan capaian 105.53% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 8. Sasaran Kegiatan Kedelapan, Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal berhasil tercapai dengan capaian 98.61% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 3 indikator tercapai dengan kriteria baik.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp 16.713.718.439,- yang berarti 77,42% dari pagu awal dan 99,39% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu aktif paling rendah pada belanja barang 98,74% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2025, disusun beberapa rekomendasi strategis guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang. Secara umum, Balai Besar POM di Palangka Raya perlu mempertahankan tren capaian kinerja yang telah berada pada kategori "Istimewa" (103,51%). Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sistem pemantauan berkala dan memastikan strategi operasional yang telah berjalan efektif tetap dilaksanakan secara konsisten guna menjaga stabilitas capaian target di tahun mendatang.

Direkomendasikan agar penetapan target kinerja tahun mendatang dilakukan dengan menjadikan realisasi tahun 2025 sebagai standar minimal atau lebih tinggi, guna menjamin adanya peningkatan kualitas kinerja yang berkesinambungan. Perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan indikator yang belum mencapai target seratus persen, khususnya pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Manajemen Risiko. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara perencanaan dan pelaporan serta penajaman panduan pengukuran kinerja agar setiap indikator mampu



menggambarkan hasil kerja secara objektif dan akurat sesuai dengan tantangan pengawasan di wilayah Kalimantan Tengah.

Selain itu, organisasi perlu terus memperkuat transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Penggunaan aplikasi pendukung seperti "Sang Integritas" dan "Elamahamen" harus terus diintegrasikan ke dalam prosedur kerja harian untuk menjaga transparansi dan mitigasi risiko di lapangan. Secara bersamaan, kemitraan strategis dengan instansi pemerintah dan sektor swasta perlu diperluas melalui program advokasi dan pendampingan teknis. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya organisasi sekaligus menciptakan ekosistem pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peningkatan akuntabilitas kinerja difokuskan pada penguatan nilai AKIP yang mencapai 96,35% melalui penyelarasan dokumen dan pengendalian kualitas data. Langkah perbaikan dilakukan dengan melaksanakan reviu berjenjang secara silang untuk memastikan konsistensi data, identifikasi hambatan, dan rencana tindak lanjut yang selaras antar dokumen kinerja. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi tahun sebelumnya akan ditingkatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, dibarengi dengan pemantauan ketat terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi evaluasi demi menjaga integritas dan transparansi pelaporan secara menyeluruh.

Optimalisasi manajemen risiko diarahkan untuk meningkatkan indeks yang berada pada angka 97,67% melalui pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko di setiap unit kerja. Tim tersebut akan mendapatkan pelatihan dasar agar mampu berperan strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya risiko serta sebagai pengelola data yang bertugas menyempurnakan dokumen manajemen risiko secara akurat. Lebih lanjut, tim ini bertugas mengawal tindak lanjut atas kelemahan hasil penilaian maturitas tahun 2025 guna memastikan setiap risiko terkelola dengan baik dan perbaikan organisasi dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan pedoman yang berlaku.



Balai Besar POM di Palangka Raya



Lampiran

- Lampiran

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

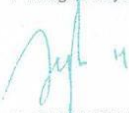
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Palangka Raya



ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 02 - Nilai AKIP UPT BPOM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	87.83 83.87 5 3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 22.128.308.000 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025 revisi ke-1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Jumlah sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.1 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,587,291,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,026,074,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,561,217,000

Palangka Raya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

[illegible][illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,867,427,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,981,300
Total															22,128,308,000

Palangka Raya, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

[illegible][illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,867,427,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,981,300
Total														22,128,308,000	

Palangka Raya, 12 June 2025

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya


Ali Yudi Hartanto

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Revisi RAPK ke-2)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	718,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	216,978,900
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,837,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	216,978,900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	84	84	84	84	84	6,117,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	92	92	92	92	92	7,285,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7,285,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	137,499,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	179,829,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	21,230,000
		12 - Persentase label produk tembakau								91	91	91	91	91	21,230,000

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	145,537,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	5,960,126,550
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	562,111,700
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,530,350
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	604,448,400
Total														21,587,291,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Palangka Raya, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

E. Pengukuran Capaian Output tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Efektif 2025 (Pagu- Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Efektif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	14	100,00%	100,00%	72.439.000	1.100.000	1.100.000	100,00%	1,52%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	711	711	792	111,39%	111,39%	145.537.000	145.537.000	144.497.854	99,29%	99,29%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	541	1508	278,74%	278,74%	193.733.000	89.232.000	89.165.023	99,92%	46,02%
4	<i>BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT</i>	1	1	1	100,00%	100,00%	736.000.000	312.633.000	301.786.645	96,53%	41,00%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	25	32	128,00%	128,00%	78.895.000	12.985.000	12.945.666	99,70%	16,41%
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat	1	1	1,00	100,00%	100,00%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Efektif 2025 (Pagu- Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Efektif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	dan Makanan di Seluruh Indonesia										
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	1	100,00%	100,00%	1.707.506.000	1.707.506.000	1.646.068.706	96,40%	96,40%
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	3	3	100,00%	100,00%	358.335.000	358.335.000	358.156.037	99,95%	99,95%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	8	8	8	100,00%	100,00%	344.372.000	32.625.000	32.625.000	100,00%	9,47%
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	3	3	3	100,00%	100,00%	501.455.000	39.805.000	39.746.155	99,85%	7,93%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	1	100,00%	100,00%	137.071.000	26.535.000	26.531.308	99,99%	19,36%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Efektif 2025 (Pagu- Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Efektif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	48	106,67%	106,67%	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	13	13	100,00%	100,00%	43.762.000	7.600.000	7.597.400	99,97%	17,36%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	441	441	100,00%	100,00%	447.082.000	497.082.000	480.446.621	96,65%	107,46%
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	985	988	100,30%	100,30%	768.855.000	718.855.000	717.998.488	99,88%	93,39%
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	26	100,00%	100,00%	20.688.000	20.688.000	20.679.666	99,96%	99,96%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan	1	1	1	100,00%	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Pagu Efektif 2025 (Pagu- Blokir)	Realisasi Anggaran	Capaian thd Pagu Efektif	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	fortifikasi yang diperiksa oleh UPT										
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	336	339	100,89%	100,89%	402.118.000	402.118.000	401.828.887	99,93%	99,93%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	1	100,00%	100,00%	5.772.068.000	4.268.000.000	4.267.997.470	100,00%	73,94%
21	EBA.956 Layanan BMN	1	1	1	100,00%	100,00%	8.000.000	2.000.000	1.992.100	99,61%	24,90%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	100,00%	100,00%	10.094.234.000	7.915.151.000	7.904.238.230	99,86%	78,30%

F. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,88	110,17	110,00	718.855.000	717.998.488	99,88
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,08	104,15	104,15	4.300.000	4.294.280	99,87
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,2	103,56	103,56	219.030.750	211.501.690	96,56
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	32.678.100	32.616.355	99,81
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,86	109,25	109,25	219.030.750	211.501.690	96,56
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84,91	101,08	101,08	3.246.000	3.246.000	100,00
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	108,70	8.721.000	8.716.833	99,95
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,96	108,70	108,70	8.721.000	8.716.833	99,95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	97,67	100,82	100,82	153.345.250	153.214.101	99,91
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,95	104,65	104,65	194.789.000	194.644.444	99,93
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	98,99	107,13	107,13	6.270.000	6.270.000	100,00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,57	102,82	102,82	6.270.000	6.270.000	100,00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,16	102,16	102,16	41.443.750	41.430.343	99,97
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76,6	105,66	105,66	5.975.506.000	5.914.066.176	98,97
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	100,00	26.342.400	24.826.886	94,25
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	4.208.000	4.208.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	92,88	106,53	106,53	102.217.000	102.110.689	99,90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
	kerja UPT	18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	8	100,00	100,00	32.625.000	32.625.000	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00	100,00	39.805.000	39.746.155	99,85
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	100,00	26.535.000	26.531.308	99,99
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,1	15,38	109,08	109,08	7.600.000	7.597.400	99,97
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17	104,17	358.335.000	358.156.037	99,95
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	110,00	1.100.000	1.100.000	100,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,96	105,53	105,53	145.537.000	144.497.854	99,29
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	88,19	100,41	100,41	5.789.458.650	5.771.646.341	99,69
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	80,81	96,35	96,35	470.822.550	469.439.256	99,71
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	100,00	1.748.680.250	1.747.492.122	99,93

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian NKO	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
a	b	c		d	e	f=e/d	g	h	i	j=i/h
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67	97,67	470.822.550	469.439.256	99,71

G. Pengukuran Capaian efisiensi Output tahun 2025

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	111,39%	99,29%	1,12	0,12	100% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	278,74%	99,92%	2,79	1,79	78% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	96,53%	1,04	0,04	100% (efisien)
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	128,00%	99,70%	1,28	0,28	95% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	96,40%	1,04	0,04	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100,00%	99,95%	1,00	0,00	100% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	99,85%	1,00	0,00	100% (efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	99,99%	1,00	0,00	100% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	99,87%	1,07	0,07	100% (efisien)
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00%	99,97%	1,00	0,00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	96,65%	1,03	0,03	100% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,30%	99,88%	1,00	0,00	100% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	99,96%	1,00	0,00	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,89%	99,93%	1,01	0,01	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	99,61%	1,00	0,00	100% (efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	99,86%	1,00	0,00	100% (efisien)
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,11	100% (efisien)

H. Pengukuran Capaian efisiensi Kinerja tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110,17	99,88	1,10	0,10	100% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	104,15	99,87	1,04	0,04	100% (efisien)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,56	96,56	1,07	0,07	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	99,81	1,00	0,00	100% (efisien)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,25	96,56	1,13	0,13	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	101,08	100,00	1,01	0,01	100% (efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	99,95	1,09	0,09	100% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	99,95	1,09	0,09	100% (efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,82	99,91	1,01	0,01	100% (efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,65	99,93	1,05	0,05	100% (efisien)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	107,13	100,00	1,07	0,07	100% (efisien)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	102,82	100,00	1,03	0,03	100% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	102,16	99,97	1,02	0,02	100% (efisien)
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	100,00	94,25	1,06	0,06	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
	pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					
15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
16	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	#REF!	#REF!	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,53	99,90	1,07	0,07	100% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	99,85	1,00	0,00	100% (efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	99,99	1,00	0,00	100% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	109,08	99,97	1,09	0,09	100% (efisien)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	104,17	99,95	1,04	0,04	100% (efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	111,11	100,00	1,11	0,11	100% (efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	105,53	99,29	1,06	0,06	100% (efisien)
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	100,41	99,69	1,01	0,01	100% (efisien)
26	Nilai AKIP UPT BPOM	96,35	99,71	0,97	-0,03	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	100,00	99,93	1,00	0,00	100% (efisien)
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	97,67	99,71	0,98	-0,02	Tidak Efisien
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,04	100% (efisien)

I. RHPK Indikator Kinerja tahun 2025

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari		87,25	#DIV/0!	25.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!
Februari		87,25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Maret		87,25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April		87,25	100.00	100.00	100.00	96.19	99.05
Mei		87,25	98.92	92.33	92.71	93.48	94.36
Juni		87,25	98.92	66.84	94.33	99.20	89.82
Juli		87,25	99.24	100.09	100.46	100.00	99.95
Agustus		89,75	98.40	97.89	98.13	96.91	97.83
September		89,75	98.37	97.74	97.74	98.51	98.09
Oktober		89,75	98.23	98.04	99.58	97.59	98.36
November		89,75	99.44	98.28	99.61	100.00	99.33
Desember		89,75	99.48	96.86	99.61	99.58	98.88

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari			0,00	#DIV/0!	
Februari			0,00	#DIV/0!	
Maret			0,00	#DIV/0!	
April		1,00	48,00	2,08	8,01%

Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)	Capaian (%)
Mei		1,00	48,00	2,08	8,01%
Juni		3,00	48,00	6,25	24,04%
Juli		4,00	48,00	8,33	32,05%
Agustus		5,00	48,00	10,42	40,06%
September		5,00	48,00	10,42	40,06%
Oktober		5,00	48,00	10,42	40,06%
November		7,00	48,00	14,58	56,09%
Desember	26,00	13,00	48,00	27,08	104,17%

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	35,00	85,00	48,57	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	39,00	85,00	76,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,09
Maret	39,00	85,00	93,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69
April	38,00	85,00	98,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
Mei	90,00	85,00	95,66	98,92	98,92	94,62	43,01	100,00	92,47
Juni		85,00	93,28	100,00	100,00	95,80	100,00	100,00	98,24
Juli		85,00	78,74	100,00	100,00	89,22	100,00	100,00	94,67
Agustus		90,00	77,44	100,00	100,00	92,28	100,00	100,00	94,72
September		90,00	73,36	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	93,94
Oktober		90,00	74,15	100,00	100,00	92,37	97,44	100,00	93,81
November		90,00	83,85	100,00	100,00	93,02	89,51	100,00	95,02

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Desember		90,00	82,64	100,00	100,00	91,38	80,45	97,44	93,20

4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)	TARGET INDIKATOR (n)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%					
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)		
Januari				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
Februari				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
Maret				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
April	Puding Cake	4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Mei		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Juni		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Juli		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Agt		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)	TARGET INDIKATOR (n)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%					
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)		
Sept		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Okt		12	12	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Nov		12	12	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%
Des		12	12	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%	100%

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85,00	100,00	0,00	0,00	100,00	34,29	#DIV/0!	83,57
Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	93,43
April	85,00	100,00	100,00	37,14	100,00	34,29	100,00	80,86
Mei	85,00	77,14	100,00	54,29	100,00	34,29	100,00	79,71
Juni	85,00	97,14	100,00	97,14	100,00	34,29	100,00	92,29
Juli	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
Agustus	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
September	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
Oktober	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
November	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
Desember	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	60,00	4,35	0,00	4,35
Februari	62,00	10,64	0,00	10,64
Maret	64,00	18,37	0,00	18,37
April	66,00	18,97	0,00	18,97
Mei	70,00	32,84	0,00	32,84
Juni	72,00	44,44	100,00	72,22
Juli	74,00	51,92	100,00	75,96
Agustus	84,00	55,56	100,00	77,78
September	84,00	58,57	100,00	79,29
Oktober	84,00	68,79	100,00	84,39
November	84,00	68,52	100,00	84,26
Desember	84,00	69,82	100,00	84,91

7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Mei	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juni	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juli	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Agustus	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
September	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00
Oktober	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00
November	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00
Desember	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	66,67
Maret	80,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
April	80,00	7,00	7,00	100,00	5,00	7,00	71,43	6,00	7,00	85,71	85,71
Mei	80,00	12,00	12,00	100,00	8,00	12,00	66,67	11,00	12,00	91,67	86,11
Juni	80,00	18,00	18,00	100,00	12,00	18,00	66,67	17,00	18,00	94,44	87,04

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
Agustus	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
September	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,913	22,00	23,00	95,65	86,96
Oktober	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
November	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
Desember	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96

9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Februari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Maret	73,88	95,45	100,00	100,00	91,67	96,78
April	73,88	90,70	93,75	100,00	101,25	96,43
Mei	73,88	94,87	93,75	100,00	104,71	98,33
Juni	73,88	97,77	93,75	100,00	97,16	97,17
Juli	73,88	98,31	93,75	100,00	94,23	96,57
Agustus	96,88	96,26	93,75	100,00	95,00	96,25
September	96,88	96,59	94,44	100,00	95,31	96,59
Oktober	96,88	96,92	95,00	100,00	95,59	96,88
November	96,88	99,61	93,21	97,92	96,88	96,90
Desember	96,88	99,62	94,17	100,00	96,88	97,67

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	80	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80	2	2	20,00	2	2	70,00	1	2	5,00	95,00
Maret	80	7	7	20,00	5	7	50,00	6	7	8,57	78,57
April	80	13	13	20,00	10	13	53,85	12	13	9,23	83,08
Mei	80	19	19	20,00	16	19	58,95	18	19	9,47	88,42
Juni	80	25	25	20,00	22	25	61,60	21	25	8,40	90,00
Juli	80	33	31	21,29	28	31	63,23	27	31	8,71	93,23
Agustus	85	43	37	20,00	38	43	61,86	37	43	8,60	90,47
September	85	51	43	20,00	45	51	61,76	43	45	9,56	91,32
Oktober	85	58	50	20,00	52	58	62,76	50	58	8,62	91,38
November	85	64	62	20,00	58	64	63,44	56	58	9,66	93,09
Desember	85	86	86	20,00	73	86	59,42	82	86	9,53	88,95

11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	98,00
Februari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,21	98,24
Maret	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,07	99,21
April	88,00	100,00	100,00	99,03	100,00	97,77	99,36
Mei	88,00	117,14	100,00	98,62	99,07	98,33	102,63

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Juni	88,00	102,98	100,00	98,71	99,12	98,80	99,92
Juli	88,00	100,00	100,00	99,17	100,00	93,61	98,56
Agustus	92,40	100,00	100,00	99,25	100,00	92,49	98,35
September	92,40	100,00	100,00	99,28	100,00	89,15	97,68
Oktober	92,40	100,00	100,00	99,31	100,00	89,23	97,71
November	92,40	100,00	100,00	99,32	100,00	89,82	97,83
Desember	92,40	100,00	100,00	99,40	100,00	95,55	98,99

12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		-	-	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		-	-	-
Agustus	91.00	100.00	78.83	89.42
September	91.00	100.00	82.58	91.29
Oktober	91.00	100.00	84.30	92.15
November	91.00	100.00	85.71	92.86
Desember	91.00	100.00	87.14	93.57

13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	100.00	108.63	100.00	100.00	100.00	102.16

14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : BBPOM di Palangkaraya
 Triwulan/Tahun : 4/2025
 Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
 Nama Tim Penilai : 1. Yustina, S.Si., M.Si.
 2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	80.5	76.6	72.5	105.7
2.	Standar Peralatan	78.6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90			
4.	Standar Metode Terverifikasi	26.2			

15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	20.00	2.00	10.00	20.00

16) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	0	0	1	0,00
Februari	0	0	1	0,00
Maret	100	1	1	100,00
April	100	1	1	100,00
Mei	100	1	1	100,00
Juni	100	1	1	100,00
Juli	100	1	1	100,00
Agustus	100	1	1	100,00
September	100	1	1	100,00
Oktober	100	1	1	100,00
November	100	1	1	100,00
Desember	100	1	1	100,00

17) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



18) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Januari	0						0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	35	25,00	12,5				37,50
Mei	35	25,00	25,00				50,00
Juni	35	25,00	25,00				50,00
Juli	70	25,00	25,00	25,00			75,00
Agustus	70	25,00	25,00	25,00			75,00
September	70	25,00	25,00	25,00			75,00
Oktober	75	25,00	25,00	25,00		5,00	80,00
November	90	25,00	25,00	25,00	20,00	5,00	100,00
Desember	8	25,00	25,00	25,00	20,00	5,00	100,00

19) Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	50	25,00	25,00				50,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Juli	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Agustus	70	25,00	25,00	20,00			70,00
September	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Oktober	80	25,00	25,00	20,00		10	80,00
November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
Desember	3	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00

20) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	25	25,00					25,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00	10,00		80,00
Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
Oktober	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
Desember	1	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00

21) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	1	30.00	20.00	10.00	4.62
Februari	8.5	60.00	40.00	20.00	9.23
Maret	19	100.00	60.00	30.00	14.62
April	29.5	200.00	60.00	40.00	23.08
Mei	47	550.00	100.00	50.00	53.85
Juni	61	595.00	100.00	60.00	58.08
Juli	73	685.00	100.00	90.00	67.31

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Agustus	78	870.00	120.00	90.00	83.08
September	87	930.00	160.00	100.00	91.54
Oktober	91	950.00	170.00	100.00	93.85
November	92	1000.00	180.00	100.00	98.46
Desember	14.1	10.00	1.00	1.00	15.38

22) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	18,33
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
April	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Mei	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Juni	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Juli	3	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	38,33
Agustus	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,85	1	0	1	61,67
September	3	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	2	0	2	71,67
Oktober	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	2	0	2	85,00
November	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100,00
Desember	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100,00

23) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	90,67
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	93,84
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	93,75
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	84,03
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	95,14
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	95,00
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	94,00
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00

24) Indeks Pelayanan Publik UPT

LEMBAR PENILAIAN PEMANTAUAN KINERJA DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2025

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK :

BALAI BESAR POM DI PALANGKA
RAYA

Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek	
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	5	
	II	Profesionalisme SDM	25%	5	
	III	Sarana Prasarana	18%	5	
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	5	
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5	
	VI	Inovasi	12%	4.5	
	Indeks Formulir F02			4.94	
	Indeks Formulir F03			5	
Indeks Pelayanan Publik			4.96		

25) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.277

Yth. : Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
Dari : Inspektur Utama
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Palangka Raya
Tanggal : 14 Agustus 2025

Berdasarkan

1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025; Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Palangka Raya.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Palangka Raya sebesar **88,19** dengan rincian sebagai berikut

26) Nilai AKIP UPT BPOM

Lampiran-2

Nota Dinas Inspektur Utama

Nomor : PI.04.71.7.01.26.03

Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,96	20,16	+1,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08	+0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	16,80	+1,00
5.	Capaian Kinerja	20	18,73	13,61	-5,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,37	80,81	-2,56
Predikat			A	A	Tetap

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.



Yan Setiadi

27) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Role

Pilih TA (2025)

Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	92,52	98,24	95,38

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

28) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Palangka Raya dapat dikategorikan *Risk Aware*.

Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	47	47	0
Nilai Maturitas	2,938	2,938	0,000
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	